



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN SEKJEN DAN ESELON I
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020 2021
Masa Persidangan : IV (empat)
Rapat Ke : 6
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 9 September 2020
Waktu : 10.40 s.d 16.30 WIB
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara : Membahas tentang:
1. RKA K/L Tahun 2020; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
37 dari 54 Anggota Komisi IV dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
9 dari 12 orang Anggota
 1. Sudin, SE./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. Mindo Sianipar
 3. Ir. Effendi Sianipar
 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 5. Vita Ervina, S.E., MBA.
 6. H. Yadi Srimulyadi
 7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 8. Maria Lestari, S.Pd.
 9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
 1. Budhy Setiawan
 2. Firman Soebagyo, S.E., M.M.
 3. Ir. Ichsan Firdaus
 4. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
5 dari 8 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 3. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 4. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 5. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. H. Charles Meikyansyah

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duk, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, s.Sos, M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.H.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
 5. Dr. Hamid Noor Yasin, M.M

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T.,
3. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.
4. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.
2. Ema Umiiyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

9. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
14. Ir. Hartono, M.Sc. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat para pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang mewakili Kepala Badan Restorasi Gambut.

Jadi Anggota ini ada surat kuasa dari Badan Restorasi Gambut yang mana yang bersangkutan sedang mempersiapkan masalah antisipasi kebakaran hutan di Sumatera Selatan.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar

Pendapat dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai acara rapat Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus pada tanggal 13 Juli 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI 24 Agustus 2020 serta tindak lanjut dari Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 31 Agustus 2020. Pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan para pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dalam rangka membahas RKA K/L Tahun 2021 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat hari ini kami nyatakan dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pada pukul 10.40 dan akan diakhiri pada pukul 13.30 WIB. Dan apabila belum selesai dapat di lanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Tata tertib DPR RI dan/atau kesepakatan bersama.

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan restorasi gambut;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 31 Agustus 2020 yang lalu. Pada rapat ini Komisi IV DPR RI meminta penjelasan kepada Eselon I terkait serta Kepala Badan Restorasi Gambut dengan beberapa poin penting hasil kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup, yang di antaranya:

1. Pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKAKL tahun 2021 senilai Rp7.957.114.783.000,- berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 Menteri Keuangan Nomor S692/MK/02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B636/M.PPN/D.8/KU0101/08/2020, tanggal 5 Agustus 2020, hal Pagu Anggaran Kementerian Lembaga

dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2021.

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700 miliar, yang terdiri dari:

a. DAK sub bidang lingkungan hidup sebesar Rp350 miliar.

b. DAK sub bidang kehutanan sebesar Rp350 miliar.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Saya minta salah satu Anggota dampingi saya untuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Silakan siapa yang mau dampingin, ya silakan.

Kami persilakan Eselon I atau Bapak Sekjen silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Anggota Komisi 4 DPR RI,
Rekan-rekan Eselon I Kementerian LHK.

Pertama-tama terima kasih Ketua atas arahan, bimbingan yang telah di berikan kepada kami dan atas terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat Eselon I Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR pada hari ini. Sesuai agenda yang telah di jadwalkan pada hari ini, ijin kami mewakili teman-teman Eselon I untuk memberikan paparan penjelasan terkait dengan Rencana Kerja Anggaran.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, sebentar saya potong.

Apakah Eselon I yang hadir har ini adalah melakukan swab atau belum?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Semua sudah Pak.

KETUA RAPAT:

Karena ini kita bukan untuk kepentingan saya tapi untuk kepentingan kita semua.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Alhamdulillah kami 1 minggu, 2 minggu ini terus swab, selain rapid test.

Saya lanjutkan, jadi 2 agenda kami akan sampaikan RKA K/L 2021 dan usulan program yang didanai Dana Alokasi Khusus. Dan ini sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Menteri LHK dengan Komisi IV DPR yang lalu. Secara cepat dalam paparan ini kami mengingatkan kembali untuk strategi pembangunan 2021 dan fokus pembangunan tahun 2021 ini sebagaimana yang disampaikan Ibu Menteri polanya masih menggunakan prioritas nasional. Jadi ada penekanan di prioritas nasional untuk PN1, PN3, PN 5 dan PN6 dan dengan arahan ini Kementerian LHK telah menyesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan berikut memang yang menjadi poin dalam kaitan dengan fokus pembangunan KLHK tetap menyesuaikan dengan apa yang telah di gariskan, termasuk bagaimana pemulihan industri pariwisata dan investasi. Dan pada akhirnya fokusnya di fokuskan di sistem ketahanan pangan. Dan akhirnya revitalisasi system pangan nasional menjadi kekuatan dari penyusunan RKA K/L ini.

Dan kami juga memfokuskan kepada reformasi sistem kesehatan nasional sebagaimana di halaman 7. Demikian juga di halaman 8 sistem perlindungan social dan reformasi system ketahanan bencana. Dan di halaman 9 Pimpinan, KLHK sudah mendasarkan kepada prioritas nasional, sebagai contoh di dalam prioritas nasional 1 dan 2 ini KLHK telah menyesuaikan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh di prioritas nasional 1 ini kemudian pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas luasan pemasaran serta destinasi pariwisata. Dalam PN1 dan PN2 juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan wilayah ini juga menjadi catatan kami di KLHK.

Kemudian di halaman 10, prioritas nasional nasional 3 kita menganggarkan juga untuk SDM kualitas dan berdaya saing. Dan untuk prioritas nasional 4 reformasi mental dan pembangunan kebudayaan menjadi acuan, walaupun tidak menjadi PN kita. Di halaman 11, inilah yang menjadi kekuatan di KLHK di tahun 2021 ini, yaitu prioritas nasional 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini yang sekarang juga akan difasilitasi oleh Eselon I yang sangat terkait.

Terus bagaimana penjelasan prioritas nasional, sebagaimana halaman 12 terlihat setelah prioritas nasional itu masuk ke program prioritas dan masuk kepada kebijakan prioritas. Kalau kita lihat di PN1 kita terus berupaya agar Pagu di PN1 ini bisa meningkat, di karenakan di PP 6, program prioritas 6 ini kita di kuatkan dengan PP 6 ini peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, sehingga di dalam KP-nya kita sudah bisa memasukkan penguatan perhutanan social. Yang menjadi andalan kita selain memang kegiatan-kegiatan yang lain, ini menjadi catatan kami termasuk ada kegiatan Padat Karya, ada juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini menjadi pegangan kita ketika menyusun kegiatan-kegiatan di prioritas nasional 1 ini.

Terbukti di halaman 13 arah dari prioritas nasional 1 ini kami sudah bisa melihat bahwa anggaran Rp503.591.000.000,- itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan di KLHK khususnya program prioritas peningkatan kuantitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan yang sudah menjadi pegangan kita Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, terlihat sekarang kalau di tahun 2020 dan sebelumnya, di program Eselon I itu terlihat masing-masing sekarang ada di unit kegiatan Eselon I itu mendukung dari prioritas nasional kita bisa link-an. Dan inilah yang kami harapkan nantinya eksekusi di tingkat tapak dan dalam pemulihan ekonomi nasional dalam kaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, ini yang akan kita buat dalam kerja baru di tahun 2021 nanti. Dan di tahun ini kita akan menguatkan selain mencapai realisasi di tahun 2020.

Demikian juga di halaman 14, kita bisa lihat disini rincian kegiatannya sudah ada, contoh peningkatan ketahanan air untuk pertumbuhan ekonomi juga ini pengelolaan hutan berkelanjutan. Kenapa saya sampaikan Pak Pimpinan? KLHK akan banyak berada dalam KP di pembangun pengelolaan hutan berkelanjutan dan nantinya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sini Eselon I terkait juga di halaman 14 terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada, output-nya juga jelas dan nantinya kami akan mengintegrasikan dalam provinsi kabupaten dan yang terkait dengan masyarakat apalagi itu merupakan prioritas kami. Demikian juga 815 PN1 ini ini juga terlihat dukungan dari KLHK dalam kaitan dengan contohnya kegiatan pariwisata.

Nah, kemudian di PN2 ini juga sama polanya ada prioritas ketika bicara wilayah ada PP4, program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, di halaman 16. Dalam kaitan ini KP juga sudah terlihat dan angka-angka sasaran indicator ini juga sudah tercantum, sehingga kami menyesuaikan dengan PN2 ini. Dan total di PN2 khusus di Kalimantan, pembangunan wilayah Kalimantan, jadi dari PP atau Program Prioritas 4 wilayah Kalimantan KLHK ada di situ. Dan kegiatan Eselon I-nya itu ada di PKTL, KSDAE, dan PDASHL. Salah satunya Ketua, adalah pembangunan ibu kota negara dalam kaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya. Ini juga sudah menjadi target fisik output dari Ditjen PDASHL, sementara Eselon I yang lain juga sudah ada di PN2 ini.

Kemudian di halaman 18, untuk PN3 ini berkaitan dengan SDM. Kami perhatikan memang highlight-nya ini di program prioritas 6 dan 7 kaitan dan KLHK ini juga kami menyesuaikan dan di dalam output-nya ini di BP2SDM dan yang terkait ini juga ada dan di PN3 totalitas Rp340.958.541.000,- di dalam program prioritas pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas dan daya saing ini kegiatan-kegiatannya berbasis masyarakatnya terlihat sekali, yaitu reforma agraria dan perhutanan social dan terkait sekali juga dengan PSKL, BP2SDM dan KPTL. Jadi di dalam setiap PN sudah terlihat di Eselon I atau di program Eselon I itu dukungannya serta volume dan satuannya juga sudah terlihat. Ini mohon dapat dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI di halaman 19, karena PN3 ini sangat berbasis masyarakat.

Kemudian di PN4 dan 5 kita tidak terkait, langsung ke PN6 di halaman 20. Sama ketika juga sangat terkait dengan program dan kegiatan prioritas. Di sinilah Ketua, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan juga program prioritas peningkatan ketahanan bencana dan iklim, pembangunan rendah karbon, ini betul-betul menjamin program kualitas lingkungan hidup yang di dalam Eselon I-nya itu minimal ada 3 Eselon I yang terkait. Dan di dalam kegiatannya PN6 inilah yang akan kami dorong di 2021 sampai 2024, karena ini betul-betul Tusinya KLHK dan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dari gambaran ini kami sudah mulai menyusun untuk di 2021 dengan cara kerja baru tentunya.

Terlihat di dalam PN6 pagu yang terbesar dari total Rp7,9 triliun tadi kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup di halaman 21 terlihat Rp2.981.773.708.000,- dan itu betul-betul berada di Ditjen PPKL beserta BRG dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Jadi angka sebesar ini memang ada di sini. Juga di halaman 22 di dalam program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup ini ada KSDAE, ada PSLB3, ada di halaman 23 juga masih lanjut, ada PKPL, ada penegakan hukum dan di halaman 24 itu PDASHL. Jadi hampir semua Ketua, Anggota yang kami hormati, di dalam PN6 inilah semua Eselon I yang hadir di sini di tahun 2021 itu ada di program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup. Jadi terlihat bahwa lingkungan hidup bukan hanya dari Direktorat Jenderal yang menangani lingkungan tapi juga terkait dengan yang menangani kehutanan. Di samping tadi di PN sebelumnya kami juga sudah sampaikan kekuatan besarnya ada di Prioritas Nasional 3. Jadi NPN1, PN2, PN3 dan PN6 inilah yang menjadi acuan kami, karena akan dievaluasi setiap tahunnya pencapaian target dari amanat tentunya kebijakan yang terhormat Bapak Presiden.

Akhirnya di halaman 25, sebagaimana yang Bapak Ketua sampaikan tadi bawa Pagu Anggaran kami Rp7.957.114.783.000,- kami tetap merinci per unit kerja Eselon I, karena dalam pembuatan laporan keuangannya pun kami juga tetap harus sesuai. Jadi ada belanja operasional, non operasional, secara rinci bisa kita lihat bahwa Direktorat Jenderal yang sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, di sini terlihat angkanya pagunya lumayan besar. Dari samping dukungan manajemen, inovasi, vokasi,

pendidikan dan juga ketahanan bencana dan perubahan iklim. Jadi 13 Eselon I beserta BRG di 2021 kami masuk ke dalam 6 program. Dan di tahun 2020 ini kami sudah dapat persetujuan untuk tambahan pagu sebesar Rp394.596.799.000,- ini keterkaitan dengan usulan yang lalu sehingga disetujui dan sudah masuk di dalam pagu Rp7,9 triliun ini dalam kaitan dengan persemain modern di destinasi wisata prioritas dan IKN serta dukungan food estate. Ini lebih banyak ada di Ditjen PDASHL. Jadi dalam Rapat Dengar Pendapat ini sebagai tindak lanjut Rapat Kerja yang lalu pagu inilah yang kami tindak lanjuti pada hari ini dengan kegiatan-kegiatan sesuai belanja yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Di halaman 26 sampai halaman 28 atau 29 sampai halaman 29, inilah rincian Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. Perubahan mendasar bagaimana pagu anggaran mulai 2021 nanti itu tidak lagi program itu ada di setiap Eselon I, tapi sudah menjadi 6 program besar. Dan di halaman 26 sampai 29 ini, itu yang pasti setiap Eselon I punya program dukungan manajemen. Kemudian program yang kedua itu inovasi itu ada di Badan Litbang Inovasi. Kemudian yang ketiga, vokasi itu di Badan Penyuluhan Pengembangan SDM. Kemudian sisanya 3 program kalau kami ringkas di halaman 26 sampai 29, ada Eselon I yang berada di tiga program yang akan saya sebutkan, yang keempat adalah program hutan berkelanjutan. Yang kelima program kualitas lingkungan hidup dan yang keenam program ketahanan bencana dan perubahan iklim.

6 program ini kalau di-link tadi ke prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas itu sudah link. Jadi kita bisa lihat contohnya Ditjen PDASHL di halaman 26 di butir 4, di sinilah lengkapnya program hutan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ini dengan Pagu Rp2,2 triliun harus menjamin hutannya bisa pulih dan lingkungannya juga bisa pulih, kualitasnya juga meningkat. Di Ditjen KSDAE juga sama di butir 5, ini juga pagu terbesar harus mengawal selain mengawal dukungan manajemen masing-masing juga mengawal KLHK di 2 program ini. Sementara di Eselon I yang lain kalau kita lihat di halaman 27, kita lihat Badan Penyuluhan, kemudian Badan Litbang ini tidak dua-duanya ada, tapi di Eselon I tetap muncul. Nah, kemudian Ditjen PKTL di halaman 27 walaupun pagunya masih Rp410 miliar juga mengawal program hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup.

Jadi kalau kita lihat 13 Eselon I atau 11 Eselon I dikurangi Sekjen dan Irjen yang harus kita jaga terus teman-teman semua bahwa 3 Dirjen yang mengawal 2 program besar hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup itu ada di PDASHL, KSDAE, dan PKTL. Dan sementara di halaman 28, kita bisa lihat bagaimana Ditjen Penegakan Hukum di butir 10, mereka juga dengan anggaran Rp344 miliar mengawal anggaran untuk hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Jadi kalau dari sisi penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap dukungan di program 2 tadi ini juga sinergi. Nah, untuk Eselon I yang lain seperti contohnya di Ditjen PSLB2 dan Ditjen PPI ini terlihat langsung kepada kualitas lingkungan.

Sementara Ditjen PSKL di halaman 28, mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dengan pemberian akses legal masyarakat untuk memperoleh ijin, jadi akses legal. Dan di halaman 29, disini kita juga bisa lihat bagaimana PPKL dengan BRG itu menyatu dalam menguatkan program kualitas lingkungan hidup. Jadi kami laporkan memang di 2021 ini mengalami perubahan efisiensi, tapi 6 program ini tidak lepas dari 13 Eselon I.

Kemudian yang sudah pernah kami laporkan dan juga Ibu Menteri sudah sampaikan dalam Rapat Kerja di halaman 30 belanja pegawai tetap Rp2.011.000.000.000,- kemudian belanja operasional 789. Ini memang rutinitas untuk kantor di halaman 30 dan 31. Nah, di dalam halaman 32 kita masih tetap menyusun dengan pola per Eselon I ada prioritas nasional Rp3,83 miliar itu sudah masuk dalam paket yang kami jelaskan tadi di depan dalam 4 prioritas nasional. Dan sampai pada akhirnya 6 program di KLHK. Jadi ini tetap kita piace bisa kelihatan. Dan di luar PN kita juga punya prioritas bidang yang memang menjadi bagian yang terpenting ketika KLHK juga punya kebijakan-kebijakan program dan kegiatan yang harus bersinergi tetap dengan prioritas nasional.

Nah, kemudian dalam halaman 33 Pimpinan, kami mencoba melihat berapa anggaran berbasis masyarakat minimal yang sudah kita coba lihat. Dan mohon maaf kalau ada perubahan-perubahannya dan hari ini termasuk yang bisa dilihat per Eselon I di tahun 2021 ini. Ini ada 6 Dirjen dan 1 badan termasuk BRG, sebagai contoh kegiatan-kegiatan di Ditjen PDASHL, Kebun Bibit Rakyat dan Penyediaan Bibit Rp100 miliar dan juga kegiatan di Ditjen PSKL Bank Pesona, PSLB3, kemudian PPKL, dan Ditjen KSDAE, juga ada Ditjen PHPL. Inilah yang menjadi catatan kami Pimpinan, ketika nanti dalam prakteknya kegiatan-kegiatan lain di luar ini kami akan kawal berdasarkan prioritas dan juga binaan-binaan Bapak dan Ibu yang kami hormati di Dapil-Dapil masing-masing agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sementara tapi sudah masuk dalam 6 program tadi khususnya 2 program pembangunan hutan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ini nanti kami akan perbaiki kembali sesuai dengan diskusi, tanggapan atau pertanyaan dari yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Bagian pertama seperti itu Bapak Pimpinan. Kemudian yang di bagian kedua, yang sekarang memang sudah menjadi perhatian kami semua dengan 6 program tadi yang sudah melekat dalam PN. Dana Alokasi Khusus ini kami terus pelajari untuk bagaimana terjadi sinergi dari Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena ada istilahnya DAK Aspiratif. Jadi kami harapkan DAK ini tetap masuk dalam PN ataupun program KLHK yang mana di sini kekuatannya ada di hutan berkelanjutan sama kualitas lingkungan hidup. Di tahun 2021 yang sudah dibahas tentunya sejak awal tahun yang lalu, ada kebijakan umum di DAK ini dan tadi kami sudah laporkan bahwa kalau di 2021 kita mulai mencoba bisa masuk untuk penyesuaian, tapi kita akan bangun di 2022 dengan perencanaan jangka panjang, sehingga tidak lagi mendadak karena ini sifatnya dan menjadi monumental untuk kegiatan-kegiatan berbasis LH.

Di tahun 2021 di halaman 35, ini ada aturan yang sudah kita pegang ya, yaitu adanya money follow program prioritas Presiden mendukung target RPJMN, mendukung target RKP 2021 dan yang paling penting mendukung tematik program penurunan dan stunting, penyediaan infrastruktur, ekonomi berkelanjutan, termasuk di KSDAE 10 destinasi wisata dan ketahanan pangan yang kami akan paparkan dalam kesempatan nantinya. Ini jadi dari DAK.

Kemudian dari kebijakan DAK Fisik tahun 2021 itu ada bidang Pendidikan, bidang kesehatan dan ada bidang konektivitas. Kemudian di penugasannya bersifat lintas bidang, mojar project dan prioritas tertentu ditujukan daerah prioritas, kemudian bersifat lockdown dengan konsultasi konfirmasi ke daerah. Isu tematiknya di tahun 2021 KLHK juga masuk dalam program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, juga ada di program penurunan stunting dan program penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Dari 2021 inilah nantinya di 2022 kami akan rubah strukturnya dalam kaitan dengan mekanisme pengusulan sejak awal dan kami akan kuatkan melalui FGD Insya Allah di minggu ketiga September saran Ibu Menteri agar DAK ini juga dapat sekaligus bisa kita jamin mendukung 6 program KLHK tadi.

Tadi dalam kesempatan ini kami harus sampaikan, seperti apa DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 2019-2021. Di halaman 37 ini angkanya memang masih berada dalam 600-700 tapi pernah di 2015 besar. Dan kami di tahun 2020 ini Pimpinan, bersama Eselon I yang akan mengawal program bagaimana Pemda juga bisa ikut mendukung prioritas nasional tadi. Kami akan sesuaikan juga berdasarkan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Di halaman 38 kebijakan DAK Fisik sub bidang LH menjadi catatan untuk kami semua dalam mendukung untuk di 2022 agar lebih pas dan tepat sasaran, tepat locus, tepat subject, tepat objek, ini tapi tetap tidak lepas dari sasaran output di 2021 yang sudah mendukung indeks kualitas lingkungan hidup, ini ada sekitar Rp350 miliar. Dan sasaran outputnya di halaman 38, 39 ternyata memang tidak lepas dari program di KLHK, sebagai contoh adanya early warning system dalam bencana ini juga kualitas air dan merkuri dan pengendalian pencemaran dan penurunan stunting. Di tahun 2021 usulannya dari kabupaten-kabupaten yang diintegrasikan dengan DAS, danau prioritas dan sungai tercemar berat, serta locus penurunan stunting itu ada 46 titik. Dan juga termasuk informasi kualitas air dan merkuri dengan pendekatan 15 DAS dan sungai tercemar berat, ada locus penurunan stunting. Ini output yang menjadi dasar kami yang ke depan akan bisa kita lihat lagi.

Kemudian juga di butir dua, pengurangan sampah ini juga menjadi perhatian dalam kaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah. Dalam kaitan dengan penurunan stunting, pengembangan 10 destinasi wisata di 60 kabupaten kota sebesar 26%. Kalau di hitam-hitamkan ini Pimpinan, ini menjadi perhatian kami ketika di Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja KLHK sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI, point-pointg penting di-bold

inilah yang akan kami dorong di tahun 2021 dan tahun 2022 agar bisa lebih kuat lagi dalam mendukung kebijakan DAK Fisik ini. Dan tidak lepas dari kabupaten kota, 10 destinasi wisata, kemudian tidak lepas juga dari locus terintegrasi, kemudian 15 DAS Danau Prioritas dan juga pendekatan sungai tercemar. Inilah yang kita ingin harapkan DAK Fisik sub bidang LH itu akan link dengan program peningkatan kualitas lingkungan hidup yang harus kita rubah dalam kaitan dengan usulan dari kabupaten kota dan bagaimana kebijakan KLHK sesuai dengan arahan dari PN tadi.

Nah, kemudian ada kriteria lokasi prioritas 2021 halaman 40. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ini menjadi catatan-catatan kita yang bisa didiskusikan kembali sebagai bahan nantinya ke depan, nomor satu mendukung pengelolaan sampah serta Sarpras. Nomor dua, kemudian terbagi dalam penanganan stunting dan dalam pengembangan 10 destinasi wisata. Lebih jelas lagi disini fokus, locusnya sehingga yang early warning system di halaman 41 juga sudah ada patokan-patokannya yang mana mohon ijin Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI dalam kaitan dengan kabupaten kota yang menjadi Dapil-Dapil Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan kriteria yang ada di lokasi prioritas 2021 kami juga akan tetap kuatkan lagi dan lebih kuat lagi nanti di 2022, karena tadi harapan Pimpinan dan Anggota agar kami harus banyak konsultasi agar dalam pelaksanaan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat itu tidak lagi ada keraguan bahwa program-program ini bisa terlaksana dengan baik hasil kordinasi dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Di halaman 42, rincian menu kegiatannya minimal ini Pimpinan yang bisa kami sampaikan halaman 42 seperti apa sih sebenarnya DAK sub fisik lingkungan hidup ini yang bisa kita dorong lagi nanti di FGD di halaman 42. Kemudian yang kaitan dengan kebijakan DAK di sub bidang kehutanan yang nilainya juga Rp350 miliar. Sementara ini arahnya kepada pembangunan hutan berkelanjutan dan ada 1000 paket sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, kelompok tani hutan PSKL Hut dan juga di Ditjen PDASHL dan inipun juga harus bersinergi tetap dengan Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL agar tidak salah sasaran. Jadi kita di dalam DAK ini berusaha tetap harus mendukung program prioritas nasional. Sekali pun sumber dananya APBN dan juga ada sub bidang LH dan sub bidang kehutanan.

Halaman 44, ini juga tetap menjadi menu dalam ketahanan pangan dan nomor 2 mendukung sarana dan prasarana. Kata kuncinya sekali lagi ada di provinsi dengan lahan kritis kabupaten kota daerah. Nah, ini yang kami harapkan Pimpinan menguatkan daerah melalui Komisi IV DPR Ri, melalui Dapil-Dapil Bapak dan Ibu sekalian, dengan dukungan juga kami semua agar tepat sasaran. Jadi tidak lagi usulan Bupati tidak sesuai dengan apa persoalan-persoalan mendasar di lapangan atau di Tapak, ini yang kami akan berbagi cara kerja dalam mengantisipasi pemulihan lingkungan ini halaman 44. Nah, kemudian di halaman 45 menu kegiatannya kalau kita lihat tidak akan lepas dari APBN yang ada di KLHK. Semua rincian menu ini tidak lepas dari Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL,

tapi kalau bicara tadi kualitas lingkungan itu ada di sub bidang lingkungan hidup.

Demikian Pimpinan, ada satu catatan kami di alokasi anggaran non operasional 2021, ini bisa dilihat dari halaman 48 sampai dengan 128. Sekali pun di program KLHK 6 program kita mengikat dalam satu kesatuan di Bappenas dan atau Kementerian Keuangan, tapi kami tetap menyusun di halaman 48 sampai dengan halaman 128 per eselon I rincian kegiatannya juga tetap ada, karena ini kegiatan non operasional yang bisa didorong dengan prioritas bidang. Jadi prioritas bidang ini juga bisa dilihat disini di halaman 48, selain prioritas nasional dengan anggaran dari 7,9 itu sudah hampir 40-an% atau 50-an% ini di luar belanja pegawai dan belanja operasional kami juga ada prioritas bidang yang bisa menjadi pintu masuk menguatkan dari prioritas nasional tadi. Jadi di halaman 48 itu Setjen sampai di halaman 128, masing-masing kegiatannya ini bisa kita lihat kalau sebagai contoh, saya akan mencontohkan kenapa harus dibuat seperti ini, agar kami dapat mengendalikan sekali pun 6 program tapi di dalam kaitan dengan prioritas tetap kita tidak lepas. Sebagai contoh di halaman 56, pengelolaan PHPL ini masuk program pengelolaan hutan berkelanjutan masih konsisten sampai dengan 57. Kita akan lihat di halaman 57 sampai PHPL di halaman, ini per Eselon II sampai di Ditjen PDASHL di halaman 65. Ini juga ada pagu non operasional dan tidak lepas dari program pengelolaan hutan berkelanjutan per Satker, per Eselon II juga bisa kita lihat bagaimana prioritas bidang ini.

Selain itu di halaman 70, program kualitas lingkungan hidup juga ada di Ditjen PDASHL. Jadi contoh bahwa komitmen kami dalam menyusun perencanaan penganggaran tidak bisa lepas sekalipun itu prioritas bidang ada di setiap Eselon I tetap harus masuk ke-6 program yang sudah diarahkan oleh Pemerintah. Jadi ini menguatkan kinerja dari masing-masing Eselon I bahkan di Eselon II, sehingga kalau nanti ada usulan yang sifatnya memang menguatkan dari 6 program kami harus detailkan di rincian di Tusinya Eselon II sampai bahkan kepala-kepala UPT sehingga tidak ada lagi Rp1,- yang lepas dari arahan kebijakan Presiden, Menteri sampai kepada Eselon I penanggung jawab program dan sampai kepada kepala-kepala UPT. Jadi seperti itu di dalam arahan di prioritas bidang ini. Sama tentunya nanti di Ditjen yang terkait dengan lingkungan juga sama diuraikan di Ditjen PPKL juga bisa kita lihat atau Ditjen PKTL selalu ada pembangunan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup di 3 Ditjen tadi. Selain itu, Eselon I ada yang hanya satu program inovasi atau vokasi itu menguat di 2 badan itu termasuk ketahanan pangan dan bencana itu di Ditjen PPI.

Demikian paling tidak struktur anggaran yang kami siapkan dalam mengendalikan di 2021 dan tetap tidak melupakan bagaimana 2020 yang sedang berjalan ini masa transisi untuk menyesuaikan menjadi 6 program tapi kegiatan tetap tidak lepas dari kebijakan yang saya sampaikan tadi di RPJMN 2020-2024. Akhirnya ijin Pimpinan, di luar materi ini sebagaimana yang kami laporkan tadi kalau di dalam halaman 119 ini ada alokasi berbasis masyarakat tahun anggaran 2021 ini juga sudah ada, ini yang

menjadi pegangan kita. Mohon ijin, kalau nanti ada perubahan tentunya tidak lepas dari FGD yang akan kita kerjakan, kita laksanakan dengan cara kerja baru.

Dan kemudian yang berikut, di luar materi RKAKL 2021 dan DAK 2021. Ijin kami mewakili semua Eselon I karena ada tambahan kegiatan di 2020 dalam mendukung kebijakan yang terhormat Bapak Presiden, pemulihan ekonomi nasional ini ada tambahan materi yang sudah kami bagikan atas komitmen kami semua disini. Ijinkan secara makro kami sampaikan dan nantinya akan ada tanya jawab dalam kaitan PEN ini kepada masing-masing Eselon I Pimpinan, karena ini satu pakat kalau satu-satu yang menyampaikan akan tidak terlihat integrasinya. Tapi nanti tanggapan, pertanyaannya bisa langsung kepada para Dirjen yang menangani PEN ini.

Kalau kita lihat di agenda kerja PEN, ijin yang di sampaikan juga oleh Ibu Menteri, kami update perkembangannya sampai Rapat Dengar Pendapat hari ini. Dari agenda kerja pemulihan ekonomi nasional ada lima Pimpinan dan Anggota. Dan diharapkan di tahun 2020 ini, itu dilaksanakan oleh KLHK. Yang pertama padat karya mangrove, yang kedua padat karya pangan Hutsos, yang ketiga PSN lahan food estate, yang keempat produktif sampah dan yang kelima penyangga konservasi. Kami laporkan telah terbit anggarannya di tanggal 2 September, satuan anggaran bagian anggaran dari Kementerian Keuangan membiayai untuk yang padat karya mangrove dan PSN lahan food estate. Jadi ini dalam matriknya jangan pindah dulu sebentar yang sebelumnya, bagaimana skema yang dibangun dan dalam padat karya mangrove ini ada di Ditjen PDASHL Pak Hudoyo dan mendorong bagaimana penanaman mangrove ini bisa dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tentunya tidak lepas dari adanya persemaian dan yang terlibat ini ada kelompok hutan social, kelompok proklam, dan kelompok tani hutan, termasuk pengawasan atau supervise dilakukan.

Ini kami sudah siap dalam tindaklanjutnya untuk merevisi pagu di 2020 ini dengan Dirjen Anggaran juga di IPSN lahan food estate ada 4 kegiatan besar, penataan kawasan, rehab gambut, pangan agroforestri dan koridor satwa. Dan sekarang yang masih berjalan pembahasannya untuk padat karya pangan Hutsos melalui inventory, operasi pendampingan lapangan dan penilaian dan administrasi kordinasi ini masih dengan Kementerian UMKM dan Koperasi. Nah, kemudian ada dua kegiatan KLHK di prioritas 4 dan 5, ini masih juga dalam kaitan dengan penguatan. Jadi dari PEN ini Pimpinan, kami berharap untuk menjadi kekuatan di tahun 2021 dan seterusnya termasuk ini jadi agenda FGD, karena PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ini KLHK sangat terlibat sekali dalam kaitan dengan basis masyarakat yang tapak kawasan atau lingkungan. Kita bisa lihat contoh produk sampah itu tidak lepas dari masyarakat pemulung-pemulung ini bahasanya di perkotaan, demikian juga masyarakat yang ada di penyangga wisata konservasi, kemitraan konservasi yang dilakukan Ditjen PSDAE. Ini akan kita berikan padat karya dalam kaitan dengan pemulihan ekonomi nasional dan usulan

keuangannya juga ada. Kita bisa lihat di halaman berikutnya bagaimana proses sampai 2 September yang sudah keluar ini.

Lanjut, halaman berikut. Nah, posisi keuangan kita sudah ada untuk mangrove dan food estate, sedang dalam proses Dirjen Anggaran untuk keluar dalam revisi RKAKL di tahun 2020. Dan sebelumnya ada usulan juga yang sampah wisata belum dibahas masih dengan komite, PEN Hutsos diusulkan ke Kemenop UMKM dan PEN sampah dan wisata diusulkan ke komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi di butir satu kami sekarang sudah menunggu revisi RKAKL 2020 ini dan serentak seluruh Indonesia akan bekerja sesuai dengan target.

Di halaman 6 ini yang lebih jelasnya kegiatan yang berikut. Dalam kaitan dengan PEN ini yang sudah disetujui Bapak Pimpinan, yaitu padat karya mangrove dan ketahanan pangan food estate. Kalau di lihat di padat karya mangrove ini Ditjen PDASHL ini yang menjadi Pimpinannya dan di dalam ketahanan pangan food estate ini ada 5 Ditjen terkait. Pertama, penataan kawasan Ditjen PKTL, kedua rehab gambut Ditjen PPKL bersama BRG, pangan agro forestry itu Ditjen PSKL dan Dirjen PHPL dan koridor satwa ini kaitan dengan Ditjen KSDAE. Jadi dengan melihat seperti ini kita ingin di 2021 nanti cara kerjanya di Dapil-Dapil akan focus kepada teman-teman program-program dari Eselon I dan semuanya bekerja dalam satu spasial yang tidak lagi PSKL di sana PPKL disini. Ini contoh bagaimana PEN membuat cara kerja baru kami di KLHK kontribusi kebijakan yang ada dan dorongan teknis di lapangan dengan kekuatan UPT akan mengawal anggaran sebesar Rp406 miliar untuk padat karya mangrove dan Rp406 miliar juga di ketahanan pangan food estate.

Nah, rinciannya teman-teman Eselon I nanti secara teknis kalau ada yang mendalami bisa di sampaikan. Bisa kita lihat di halaman berikutnya Pimpinan, konstruksinya di PEN ini yang sudah disetujui anggarannya Rp800 miliar tadi. Untuk mangrove Ditjen PDASHL masuk program pengendalian daerah.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen 700 atau 800?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

800-an Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak, 700 apa 800 tadikan disini kalau tidak salah tulisannya 700 tetapi 800 dibagi dua toh.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Persetujuannya Rp812 miliar.

KETUA RAPAT:

Itukan dibagi dua kan?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dibagi dua Pak, jadi kami antara usulan dengan yang realisasinya Pak. Jadi di dalam tayangan ini sebelumnya yang halaman sebelumnya, bisa kita lihat padat karya mangrove Rp406.177.500.000,- dan ketahanan pangan food estate Rp406.257.936.000,- ini sesuai surat Menteri Keuangan tanggal 2 September 2020 totalnya itu Rp812.435.436.000,- jadi dua.

KETUA RAPAT:

Nanti saya juga minta penjelasan yang 400 sekian miliar itu yang untuk food estate, karena saya lihat ini potensi tumpang tindih bisa terjadi di Kemenhan ada, di pertanian ada, di kehutanan ada. Kami minta penjelasan secara detail, karena di sini kalau kita lihat dari angka yang disajikan ini untuk yang Kalimantan Tengah itukan 700 ribu hektar lebih eks PLG. Saya tidak yakin ada 700 ribu sekian karena sebagian besar itu sudah diambil untuk kebun sawit illegal. Jadi nanti waktu kita bikin Panja kita harus minta data yang detail agar supaya jangan. Karena kalau katanya Kementerian Pertanian kurang lebih 165 ribu hektar. Mungkin nanti kalau dari Kemenhan Insya Allah beda lagi. Jadi nampaknya data inikan menjadi hal yang sangat susah untuk dijadikan.

Lanjutkan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Akan jadi catatan kami ini terkait nanti dengan Dirjen PKTL Bapak Prof. Sigit yang tentunya dalam pelaksanaannya dalam Rakor-Rakor yang dipimpin oleh Pak Menko itu selalu dilakukan sinergi untuk tetap mengacu kepada lokasi-lokasi yang kita harapkan tidak adanya tumpang tindih. Termasuk juga yang berada di ekosistem gambut, Pak Karliansyah Ditjen PPKL. Makanya di dalam ketahanan pangan ini yang kami katakan tadi paling tidak ada 6 Dirjen. Dan arahan Ibu Menteri kita dalam kaitan dengan subjek dan objek, maaf katanya locus itu penting sehingga kepastian untuk kawasannya yang akan dijadikan *food estate* dan mengintegrasikan dengan kementerian terkait termasuk PUPR dan sebagainya itu kami tetap akan menjadi perhatian Pimpinan nanti bisa di tambahkan oleh Ditjen PKTL.

Jadi di dalam pagu paling tidak pagu yang sudah ada di mangrove khususnya Ditjen PDASHL yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan targetnya dan di harapkan di lakukan di 34

provinsi dengan luas kurang lebih 15 ribu hektar dengan anggaran Rp406.177.500.000,- itu ada di pagunya Ditjen PDASHL.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, saya potong sedikit supaya teman-teman tahu ini yang tadi tidak mendengar. Masyarakat disuruh menanam, menjaga apa benefitnya untuk dia. Mungkin kalau kita tadi sudah ada jawabannya, tapi kan tadi teman-teman pada nggak tahu. Kalau hanya nanam, di rayakan, selesai ya wasalam. Kira-kira ya tadi itu loh, ada UMKM sebanyak 700 ribu kelompok atau orang, itu mungkin bisa di bagikan. Jadi saya menanam, menjaga, tapi saya dapat sesuatu, ini yang paling penting ya. Nanti di jelaskan tolong sekalian.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap, jadi kalau begitu untuk Ditjen PDASHL Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kaitan dengan padat karya mangrove ini tentunya tidak akan lepas dari kebijakan KLHK yang menjadi prioritas pemulihan mangrove. Dan peta-peta areal mangrove yang harus di pulihkan seluruh Indonesia di 34 provinsi ini yang memimpin adalah Ditjen PDASHL. Kemudian masyarakat yang terlibat dalam mendukung kegiatan pemulihan ekosistem mangrove ini dengan melakukan kegiatan penanaman itu kita tidak melepaskan dari kelompok-kelompok tani hutan atau kelompok masyarakat binaannya KLHK. Ketika padat karya yang diharapkan oleh Pemerintah dalam 2-3 bulan ini bukan berarti hanya memberikan pekerjaan sementara tapi yang pasti pendapatan ekonomi masyarakat harus dibantu di seluruh Indonesia sekaligus mendukung program mangrove ini. Dan mangrove ini menjadi kebijakan Kementerian LHK juga karena Tusinya juga ada. Nah, ke depannya bahkan nantinya mereka ini akan khususnya yang berada di dekat mangrove ini akan menjadi binaan KLHK seterusnya dalam peningkatan produktifitas dari mangrove itu termasuk ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan menghasilkan. Jadi tidak lepas dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah dibina, misalnya kelompok dari binaan Ditjen PPI yang kelompok proklam yang sudah ada tanggungjawab dari Dirjen, ada juga komunitas-komunitas lain. Ini mangrove Bapak, kaitan dengan mangrove, karena menanam mangrove berbasis Tapak, berbasis lahan kritis dan melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya di sana tetap kendalinya dari Ditjen PDASHL melalui Balai UPT-nya.

Kemudian kalau untuk food estate ini memang menjadi bagian penting ketika Kementerian LHK ini mendukung di 4 provinsi. Pertama, Kalteng, kedua Sumsel, ketiga Sumut, dan keempat Papua. Ditjen PKTL yang mengawal untuk penataan kawasan dalam kaitan dengan kegiatan itu ada pemulihan rehabilitasi gambut, ini kawasan masih. Nah, kemudian yang didorong juga Ditjen KSDAE koridor satwa dari mempertahankan kawasan hutan yang memang sudah terlihat keberadaan satwa-satwa itu

barulah kita dalam kaitan dengan food estate ini mendorong pangan melalui agro forestry. Jadi kalau mangrove ini tadi di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan menguatkan kelompok-kelompok masyarakat binaan KLHK nanti bisa ditambahkan oleh Dirjen. Juga yang ketahanan pangan ini lebih mengarah kepada program prioritas tidak hanya di Kalteng tadi. Jadi kami akan nanti ditambahkan oleh Dirjen-Dirjen bagaimana menjamin bukan sekedar hanya memberikan uang tapi juga menjadi kegiatan yang terus didampingi oleh kita karena tidak hanya berhenti di 2020 saja tapi juga di 2021 dan seterusnya.

Jadi di halaman berikutnya per Eselon I kami menyampaikan dari anggarannya saja dulu Pimpinan, nanti penekanannya dari Ditjen PDASHL itu bisa di jelaskan karena mangrove ini sudah siap oleh timnya. Untuk lebih jelasnya Pimpinan kalau boleh supaya lebih jelas gambarannya kami undang Ditjen PDASHL bisa, karena ada pertanyaan Pimpinan, kalau boleh. Apa perlu Pimpinan apa tunggu tanya jawab atau sekaligus paparan.

KETUA RAPAT:

Sewaktu tanya jawab, jadi nanti selesai teman-teman Anggota bertanya tolong di jelaskan juga.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kalau begitu Pimpinan, sekaligus nanti Bapak Dirjen, Ibu Dirjen dengan ada tanya jawab merespon sekaligus PEN ini, supaya waktunya bisa lebih efisien.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, boleh interupsi sebentar Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Sekjen, ini kebetulan karena ini Bapak Sekjen ya. Terkait dengan mangrove ini ada pembagian lokasi antara Kementerian Kelautan dan Kementerian LHK. Karena saya mau klarifikasi saja di mana kewenangan LHK, dimana kewenangan KKP begitu dan berapa luas areanya. Itu bukan pendalaman tapi saya minta klarifikasi saja.

KETUA RAPAT:

Oke, nanti di jawabnya sekalian ya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Baik Bapak Ichsan Firdaus, kami catat.

Sebagai informasi saja KKP itu hanya seluas 200 hektar, kalau dari Tusinya mangrove menjadi Tusinya KLHK. Jadi kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil itu dalam kaitan dengan mangrove itu tetap bersinergi, tapi untuk KKP kami sudah kordinasi mereka hanya seluas 200 hektar. Yang bisa kita catat itu dulu Pak, dan tidak akan tumpang tindih dari Tusi. Nanti akan di jelaskan oleh Bapak Dirjen.

Kami lanjutkan Pimpinan, setelah Pemulihan Ekonomi Nasional ini kami masih ada nanti ijin Dirjen PSLB3 ada tambahan anggaran usulan baru 2021 untuk mengalokasikan adanya kongres di internasional tahun depan untuk Minamata. Jadi nanti Ibu Dirjen bisa menjelaskan karena ini menyangkut tambahan usulan. Itu ada di dalam bahan yang sudah dibagikan. Jadi mengakhiri penjelasan kami sekaligus nanti Ibu Dirjen akan memaparkan usulan yang memang belum masuk karena baru ada surat Ibu Menteri kepada Menko Maritim kemarin untuk usulan baru Minamata ini.

Demikian Pimpinan, paparan kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pimpinan, dengan ucapan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sekjen.

Saya berharap di sini Rp77 miliar untuk COP keempat Minamata masalah merkuri belum ada anggarannya. Kalau tidak ada ya di batalkan jangan di paksakan, jangan mau dapat nama tapi duitnya tidak ada.

Terima kasih atas penjelasan yang di sampaikan, selanjutnya kami persialakan kepada Anggota kom IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Yang pertama Ibu Endang, Ibu saya minta pertanyaannya singkat, karena nanti kami jam 14.00 WIB rencana Rapat Dengar Pendapat kembali dengan KKP.

Silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Ketua yang saya hormati dan saya banggakan,
Pak Sekjen dan para Dirjen yang saya banggakan juga,
Dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya sayangi.

Pak Ketua, saya sudah menulis kira-kira 10 halaman. Jadi saya akan bacakan singkat saja, nanti saya serahkan tulisan saya supaya jawaban Pak Sekjen dan Bapak Dirjen kena sasaran. Karena saya yang pertama adalah apresiasi apalagi Ibu Irjen-nya perempuan, semoga Ibu lebih teliti, karena kalau saya lihat anggaran yang terealisasi masih rendah. Nah, ini kan merupakan PR kita bersama karena kebetulan di Dapil-Dapil itu terutama Dapil saya Cianjur dan Kota Bogor, masih banyak yang bisa kita kerjakan tapi tadi karena anggarannya terbatas banyak yang kita tunda.

Kemudian yang kedua adalah bidang PDASHL, pengendalian aliran sungai dan hutan lindung. Ini sangat meresahkan karena di sini anggarannya cukup tinggi tapi tadi banyak sekali yang tidak bisa diaplikasikan dengan baik. Nah, isu-isu yang aktual adalah kesulitan rehabilitasi DAS Ciliwung dan Cisadane. Nanti lengkapnya akan saya ungkapkan disini ada petanya juga, bahwa permasalahannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat memaksakan rehab tersebut, karena lahan-lahannya itu sudah dimiliki oleh warga setempat. Nah, tentu saja harus buttom up jadi harus sosialisasi ke warga supaya warga merasa memiliki dan merasa ikut mengamankan. Tadi sesuai dengan Bapak Ketua, bahwa harus ada insentif juga, jadi insentif untuk warga.

Yang kedua adalah pengembangan jenis tanaman yang HHBK, yaitu Hasil Hutan Bukan Kayu. Di Cianjur saya banyak kali menemukan tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan, di antaranya adalah Makademia, ini bisa kita sebar luaskan. Dan saya lagi-lagi mengharap bisa kerjasama dengan Balai Biogen karena para peneliti kita sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk membuat bibit-bibit yang mudah ditanam dan seragam. Nah, ini kesulitannya karena tidak ada koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK banyak sekali Balai-balai kita yang akhirnya mubazir, padahal saya waktu itu berjuang sangat berat dananya dari rampasan perang Jepang yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi letaknya di Bogor.

Kemudian berikutnya adalah tentang alih fungsi lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan di Cianjur. Nah, ini juga belum lengkap surat-menyuratnya sehingga kami sangat sulit untuk mendeteksi dan memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Padahal kita tahu bersama bahwa beras Cianjur ini sekarang plasmanutfah-nya sudah hilang. Saya usulkan tadi untuk bisa ditanam kembali.

Kemudian yang keempat adalah usulan kawasan ekosistem esensial areal yang bernilai konservasi tinggi di Kabupaten Cianjur. Nah, ini datanya sudah saya lengkapi. Kemudian mohon bisa ditindaklanjuti dan diantisipasi. Nah, yang berikutnya adalah kondisi usulan KEE ABKT Kabupaten Cianjur. Nah, ini saya sudah inventarisasi dengan lengkap dan juga dengan petanya, jadi Bapak tidak ada kesulitan lagi untuk berdalih bahwa datanya tidak lengkap. Demikian Pak Ketua, mudah-mudahan bisa

menjadi kinerja yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat merasa diuntungkan.

Dan yang berikutnya ada satu hal Pak, apakah tidak bisa ya Pak dikemas teknologi-teknologi perumahan, misalnya sangria-sangrai kopi yang murah begitu Pak, karena dengan PPSB ini masyarakat memerlukan pekerjaan. Jadi saya sudah bawa beberapa kemasan dari Cianjur, tapi tadi karena tidak ada teknologi yang bisa dimanfaatkan sehingga alakadarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Johan Hamidah, eh Johan Rosihan sorry, maaf salah Pak.

Silakan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua yang saya hormati serta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen dan seluruh jajaran Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Yang pertama secara umum saya ingin menyoroti bahwa adanya tumpukan anggaran di 2 Dirjen, yaitu di Dirjen PDASHL dan KSDAE yang kalau saya total itu adalah Rp4,2 triliun artinya 52,8% dari keseluruhan Kementerian itu, hanya ada di 2 Dirjen ini padahal kita tahu bahwa Kementerian LHK ini ada ini ada 13 Eselon I, Litbang cuman Rp317 miliar, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan hanya Rp348 miliar. Padahal kalau kita lihat persoalan-persoalan kita seperti ilegal logging, darurat sampah, dan lain sebagainya itu tersebar di beberapa Dirjen penting yang pengalokasian anggarannya kurang. Saya coba memahami apa yang Pak Sekjen sampaikan tadi itu dengan pola kerja baru, tetapi tetap saja itu apa namanya akan memiliki birokrasi yang sangat rumit. Kita membaca sederhana saja dengan penempatan anggaran di 2 Dirjen ini, maka bisa disimpulkan sementara tanpa dijelaskan itu bahwa tidak terjadi keseimbangan anggaran. Sehingga kami menjadi sulit mengerti bagaimana arah apa namanya pembangunan atau pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan itu di Kementerian ini. Mohon penjelasan atas hal itu.

Yang berikutnya dana DAK, tidak digunakan disalurkan DAK bukan merupakan penghematan melainkan kelalaian eksekutif dalam pemberian pelayanan. Penyerapan tahun 2020 hanya sebesar Rp100 miliar dari total lagu mencapai Rp600 miliar. Nah, tahun ini ada Rp700 miliar lagi DAK, tahun kemarin 600 tapi realisasinya Cuma 100. Nah, ini

kira-kira gimana nih Pak Sekjen cara kita mengelola DAK ini agar apa namanya bisa terserap, jangan alasan bahwa kami melakukan penghematan-penghematan. Karenanya menjadi penting Rapat Dengar Pendapat yang diusulkan tadi ini untuk kemudian kita respon agar dalam pengelolaan DAK ini juga bisa berbasis daerah pemilihan yang ada di Komisi IV DPR RI ini Pak Ketua. Kami mengusulkan untuk pendanaan DAK untuk pengembangan sampah terpadu dan terintegrasi pada kelurahan. Juga kami mengusulkan agar DAK ini juga fokus kepada pemantauan kondisi air di hulu di DAS. Karena kita tahu bahwa apa namanya kondisi air kita di hulu ini sudah dari hari ke hari mengalami kondisi yang sangat buruk.

Berikutnya soal pariwisata soal DAK ini Pak, mungkin kita jangan terlalu fokus kepada destinasi-destinasi yang sudah punya nama, sebut saja misalnya 10 destinasi itu walaupun Provinsi NTB itu masuk di situ pada kawasan KEK Mandalika. Saya ingin mengusulkan kepada kementerian agar kita memberikan perhatian juga kepada kelompok-kelompok pariwisata yang berbasis desa, karena justru destinasi merekalah yang sebenarnya ada di hutan. Kalau destinasi-destinasi yang ada pada 10 itu kan masih berbasis pantai, berbasis maritime dan segala macam, tapi yang berbasis hutan dia itu tidak banyak di tahu oleh apa namanya di tingkat nasional tapi oleh orang setempat, oleh orang Kabupaten setempat menjadi destinasi unggulan. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian ini.

Berikutnya soal di Ditjen Planologi dan Penataan Lingkungan itu dengan anggaran 410 saya berharap agar focus kepada capaian target penetapan kawasan hutan dan TORA yang pada 2020 ini sangat lemah. Saya ngambil satu contoh di Dapil saya Pak Sekjen, ada namanya Desa Boak di Kabupaten Sumbawa, Kecamatannya Unter Iwes. Itu sejak zaman merdeka desa itu sudah ada, tetapi sampai hari ini mereka kesulitan untuk mendapatkan program-program dari Pemerintah karena desa itu ternyata setelah saya coba ajak diskusi kepala desanya dan melihat fakta-faktanya masih dalam kawasan desa Pak, statusnya sudah desa masih di dalam kawasan. Saya berharap agar dalam kesempatan pertama misalnya pembagian nanti di tahun di tahun 2020 ini, ini bisa menjadi objek agar mereka memiliki status tanah desa yang jelas, sehingga nanti ketika kita memberikan apa dana desa atau segala macam itu bisa mendapat perkembangan.

Yang berikutnya saya kemarin Pak, bertemu dengan semua KPH yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Hasil diskusinya sudah saya sampaikan kepada Bapak Sekjen dan Ibu Menteri juga. Salah satu aspirasi mereka adalah agar kebijakan penyerahan pembiayaan tenaga bakti rimbawan kepada Pemda dapat ditinjau kembali, karena kemampuan keuangan daerah itu sangat, pertama kemampuan keuangan daerahnya kurang bagus. Yang kedua adalah tenaga mereka itu sangat dibutuhkan untuk dukungan teknis maupun administrasi ya, karena tenaga kehutanan kita kan masih kalau di Sumbawa itu masih 1 banding 2000 hektar.

Berikutnya DAK itu agar di fokuskan kepada fasilitas pengamanan hutan, misalnya untuk mobil dan mereka mengusulkan supaya ada mess di masing-masing KPH Pak, karena rata-rata Kepala KPH itu dia tinggalnya di ibu kota kabupaten, karena mereka tidak punya sekedar tempat tinggal di hutannya yang menjadi tanggung jawab mereka. Karenanya kalau misalnya ada mess di situ itu minimal pengelolaan hutan, manajemen pengawasan hutan, segala macam itu bisa dengan melibatkan masyarakat dengan menghidupkan mess-mess KPH yang ada di hutan di mana mereka ditugaskan.

Itu mungkin yang saya sampaikan Pak Ketua, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Johan.
Selanjutnya Dr. Hermanto, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, Anggota, Sekjen dan para Dirjen-Dirjen yang hadir.

Pertama, saya tentunya menyampaikan apresiasi ya baik raihan WTP maupun program-program yang berbasis masyarakat, yang ini sebenarnya sangat membantu sekali terkait soal bagaimana kita harus memulihkan kehutanan kita dan lingkungan. Saya langsung pada soal kecilnya anggaran terkait dengan soal pengolahan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya ini hanya sebesar 246 sekian miliar. Saya melihat ini angka yang kurang memadai terkait dengan situasi iklim kita, terutama lingkungan kita yang sekarang ini sebenarnya sedang puncak-puncaknya pandemic. Di tahun 2021 itu kita juga belum ada para ahli yang mengatakan bahwa pandemic ini akan berakhir. Nah, di tengah situasi seperti ini saya memandang bahwa sebaiknya angka ini, kan ini masih angka ini masih tentative ya Pak Sekjen. Artinya, kalau angka ini bisa diperbaiki ini adalah kita berupaya untuk mendorong dan mendukung perbaikan lingkungan dan kesehatan lingkungan. Sekarang ini Indonesia ini sudah mencapai angka 200-an lebih yang positif. Nah, ini kenaikanya itu sangat tajam dan di 2021 kita belum tahu lagi apa yang terjadi. Jadi seharusnya anggaran ini harus juga besar. Salah satu yang menunjang untuk perbaikan lingkungan kesehatan secara umum ini ada di Dirjen ini juga. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terkait dengan soal di Sumatera Barat itu, itukan daerahnya ya berbukit, kemudian juga tumbuhan-tumbuhan itu ada sebagian hutan atau bukit itu karena kekurangan air. Nah, ini ada aspirasi dari masyarakat sekitar hutan itu supaya hutan yang ditanamnya itu bisa tumbuh dan bisa bertahan pada musim kering. Itu mereka memohon supaya ada sejenis pompa air, apakah jenisnya itu pompa bor atau intinya mereka ini supaya ada air untuk menyiram pohon-pohon yang ditanam pada musim kering itu. Nah, ini aspirasi dari daerah.

Kemudian yang ketiga, saya juga mencermati terkait dengan di daerah Sumatera Barat ini sering sekali terjadi longsor, seringkali terjadi berbagai macam persoalan kehutanan. Kalau Bapak Sekjen dan Dirjen yang berkaitan itu berjalan di daerah Kota Padang menuju Solok Selatan dan juga ada di daerah-daerah 3 lurah disana itu memang daerah longsor semuanya itu. Dan di situ terjadi banyak sekali galian c dan segala macam tambang disitu, itu berakibat pada semakin masifnya longsor disitu. Nah, ini saya minta supaya disini ada DAK yang berkaitan dengan informasi kualitas air dan merkuri. Ini juga kawasan bukan hanya kawasan tetapi kawasan sepanjang Sungai Batanghari itu adalah kawasan yang tercemar semuanya dari hulu sampai ke hilirnya, karena di situ banyak sekali penampang-penampang emas yang illegal. Saya minta supaya ini harus sebagaimana kawan kami Bapak Johan tadi menyampaikan, DAK ini memang harus riil di lapangan jangan ditarik sampai ke pusat lagi, harus ada realisasinya gitu. Dan juga Bapak Sekjen Kementerian itu bisa juga meminta bantuan kepada Anggota, daerah mana yang harus dialokasikan DAK ini supaya itu efektif, supaya anggaran kita ini terserap lebih besar.

Kemudian terakhir, saya ingin meminta supaya kita harus memperbanyak peran masyarakat perkotaan dan juga masyarakat di kawasan perindustrian itu mereka dibantu dengan alat-alat bagaimana mengumpulkan sampah itu. Apakah itu bentuknya gerobak atau apa, karena masyarakat seperti inilah yang peduli dengan bagaimana mengumpulkan sampah-sampah ini. Dan mereka seperti ini sulit sekali mereka mendapatkan bantuan, padahal kerjanya mereka itu harian mengumpulkan sampah. Saya minta ini supaya program ini karena ini untuk 2021, supaya disediakan gerobak-gerobak kecil selain sekarang inikan sudah ada juga VR, tapi ini yang lebih efektif di masyarakat itu adalah gerobak-gerobak itu.

Demikian Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih Bapak Dr. Hermanto.
Selanjutnya kami persilahkan Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati rekan-rekan, Pimpinan, Anggota Dewan, Eselon I, dan Sekjen.

Saya kira tema utama dari pada penyusunan APBN 2021 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Tentu landasan pijaknya di dalam menyusun anggaran adalah pada landasan pemikiran yang seperti itu. Bagaimana sehingga ekonomi bisa pulih di tengah pandemi dan target pertumbuhan di 2021 itu cukup optimis antara 4,5% sampai dengan 5,5% di saat triwulan kedua dan mungkin juga triwulan ketiga kita 2020 ini berada pada pertumbuhan kontraksi atau minus.

Oleh karena itu, memang berat namun demikian sudah terbagi pagu anggaran di Kementerian LHK hampir Rp8 triliun, 7 koma sekian lebih. Saya kira yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh teman tadi juga distribusi di lingkungan KLHK itu sendiri tidak berimbang antara satu Dirjen dengan Dirjen yang lain, walaupun memang kita harus pahami bahwa ada kapasitas fungsi, tugas pada Dirjen tertentu yang memang memerlukan anggaran yang cukup besar. Tapi sejauh untuk berada pada landasan pikir pemulihan ekonomi dan reformasi sosial saya dapat memahami. Oleh itulah, maka saya melihat bahwa memang untuk 2021 selain yang disajikan oleh dan di paparkan tadi oleh Bapak Sekjen, memang diperlukan tidak lanjut dengan lebih sempit barangkali dengan melalui FGD saya kira saya support. Dan memperhatikan suara-suara dari daerah, dari lembaga-lembaga sosial yang memang berkepentingan untuk kehutanan dan lingkungan hidup.

Selanjutnya adalah saya melihat beberapa paparan disini dari Dirjen, saya support juga mengenai mangrove sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Kita pengalaman dengan menganggarkan penanaman mangrove hampir di setiap daerah dan pengalaman juga dengan kegagalan itu. Oleh karena itu, sependapat jangan mangrovenya saja yang ditanam, tapi wilayah atau masyarakat yang ada di sekitar mangrove itu juga sejahtera. Sehingga dengan demikian ada timbal balik, kalau tumbuh kau punya mangrove ini kau punya insentif, tapi kalau mati kau tidak dapat insentif. Saya kira begitu. Saya juga punya banyak mangrove di Sulawesi Barat.

Yang selanjutnya, di pengelolaan hutan berkelanjutan ini. Di Sini ada pembuatan KBR 1000 unit, saya melihat bahwa ini perlu ditambah jangan hanya 1000 unit. Nah, ini reformasi social dalam pemulihan ekonomi perlu diberikan ada dua yang saya lihat cukup bermanfaat, AKBR ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan, kemudian Bank Pesona. Bank Pesona di Dirjen PSKL, saya lihat anggarannya hanya Rp348 miliar. Barangkali ini juga perlu ditambah dia punya program Bank Pesona, sehingga pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Yang terakhir adalah dalam rangka untuk menyetop pandemi covid-19 ini memang penyebarannya utamanya limbah B3. Kalau limbah B3 ini

menyebrang provinsi apalagi kalau menyebrang pulau ini di dalam perjalannya ini terus tidak dijamin akan bisa menyebarkan kepada lingkungan lain. Oleh karena itu, kita meminta supaya mulai tahun ini provinsi-provinsi yang tidak punya pengolahan limbah B3 itu menjadi prioritas. Hampir seluruh provinsi tetapi provinsi-provinsi yang baru mekar ini yang tidak punya, katakanlah Kalimantan Utara, mungkin juga Gorontalo, Sulawesi Barat ini yang tidak punya. Jadi ini dulu prioritas, pembangunan, pengolahan limbah B3 rumah sakit, supaya limbah B3 rumah sakit ini seperti Sulbar jangan dibawa ke Makassar. Dan itu juga untuk lebih mengamankan limbah-limbah yang lain yang ada di limbah industri dan lain sebagainya.

Saya kira demikian yang penting manfaat anggaran itu diukur Pak Sekjen, output-nya, outcome-nya dan result-nya saya kira kami Komisi IV DPR RI bisa menyetujui.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dan tidak hadir saya punya Anggota Kapoksi karena memang saya tidak suruh hadir, dia berada di acara hari ulang tahun Partai Demokrat hari ini yang ke-19, saya yang berada disini.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Suhardi Duka.

Juga kami ucapkan selamat ulang tahun Demokrat. Kemudian selanjutnya Bapak Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Sekjen, para Eselon I yang saya hormari, Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI.

Bapak Sekjen dan Bapak, Ibu Eselon I, kalau boleh saya lihat struktur anggarannya memang kelihatannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini agak terbebani dengan anggaran yang kecil. Kalau saya boleh perhatikan tadi saya diskusi dengan beberapa teman-teman ada anggaran Rp8 triliun tapi dibagi-bagi kecil-kecil itu, Rp1 miliar, Rp2 miliar, Rp3 miliar, jadi kayaknya ada beban banyak program begitu.

Kalau boleh ini Pak Sekjen, saya hanya usulkan saja ada beberapa program prioritas, tadi sudah ada prioritas nasional 1 sampai 6 begitu. Terus satu misalnya terkait dengan desa wisata, saya hanya meremehkan saja apa namanya hasil Rapat Kerja kita itu terkait dengan perlunya dialokasikan untuk desa wisata dan instalasi pengolahan air limbah komunal misalnya, tadi Pak Suhardi sudah menyampaikan. Jadi bikin saja satu program yang besar misalnya 120 desa wisata misalnya. Lalu kemudian dikepong semua Dirjen begitu untuk membangun 120 desa atau 150 desa saja. Jadi yang lain itu di hilang-hilangkan begitu Pak. Saya usulkan itu satu, karena apa? Ini ada memang di prioritas pertama ada desa wisata sekitar hutan dan desa wisata bahari misalnya. Nah, kenapa nggak di fokuskan saja di desa hutan misalnya.

Sepengetahuan saya di Kementerian lain pun ada program yang sama desa wisata bahari, Dewi Bahari begitu, Kementerian Kelautan saya ambil contoh. Nah, itu tadi saya juga terkait dengan interupsi saya berkaitan dengan tumpang tindih anggaran di Kementerian yang lain di mangrove. Saya boleh baca tadi sekilas saya bandingkan tadi Pak Sekjen mengatakan kewenangan Kementerian Kelautan itu ada 200 hektar, tapi ternyata dianggarkan mereka itu 400. Nah, maksud saya ini saya tidak ingin evaluasi di Kementerian yang lain, tapi di Kementerian Kehutanan saja. Sejauhmana sih pembagian wilayah antara satu kementerian dengan kementerian lain terkait dengan mangrove. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih Pak.

Nah, terkait dengan desa wisata saya usulkan Pak, 150 desa saja jangan 120 tahun ini misalnya. Kalau tahun depan kemudian perlu di DAK-an ya DAK-an saja, tapi tahun ini 150 desa kita kembangkan desa wisata sekitar hutan yang tadi di sampaikan Pak Johan. Artinya kalau kemudian 1 desa wisata kita alokasikan Rp1,5 miliar saja misalnya itu hanya sekitar Rp150 miliar saja misalnya kurang lebih ya. Nah, kalau itu di kembangkan Pak, itu 1 program besar prioritas, kan Ibu Menteri sudah menyampaikan Pak, bahwa kami ingin mengembangkan desa wisata misalnya di sekitar hutan. Dan itu menjadi prioritas nasional pertama tetapi focus Pak, kalau boleh saya usulkan satu.

Yang kedua terkait dengan yang tadi Pak Suhardi juga menyampaikan instalasi pengolahan air limbah Pak. Ibu Menteri, sudah menyampaikan di dalam Rapat Kerja tapi turunan di bawah ini nggak ada Pak, yang ada itu ada lima wilayah sepengetahuan saya tentang instalasi pengolahan air limbah komunal. Saya boleh sebutkan saja ada Purwakarta, ada Lampung misalnya, ada tiga daerah lain saya lupa. Kenapa harus 5 kabupaten kota itu, kenapa nggak misalnya 150 kelurahan atau desa saja, langsung fokus saja Pak, maksud saya itu. Sehingga kemudian ini menjadi satu program besar di sub bidang kehutanan dan sub bidang lingkungan hidup, sehingga fokus karena anggaran-anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup ini saya lihat kasihan juga Pak, Rp2 miliar, Rp3 miliar, Rp1 miliar, kenapa itu nggak dihilangkan lalu kemudian digabungkan menjadi satu. Dan ini seiring dengan visinya Ibu Menteri waktu Rapat Kerja kemarin.

Yang ketiga, kalau boleh saya usulkan terkait dengan Dana Alokasi Khusus. Saya mau bertanya saja apakah memungkinkan enggak ditambahkan menu baru di tahun 2021 terkait dengan DAK, karena kalau memang tidak memungkinkan berarti yang harus dilakukan adalah melakukan prioritas di program nasional yang tadi kita sebutkan ada 2 lokasi terkait dengan IPAL dan desa wisata. Tapi kalau memungkinkan Pak, kenapa kita lakukan restrukturisasi DAK di tahun 2021 ini. Tadi Pak Johan sudah menyampaikan juga perlunya ada Dana Alokasi Khusus. Percuma juga kita usulkan disini tapi secara teknis mekanisme DAK-nya tidak memungkinkan untuk itu. Artinya, coba di upayakan tahun 2021 apakah komunikasi dengan Bappenas atau dengan Kementerian Keuangan memungkinkan tidak untuk perubahan menu atau penambahan menu baru di dalam DAK, sehingga kemudian kami dari teman-teman Komisi IV DPR RI juga bisa mendapatkan informasi dari daerah Pak, apakah kemudian kami bisa mengusulkan lagi tidak penambahan menu baru itu, terutama fokus pada pengelolaan lingkungan dan pengembangan desa wisata itu.

Saya hanya fokus dua itu Pak, karena bagaimana pun Bapak dan Ibu semua, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri pada saat Rapat Kerja kemarin. Apakah kemudian nanti kita selesaikan apa namanya kita diskusi lebih lanjut, tapi menurut saya di dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat ini kita harus mengambil keputusan, bahwa perlu ada realokasi dari yang kecil-kecil ini menjadi satu kegiatan yang cukup memberikan dampak. Kalau satu-satu kecil-kecil dampaknya apa Pak, ambil hutan mangrove misalnya 1,6 yang direhabilitasi hanya 1000 atau 2000 apa namanya hektar misalnya, kan itu tidak ada dampaknya Pak, hanya sepersepuluh saja atau seperduapuluh saja dari apa yang ada. Nah, lebih baik focus Pak, ada konteks-konteks itu. Saya setuju ada 6 prioritas nasional tapi 6 prioritas nasional kemudian dibagi kecil-kecil tidak ada dampaknya Pak, lebih baik ada prioritas nasional ada 6, satu-satu atau dua-dua kemudian kita fokus saja pada satu atau dua program di setiap prioritas nasional. Saya usulkan begitu Pak Sekjen, para Bapak dan Ibu semua Eselon I.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Ichsan saya hanya menjelaskan disini 2020 Lampung itu dapat satu itu bukan karena saya. Itu yang mendapatkan adalah Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang mana limbahnya itu sangat tidak baik. Ini saya jelaskan, bukan saya minta sama Ibu Dirjen, karena selama ini juga saya tidak pernah minta-minta program untuk di tempat saya. Dan hal yang paling penting adalah saya tidak pernah minta lebih Bansos, itu harus clear, bahkan saya dikasih pun saya tidak mau. Yang mendapatkan itu namanya ITERA, ini untuk penjelasan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih Bapak Ichsan.

Selanjutnya Bapak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,
Bapak Sekjen dengan seluruh jajarannya yang saya hormati pula.

Yang pertama, saya ingin menyoroti dari program yang di paparkan yang terkait dengan tema saya juga sangat sependapat mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi social. Yang terakhir, bagaimana kemudian Presiden juga menyatakan pentingnya pemulihan kesehatan yang sekarang jadi prioritas. Hanya ada catatan di saya Pak, terkait dengan halaman 17 Pak Sekjen, yang saya kaitkan juga dengan pernyataan dari Menteri Bappenas bahwa karena pandemic covid kemudian pembangunan ibu kota calon ibu kota negara di hentikan. Ini kalau tidak salah ini sudah ada di media ditunda di media kalau tidak salah kemarin di sampaikan. Cuman saya lihat di program halaman 17 itu masih ada pengembangan kawasan perkantoran yang ujungnya juga untuk mensupport calon kalau jadi ibu kota, sementara anggarannya juga cukup besar Rp26,8 miliar. Kaitannya apa? Kan ini kalau kaitannya tadi terkait dengan bagaimana kemudian kita mempercepat pemulihan ekonomi rasanya sangat jauh di saat kemudian juga kita musim pandemic untuk recovery kita pemulihan kesehatan juga belum.

Dan saya ingin menyampaikan dari forum ini, dari ruang yang terhormat ini kepada Kementerian Bappenas yang sudah menyatakan kepada publik jangan sampai kemudian ini menina bobokan kepada rakyat saja. Di sampaikan ini saya hentikan karena proses covid data dilapangan, fakta yang kita lihat di program-program salah satu yang saya lihat dari ini adalah di Kementerian Lingkungan Hidup KLHK muncul program seperti ini dan nilainya cukup besar bagi kita 26,8 miliar. Sehingga Bapak Ketua, saran saya apakah ini tidak sebaiknya direalokasi saja untuk kemudian program yang kaitannya dengan pemberdayaan atau pemulihan ekonomi. Itu yang paling penting catatan saya.

Yang terakhir sedikit saja ini hanya masalah ingin minta penjelasan secara teknis saja Bapak Sekjen, terkait bagaimana pengumpulan PNB

dari sektor-sektor itu, sektor yang ada di KLHK. Misalnya begini, di saya ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, itu akan menjadi bagian dari pendapatan negara bukan pajak. Saya ingin mendapatkan teknis itu apakah di target atau bagaimana, nanti kita akan saya ingin mendapatkan sinkronisasi terkait dengan temuan-temuan saya di lapangan, begitu Bapak Sekjen.

Terima kasih Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Bapak Slamet.

Selanjutnya senior Bapak Mindo Sianipar, kami persilakan.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Terima kasih saudara Pimpinan.

Tidak banyak hal mau di sampaikan yang pertama saya tidak baca apa yang di katakan Slamet tadi itu, saya dukung. Tidak perlu di anggarkan terkait dengan pengembangan ibu kota baru, setuju saya yang ke lain saja. Karena Menteri Bappenas mengatakan sudah hentikan, jangan di tempat lain jadi ada juga, koordinasi tidak ada ini. Seperti seolah-olah Menteri Koordinatornya tidak bekerja. Itu catatan saya kira Bapak Ketua, Bapak Pimpinan saya dukung itu.

Yang kedua, Pak Sekjen ini soal *food estate* ini saya ini hati-hati sekali ini. Saya pernah panggil kesini teman-teman Gerindra, teman-teman saya bilang harus di dampingin itu Bapak Prabowo itu sebagai Kemenhan, tiba-tiba gagal nanti. Nah, kenapa saya bicarakan disini di kehutanan dan lingkungan hidup, karena tanah-tanah itu yang pernah di bebaskan itu pada periode Presiden-Presiden yang lalu berapa persen di Kalimantan Tengah wabilkhusus di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas yang di rencanakan untuk *food estate* itu berapa persen itu yang gambut dan berapa persen tanah mineral. Kalau di gambut kayaknya kita belum ketemu padi yang cocok, gambut dan rawa-rawa kan beda lagi, pengalaman kita mungkin ada pasang surut rawa-rawa di Sumatera Selatan, tapi untuk di sana kan tidak itu. Nah, saya ingin tahu data itu supaya dengan data ini kami bisa berkomunikasi lebih baik dengan Kementerian Pertanian, apa yang harus mereka kerjakan di mana percontohan harus dilakukan.

Nah, terkait dengan itu pernahkah di lakukan audit lingkungan, satu terhadap PT Perhutani, terhadap PT Inhutani, saya tidak katakana swasta yang lain khusus yang Perum ini, Perhutani sama Inhutani. Dari lahan yang

diberikan kepada mereka dikuasai masih berapa persen yang kosong itu. Mungkin kalau tanam padi di sana cocok biaya lebih murah, lebih baik dapatkan jadi food estate.

Dan yang terakhir, audit lingkungan. Kalau tadi di sampaikan bagaimana di hulu itu menjaga aliran sungai, secara khusus saya kira di audit lingkungan terhadap industri Ibu Dirjen. Khususnya industri yang berbasis kehutanan, industri kertas, industri selulus. Adakah periode-periode tertentu audit lingkungannya, audit terhadap sumber baku yang dia pakai sesuai tidak itu antara HTI yang dia berikan untuk tanam itu dengan outputnya. Sekali-kali saya kira Bapak Ketua Komisi, kita undang Dirjen ini khusus Rapat Dengar Pendapat dengan menyertakan perusahaan seperti itu. Indah Kiat, RAPP, perlu dilihat itu diaudit lingkungannya. Jadi auditnya itu termasuk terhadap massa yang dia pakai, biomas yang dia pakai. Akan ketahuan nanti nyolong apa tidak dia ini, baru audit terhadap buangnya, limbahnya. Bagaimana periodenya, periodesasinya itu, siapa yang dia pakai untuk itu.

Dan yang terakhir sekali kalau punya data tolong diberikan dulu kepada kita, ada berapa banyak Pemerintah Daerah ini yang dari dirinya bertanggungjawab terhadap lingkungan. Tadi sayang sudah pulang Bapak Dr. Hermanto itu soal tanah itu namanya itu galian c, loh yang keluaran galian c itu kan Pemda, lah kok ya harus anggarannya keluar dari KLHK untuk mengatasinya, itu unfair. Jadi keluaran data itu biar nanti kita di DPR RI ini saling mencerahkan supaya tidak keluar seperti itu.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih senior kita Bapak Mindo.

Kemudian selanjutnya kami persilakan Bapak Abdullah Tuastikal.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi IV, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya focus saja dan singkat saja, karena pada Rapat Dengar Pendapat yang lalu saya pernah usulkan soal KBR (Kebun Benih Rakyat). Sebenarnya KBR ini sangat cukup bagus apalagi kondisi pandemic seperti ini, semakin banyak semakin bagus karena salah satu adalah pemberdayaan masyarakat juga memberikan nilai tambah juga lahan-lahan kering, lahan-lahan gersang itu bisa di manfaatkan. Namun, saya pernah usulkan bahwa Bapak Dirjen Pengendalian DAS, saya kira ini coba dievaluasi dan kalau dapat direvisi soal anggaran. Saya pernah katakan

bahwa 20 ribu batang ditanam untuk 25 hektar, sebenarnya tanaman apa ya, cuman di Maluku saja saya coba di Maluku, coba buktikan buat tanaman apa yang bisa ditanam 20 ribu batang untuk 25 hektar.

Yang kedua, apakah masyarakat mampu, apakah masyarakat juga memiliki lahan. 20 ribu kalau mau cari anakan pala saja itu 1 buah itu sudah di atas 1000. Kalau mau jati itu 1 stoom itu juga berapa banyak, kalau mau cari tanaman yang lain tanamannya itu dari mana. Hal seperti ini yang saya harapkan agar direvisi agak memberikan kemudahan dan benar-benar untuk membantu masyarakat bukan memberikan kesulitan dan kesusahan untuk masyarakat. Saya yakin, saya belum tahu daerah lain, mungkin daerah lain juga kalau kita coba mempelajari jawabannya sama. Saya kira di Maluku itu pasti tidak ada yang nanam. Itukan kemarin masuk juga program aspirasi saya, saya tidak mau ambil, kenapa saya mau ngambil saya tidak mau terlibat kalau dia terjadi apa-apa. Sekali lagi saya harap untuk Bapak Dirjen dievaluasi kalau dapat direvisi, kalau tidak bukan kita, bukan rakyat saja, Anggota Dewan juga bisa kena. Jadi saya kira ini saja yang harapan saya dan kalau ini tetap di Maluku maka saya tetap tidak ikut serta, karena jelas Bapak Pimpinan saya kira ini jelas mari kita berpikir sehat bukan kita mau membantu masyarakat tapi menyusahkan masyarakat. Saya yakin ini belum ada pemeriksaan Pak, kalau ada pemeriksaan saya kira di Maluku ini mungkin semua sudah kena.

Saya kira ini kalau untuk hutan mangrove mungkin bisa, tapi juga harus ada pengawasan jangan kita biarkan tidak ada pengawasan, tidak ada evaluasi. Lalu yang satu lagi soal bibit produktif, saya kira ini sangat cukup bagus tapi harus ada manusia harus awasi, jangan cuman dari balainya diberikan dan dibiarkan, rakyat terima mau tanam atau tidak. Lalu kedua, soal sertifikasi. Masyarakat jangan diberikan kalau soal sertifikatnya tidak memiliki, kita butuh tanaman yang juga berkualitas. Mungkin saya akan kembali yang tadi untuk KBR itu kalau bisa manfaatnya. Tanaman yang bermanfaat supaya masyarakat bisa merasakan sewaktu-waktu, tapi kalau di tanam tidak ada manfaat dia bisa tanam, dia juga tidak bisa tanam buahnya dia dapat dan kita jangan nyalahin mereka.

Itu saja Bapak Dirjen, saya kira ini harus dievaluasi dan direvisi kalau tidak saya sarankan di Maluku tidak perlu ada. Mungkin daerah lain juga bisa Pak, coba kita coba yang 20 ribu anak cuman 50 juta. Kita harus bawa di lahan sebanyak 25 hektar, jaraknya cuman mobilnya angkat, manusianya berapa yang kerja, itu harus diinikan berapa orang sih yang kerja. Dan kalau berapa orang yang kerja setiap hari berapa Rupiah dan mereka mampu mendapatkan 20 ribu batang dan menanam sebanyak 20 ribu batang di 25 hektar hidup atau tidak, saya kira tidak hidup.

Saya kira untuk sementara demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Abdullah Tuasikal.

Kemudian kita lanjutkan ke Ibu Alien Mus, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Dan tentunya Bapak Sekjen, Ibu Irjen, beserta jajaran Eselon I yang saya hormati.

Tadi saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, saya pun kalau mau dipaparkan per halaman ini banyak Pak. Tapi saya sudah ini semua, tapi saya ingin menyampaikan kembali bahwa program dan sasaran project untuk tahun 2021 ini menurut saya kita butuh sasaran project dari KLHK untuk betul-betul benar-benar prioritasnya apa. Kita juga dalam keadaan covid-19 seperti yang saya sampaikan kemarin dalam Rapat Kerja, kita belum menentukan batas dari covid-19 ini satu tahun atau dua tahun tapi setidaknya kita harus mempersiapkan postur anggaran dari setiap kementerian untuk 2 tahun. Kita sudah berjalan 1 tahun 2020 dan juga 2021. Tentunya dalam prioritas penganggaran yang kita fokuskan saat ini selain dengan mangrove yang sudah disampaikan tadi dalam yang disampaikan juga Bapak Ichsan tentang desa wisata terus juga ada komunal terus juga ada DAK Pak. Memang DAK ini saya melihat bahwa target dan sasaran DAK ini dalam penyerapan penggunaan anggaran yang ada di daerah ini kadang memang terlambat dan tidak terlaksanakan. Apakah kita tidak bisa mengalihkan penganggaran tersebut dengan kebutuhan yang ada dengan basis daerah dan prioritas anggaran per provinsi atau per kabupaten kota atau per kecamatan.

Kita juga melihat bahwa dalam penganggaran ini Pak, KLHK sungguh sangat harus memperhatikan bagaimana dengan penanganan limbah B3, khususnya covid-19 yang kita sudah melihat bahwa per September 2020 banyak sekali yang terkontaminasi dengan covid-19 dan juga limbahnya itu harus betul-betul kita atensi bersama, baik di daerah-daerah terpencil seperti yang disampaikan oleh Bapak Suhardi Duka tadi. Kemudian saya penekanannya bahwa ada beberapa provinsi yang merupakan daerah-daerah penambangan atau pertambangan. Itu juga memang ada masalah tentang penangan limbah. Saya ingin sekali menekankan bahwa KLHK selain dari apa yang menjadi prioritas penganggaran tahun 2020-2021 kita melihat bahwa ekosistem kita juga harus kita jaga bersama. Dimana ekosistem itu adalah saling tumpang tindih kebutuhan antara yang hidup dan juga yang mati atau memang bergantung dengan keadaan lingkungan dan hutan setempat. Maka dari itu Pak Sekjen, saya harap mungkin di KLHK ini kita seperti di Mentan dan

juga di KKP kita meminta prioritasnya apa di tahun 2021 ini. Jangan sampai penyebaran penganggaran berdasarkan project atau juga penyebaran penganggarnya di kecil-kecilkan hanya untuk satu kegiatan untuk semua eselon atau Eselon I dan II tapi target dan pencapaiannya tidak tersampaikan.

Mungkin itu saja bahwa saya berharap kita nanti kedepannya ini dalam mengambil keputusan bersama Komisi IV DPR RI ada yang disampaikan oleh beberapa teman-teman dan apa yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI itu tolong ditindaklanjuti. Dan mohon Bapak Pimpinan, apa yang kita sampaikan ini masuk dalam salah satu keputusan Komisi IV DPR RI, agar kita di tahun 2021 ini benar-benar melihat prioritas program penganggaran dari KLHK itu benar-benar tepat sasaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Nanti dimasukkan dalam kesimpulan rapat saja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Siap, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Ibu Alien Mus.

Terakhir kita minta Ibu Riezky Aprilia kami persilakan dengan segala hormat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati.

Pertama saya sudah tadi disampaikan oleh Bapak Ichsan tadi, saya kebetulan memegang Lapsing rapat terakhir. Jadi memang disitu ada di point 11 mengenai IPAL dan DAK tadi tolong menjadi atensi apakah tindaklanjutnya seperti apa, karena ini ada di Lapsing point 11. Nah, kemudian halaman 20 terkait dengan PN6 masalah Karhutla kalau tidak salah ya Pak. Pada dasarnya di alokasi anggaran Bapak juga kan saya melihat strukturnya kurang lebih untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lain-lain ini yang dianggap bencana ini, ini sekedar auto critic

maksudnya buat kita semua yang lewat udara ini Pak, maaf mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat ini agak sulit dipertanggungjawabkan. Terkadang sudah dilakukan berkali-kali pun itu masih terjadi. Dan anggarannya kan di banding darat itu agak lebih besar yang udara. Dan juga ada pemberdayaan masyarakatnya, jadi kok kayaknya dalam tafsir saya karena terkadang yang bakar masyarakat juga gitu loh. Nah, jadi saran saya kalau boleh yang struktur untuk udara itu agak sedikit pangkas untuk ke masyarakat saja supaya ya tadi kalau tadi teman-teman mangrove saya berbicara konteksnya Karhutla. Karena kemarin saya juga sempat mengobservasi di Kementerian Pertanian juga ada penanggulangan ini dan anggarannya juga ada. Jadi jangan sampai tidak maksimal kerja Bapak dan Ibu disini toh pada dasarnya kita mencoba mensupport apa yang dilakukan KLHK.

Kemudian masalah food estate, salah satunya adalah daerah saya juga Sumatera Selatan, saya putera daerah Sumatera Selatan, putrilah tapi ya putra sajalah putra daerah Sumatera Selatan. Jadi begini Pak, saya sih berharap kita mendukung pada dasarnya apa yang diharapkan Pemerintah adalah memperkuat cadangan, betul tetapi direalistislah kalau memang di Sumsel itu kan sebenarnya ada wilayah-wilayah yang sudah dianggap dan bahkan terpublish kayak Banyuasin untuk cadangan pangan dan lain-lain itu sebenarnya tidak ada masalah. Terus kenapa harus melakukan *food estate*, saya mencoba bertanya-tanya kenapa gitu loh, karena gambut kami pun harus dilestarikan, kan begitu. Kalau *food estate* ini ternyata dibangunnya di atas rawa-rawa, ya berarti alih fungsinya juga harus clear kan kayak begitu. Mungkin Bapak Sigit lebih pahlamlah karena saya juga baca Bapak memberikan statement terkait Sumatera Selatan. Jadi saya mohon clearance itu saja Pak.

Nah, terus terakhir ini saya tidak mau menyoroti pertambangannya bukan Pak. Tapi kemarin saya Reses dari Musi Banyu Asin ini bicara wilayah pertambangan rakyat. Saya lewat Musi Banyu Asin itu Bapak Dirjen Gakkum, saya bukan menyoroti ilegalnya akan tetapi efek yang dihasilkan oleh banyaknya ilegal tambang disitu, penyulingannya kalau tidak salah di Muba itu Pak. Itu rusak semua, saya mohon dengan segala rasa hormat Pak, ini toh buat masyarakat kita sendiri tapi saya memang paham kondisinya hari ini everything is about the money, yang penting mereka bisa makan kayak begitu, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana perbaikan ke depan. Tadi Bapak Hermanto sudah disampaikan oleh Bapak Mindo juga tadi senior saya bahwa daripada yang dibebankan sama Pemerintah Pusat masalah galian c dan lain-lain sedangkan itu tanggungjawab Pemerintah local lebih baik ya seperti itu yang kita fokuskan juga, menurut saya ya ini sekedar saran. Nah, jadi kami di Komisi IV DPR RI juga berharap program di KLHK ini bisa focus. Itu seperti yang waktu minggu lalu Bapak Sekjen sempat sesi keduanya sudah tidak, Ibu Menteri saya juga menanyakan hal yang sama. Fokusnya KLHK dalam PEN ataupun juga hari ini dengan penanganan covid itu di mana. Saya sepakat Pak, program padat karya mangrove gitu loh, karena hari ini selalu saya sampaikan yang sehat kita jaga yang sakit kita rawat.

Demikian saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya tadi Pimpinan yang disini Bapak TA. Khalid silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ketua yang saya muliakan,
Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI serta Kementerian.

Saya sedikit saja ingin khususnya ini menyangkut IPAL. Kita banyak memang provinsi dan daerah yang belum ada IPAL yang memadai sehingga timbul masalah, tapi anehnya di Banda Aceh saya langsung saja di Banda Aceh itu sudah ada IPAL tapi bermasalah karena dibangun dalam situs sejarah dan setiap hari itu ada protes. Saya beberapa kali sudah menyampaikan dan sudah saya sampaikan juga kepada walikotanya tetapi masih terus di sana ada satu kampung namanya Kampung Pande disitu situs para ulama, tetapi disitu tempat buang sampah dan tinja. Tapi saya pikir kita disini saya berharap ada kesempatan ini kepada KLHK, saya minta secara khusus ini kita turun sekali biar kita konkrit menyelesaikan masalah. Jadi kita minta ini melalui Bapak Sekjen, berikan ruang dan waktu kita turun kesana mewakili kita saya juga akan hadir, kita akan selesaikan konkrit di lapangan ketimbang demo-demo yang tidak berujung selesainya kapan.

Terima kasih hanya itu permintaan saya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Anggota yang hadir sudah semua, selanjutnya yang saya hormati Pimpinan Bapak Budi yang katanya mau datang tapi sampai sekarang belum tiba.

Silakan yang virtual Bapak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Selamat siang.

Apakah bisa dengar?

KETUA RAPAT:

Jelas.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Para Anggota yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan juga para Eselon I KLHK.

Langsung saja ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama terkait tadi sebenarnya sudah disampaikan masalah pembangunan ibukota baru, beberapa hari lalu kami mengikuti dari beberapa media berita bahwa pembangunan IKN itu akan ditunda. Kebetulan ini ada daerah pemilihan saya, tentunya saya mempunyai kepentingan juga. Tapi saya ingin koordinasi yang baik antara Kementerian, kalau memang keputusannya adalah untuk ditunda karena beberapa hal yang mungkin lebih mendesak sekarang, seperti juga tadi kata Pak Slamet dari PKS yang mendukung kalau ada realokasi anggaran tersebut ke program-program pemberdayaan masyarakat yang mungkin lebih mendesak pada saat ini. Tentunya saya menyoroti beberapa program penting salah satunya adalah rehabilitasi hutan dan area-area yang ada di sekitar ibukota baru yang maraknya aktivitas pertambangan maupun perkebunan yang mengakibatkan degradasi lahan yang begitu besar di Kalimantan Timur dan dampak terhadap lingkungan itu begitu luas, sehingga perlu perhatian khusus.

Untuk itu saya juga menyoroti kepada Dirjen PDASHL juga yang menjadi salah satu ujung tombak dalam rehabilitasi fungsi kawasan hutan terutama di daerah-daerah aliran sungai yang ada di Kalimantan Timur, apakah itu dari Mahakam Berau dan juga yang selama ini banyak mengakibatkan juga bencana-bencana seperti banjir dan lain sebagainya. Saya harapkan para Dirjen khususnya PDASHL ini bisa benar-benar memperhatikan rehabilitasi DAS ini bukan cuman di Kaltim tapi di seluruh nusantara yang banyak sekali terdampak akibat aktivitas-aktivitas ekonomi yang sedang berjalan.

Dalam hal ini saya juga ingin menyoroti permasalahan bukaan-bukaan akibat aktivitas pertambangan yang kerap terjadi di Kaltim juga tapi saya yakin banyak juga terjadi di provinsi-provinsi lain. Dan beberapa waktu lalu seiring dengan berawalnya masa sidang kami mengundang Dirjen Planologi untuk nantinya kita memetakan gimana caranya kita membersihkan, kita membereskan alih-alih fungsi lahan dan juga permasalahan pinjam pakai yang belum jelas yang mengakibatkan degradasi hutan dan juga lingkungan hidup yang begitu besar. Kami berharap mungkin Bapak Sekjen bisa berkoordinasi juga dengan

Kementerian lainnya untuk menyajikan data area peta, peta lahan yang sekarang terbuka akibat aktivitas tambang di seluruh nusantara yang mungkin bisa dikombinasikan dengan Kementerian ESDM supaya kita bisa sama-sama lihat yang masih beroperasi di mana saja, yang sudah ditinggalkan akibat aktivitas tambang itu di mana saja, supaya kita bisa sama-sama merencanakan solusi yang komprehensif agar kita bisa rehabilitasi area ini, supaya lingkungan hidup kita ke depan terjaga.

Saya kira ini adalah beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Saya juga tadi menyoroti apa yang disampaikan Pak Johan kalau tidak salah beratnya anggaran di 2 Ditjen yang ada, 1 di PDASHL dan di KSDAE untuk tahun 2021. Dan saya ingatkan Ditjen PDASHL sampai sekarang penyerapan anggaran masih cukup rendah, kalau tidak salah 40% dengan ini kami akan bertanya lagi apakah nanti sampai akhir 2020 anggarannya akan terserap. Kalau ini tidak ini menjadi catatan sehingga tahun depan kalau ini tidak bisa dengan anggaran yang begitu besar apakah tidak lebih baik kita bagikan ke Ditjen-Ditjen yang lainnya. Mungkin di tahun 2021 akibat dampak dari covid-19 apakah tidak sebaiknya kita memperhatikan misalnya di Ditjen PSLB3 yang sekarang sangat di perlukan program-programnya mengingat begitu banyak sampah medis yang dihasilkan dari lingkungan kita sendiri.

Saya kira Pimpinan ini ada beberapa catata dari saya, saya harap nantinya khusus permasalahan tutupan lahan ada solusi yang jelas, karena ini akan menjadi PR bersama kita Komisi IV DPR RI dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terima kasih, saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ketua yang saya hormati.
Selanjutnya Bapak Sutrisno terakhir.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Para Anggota, Bapak Sekjen beserta Eselon I.

Langsung saja pada persoalan, apa yang saya akan sampaikan mendasarnya pada program nasional pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Yang pertama Dirjen PSLB3, tahun 2020 ada program produksi sampah. Program ini sangat baik menyentuh pada kehidupan rakyat lapis bawah, mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya tidak berharap yang dituntasnya semu Pak Sekjen, kebanyakan program-program dari pusat tuntasnya semu. Tuntas (tuntunan dari atas) jadi di bawahnya tidak sampai kepada rakyat.

Pertanyaan saya adalah program ini bentuknya seperti apa, kemudian kriterianya sebagai yang akan kita sentuh itu berapa, untuk supaya program benar-benar dijalankan akan lebih baik manakala juga per Anggota Dewan ini juga ikut mengawal program.

Kemudian tetap di Dirjen PSLB3, ada program pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari fasilitas yang case empat unit Rp53,8 miliar atau rata-rata ini Rp13 miliar lebih 1 unitnya. Pak Sekjen, pengalaman saya di daerah Pemerintah Daerah itu sangat bersemangat untuk bisa membangun fasilitas ini, karena ini adalah sumber PAD. Yang menjadi persoalan adalah sulitnya mendapatkan perizinan. Saya kira anggaran ini akan lebih baik untuk dialihkan yang sangat mendesak, yang sangat mendesak kepada persoalan sampah sebagaimana tadi disampaikan Pak Wakil Pak Budi bertumpuknya sampah di pembuangan sampah, kemudian juga sampah pelayanan kesehatan pun begitu juga. Saya kira program di PSLB3 perlu ditingkatkan termasuk juga cator disinfektan itu sangat penting untuk bagaimana mencegah terjadinya penyebaran virus apa namanya limbah virus corona.

Kemudian berikutnya itu terkait masalah kelompok usaha perhutanan social. Itu akan ditingkatkan menjadi class gold atau platinum menjadi UMKM, anggarannya 75 class programnya Rp16,5 miliar ini pun juga sangat baik, sangat baik program ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kriterianya jangan kemudian di lapangan asal-asalan karena kondisi pemerintah sekarang ekonomi semakin terpuruk, rakyat menanam sayur mayur tidak bisa terjual. Dengan program ini, ini akan mendorong rakyat untuk semangat kembali dalam menjalankan ekonomi di lapis bawah di desa.

Kemudian Pak Sekjen bahwa dari sisi anggaran, kelompok usaha perhutanan sosial dengan Rp16,5 miliar sarana prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan 1.277 Pokmas Rp77 miliar. Persoalannya adalah biaya pendamping perhutanan sosial ada 1.500 orang dengan anggaran Rp39,6 miliar. Artinya apa? tidak ada keseimbangan beban tugas yang dibebankan pada pendamping dengan anggaran Rp39,6 miliar. Kemudian diurus 1.200 apa namanya Pokmas dengan Rp77 miliar. Usul saya adalah Untuk digeser anggaran ini kepada Bank Pesona, karena Bank Pesona 2 manfaat yang hutan dilestarikan, ekonomi rakyat pun juga ditumbuhkan.

Kemudian tadi yang menjadi sorotan kita Ditjen PDASHL itu ada anggaran Rp1,565 triliun untuk rehab hutan dan lahan kritis untuk tanamannya 56.000 hektar. Kemudian pemeliharaan 206 ribu hektar tapi KBR-nya hanya 1000 unit. Saya kira program KBR ini penting untuk ditingkatkan dan tidak hanya Rp50 miliar karena di dalam program bibit produktif itu 2,5 juta bibit anggarannya Rp50 miliar. Artinya apa? itu satu pohon juga Rp20.000 sedangkan di program apakah namanya kebun bibit rakyat itu hanya Rp50.000 untuk 20.000 bibit tidak ditanam di 25 hektar dengan disesuaikan dengan tentunya dengan anggaran.

Kemudian Pak Sekjen, saya pernah menulis surat itu aspirasi dari rakyat di Subang sana. Suratnya tanggal 2 April 2020 yang sudah direkomendasikan oleh Bupati Subang permohonan ijin PHPS dan itu di tanah perhutanan dari tanah timbul akibat pendangkalan laut yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan udang paname, sampai hari ini belum ada jawaban dari Pak Sekjen. Mohon untuk segera ditindaklanjuti, saya harus memberikan jawaban, memberikan penjelasan kepada rakyat di Dapil saya.

Kemudian yang terakhir Pak Sekjen, pabrik gula RNI di Subang, kemudian ijin hak guna usahanya sudah habis, tapi oleh RNI itu akan dialihkan ke industry. Pertanyaan saya apakah hak guna usahanya sudah habis punya kewenangan untuk mengalihkan, menjual lahan itu kepada apa namanya pihak lain atau kepada industry.

Saya kira itu Bapak Ketua, pertanyaan saya mudah-mudahan bermanfaat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sutrisno.

Saudara Sekjen beserta Eselon I lainnya, tadi sudah banyak pertanyaan. Ini juga ada satu permasalahan yang belum selesai, RNI itu ada minjam, minjam tanah milik Perhutani. Katanya mau tukar menukar tetapi sampai hari ini tidak ada dan saya minta tindak lanjutnya. Kalau perlu RNI dituntut ke pengadilan menuntut kalian karena sekarang ini kita lihat RNI kan bukan menangani pabrik gula tapi menangani adalah APD. Jadi kalau beli APD sama RNI hari ini 3000, besok kalau beli banyak jadi 4000. Begitu ada yang beli banyak lagi jadi 4500 dan itu saya mengalami langsung.

Saya juga menyoroti yang pertama adalah perihal potensi area *food estate* di Papua. Saya masih ingat 2010-2011 ada yang namanya MIFE (*Merauke Integrated Food Estate and Energy*) akhirnya wassalam, tidak ada tindak lanjutnya. Terus yang seperti saya katakan tadi kalau ada satu juta hektar di Papua transportasinya kemana, hasilnya ke mana, apa mau langsung di ekspor. Pasar terbesar itu adalah Pulau Jawa, maka ini juga LHK jangan latah juga, berikan masukan kepada Presiden, "ini loh Pak". Dan saya juga bingung setiap Menko, baik Menko Maritim, Menko Perekonomian kalau ngomong apa pasti dibilang siap Pak, siap Pak. Berikan argument dong "Pak, ini masalahnya begini-begini", ini untuk *food estate* ini Papua tidak mungkin jalan. Itu yang pertama.

Kemudian yang Kalimantan Tengah yang saya katakan tadi 770.000 hektar ayo kita ulang, kita hitung, tinggal sedikit kok nggak sampai 100.000, hitungnya dari mana apa photo pakai satelit atau jangan seperti jaman dulu, jaman Menterinya Bapak Zulkifli Hasan, "ayo kita tanam 1 juta

pohon”, kalau elo tidak percaya elo hitung sendiri sana, kan gitu. Kemudian ini yang paling penting Bapak Mindo, saya masukan Pak Mindo selaku senior. Akan dibangun untuk *food estate* di Kabupaten Humbang Hasunduta Sumatera Utara. Kenapa beliau mengatakan wasallam, mohon maaf kalau saya mendukung saya sangat mendukung, karena bupatinya kader PDIP Perjuangan. Tetapi kita realita, tanaman bawang putih kemudian kentang itu minimal 1000 dari permukaan laut, pasti perbukitan dipaksakan bangun bawang putih apa yang akan terjadi? Longsor. Contohnya sekarang di Dieng, petani kentang ini sudah 2-3 tahun tinggalin, buka lagi lebih tinggi lagi, akibatnya longsor. Ini mungkin enggak coba, mungkin enggak cobalah. Bupati-nya sudah ketemu saya 5 kali, saya bilang “Pak Bupati you pikirkan jangan karena bawang putih sedikit, warga kamu itu kena longsor”. Sudah otomatislah pasti longsor. Bawang putih kan akarnya seberapa, kentang akarnya seberapa. Maka saya bilang sama Bupati Tanggamus “kasih tahu kalau ada investor yang punya kewajiban nanam bawang putih importir jangan dikasih”, kenapa? ya tadi itu akibatnya tanaman keras digusur untuk tanam bawang putih, begitu hujan longsor. Yang disalahkan siapa? itu Kementerian Kehutanan yang salah, karena tidak ngurus hutannya padahal kabupaten tersebut yang salah. Coba bayangkan kalau 30.000 hektar dibabat, tanaman kerasnya dibabat, ditanam bawang merah, kentang, bawang putih, apa jadinya. Tolong ini kalau perlu nanti kita kesepakatan teman-teman kita buat bahwa kita belum menyetujui untuk kawasan ini. Kenapa? Karena saya tidak mau ada bencana.

Kemudian lagi perihal Dirjen Pengelolaan Sampah. Disini saya lihat ada bantuan, ada DAK ya DAK untuk pengadaan mobil sampah, truk sampah, betul kan coba lihat ada nggak, halaman berapa coba bantuan DAK truk sampah, kemudian kontainer sampah, coba halaman berapa? alat angkut sampah dan truk, kemudian kontainer sampah. Ibu Vivin pernah tidak melihat mobil sampah di daerah itu yang bagus? ya sudah ngapain dikasih lagi, karena apa? dikasih ya lumayanlah ngapain ngurusin, kalau sudah rusak gua jogrokin bukan uang gua, uang dari APBN, cobalah lihat. Jadi hal-hal yang begini kita harus evaluasi, kecuali Pemerintah Daerahnya bertanggung jawab pengurus dari a sampai z. Misalnya kontainer sampahnya keropos, tanggung jawab nggak ada, cobalah lihat. Coba lihat hampir di semua wilayah, begitu kontainernya rusak digeletekin, begitu mobilnya rusak digeletekin, gampang kok tinggal minta lagi kok, apalagi ini uang APBN bukan uang gua, tidak ada itu, tidak ada yang mau tanggungjawab. Kecuali kalau ada perjanjian dengan kami APBN, apabila rusak anda tidak bertanggung jawab anda denda, itu saya setuju. Karena apa? ini uang negara Bu, harus kita selamatkan, harus kita jaga.

Ada lagi hal yang sangat mengerikan, kami kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dengan gagah berani sang Kepala Dinas mengatakan “Pak Ketua, gimana APBN kami supaya besar, karena kami wilayah Provinsi Kepulauan?”, terbayang tidak APBD Kepulauan Riau untuk gaji dan lain-lain cuman Rp7 miliar, ini Kepulauan Riau yang hampir sebagian besar wilayahnya perairan cuman Rp7 miliar. Saya katakan waktu itu dengan Tim KKP tidak perlu dibantu, karena dia tidak sayang dirinya

sendiri ngapain di bantu. Kalau dia kurang dibantu, tetapi kalau dia tidak punya niat baik mengadakan untuk pembenahan dirinya sendiri ngapain dibantu tolong.

Jadi tolong ini tadi Sekjen, mengenai Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara tolong dikaji ulang. Karena apa? Jangan sampai terulang kembali, itu dulu di Kalimantan 1 juta hektar ke laut. Papua Bife, saya dua kali kesana ketemu bupatinya, "Pak Bupati, ini siapa punya ini?", "oh Pak, ini punya Pak Arifin Panigoro, ini punya Rajawali, ini punya Lippo, ini punya Sinar Mas". Rakyatnya gimana, yang membuat studi kelayakan ya idenya Pemerintah, mereka mau enak saja. Kalau saya sampaikan ini Pak Sekjen kepada Ibu Menteri, misalnya mau buka food estate panggil swasta kamu kerjakan, kamu buat, semuanya uang kamu jangan pakai APBN. Itu baru hebat tapi dengan batasan tertentu, misalnya Kalimantan Tengah satu perusahaan diberikan 50.000 hektar, kasih mereka bonus moratorium kelapa sawit cabut, kelapa sawit 20.000 yang lain untuk pangan. Jangan hanya untuk pangan juga belum tentu pengusahanya mau. Jadi kasih dia sedikit kelonggaran tapi punya kewajiban. Ini loh maksud saya, kalau semua Pemerintah tidak bakal bisa, sekarang yang bertanggung jawab siapa, BUMN? Orang BUMN Kementerian Pertanian saja tidak rugi cuman utangnya triliunan. PTPN 1 sampai 14 mungkin Rp10 triliun lebih.

Termasuk juga Perhutani, Perhutani mungkin nanti bisa untung anak perusahaannya Inhutani. Inikan sebetulnya kenapa sih enggak duduk bersama, itukan tinggal BUMN sama LHK duduk bersama pakai PTPN 8 Jawa Barat dari Banten Malingping sampai Pandeglang, sampai Subang, sampai Bandung, sampai Sukabumi, Cianjur kenapa nggak itu dulu. PTPN diperintahkan untuk tanam ini, ini duitnya PMN atau pinjaman kepada negara, kepada bank Pemerintah dengan bunga 0% selama 3 tahun untuk masa konstruksi, selanjutnya anda harus membayar bunga. Itukan mohon maaf ini, inikan cuman kantong kiri kantong kanan saja kok susah.

Itu saja jadi silakan dijawab, teman-teman Komisi IV DPR RI saya berharap apa yang ditanyakan harus dijawab dan saya tidak mau pengalaman Pak Darori waktu jadi Eselon I. Bapak dan Ibu setelah nulis pulang dibuang saya nggak mau. Setelah ada jawaban harus ada jawaban tertulis, harus ada jawaban tertulis dan dibagikan ke semua Anggota.

Terima kasih silakan dijawab.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Kami beserta para Dirjen tentunya nanti akan memberikan jawaban atau respon. Dan diawali dari kami keterkaitan dengan struktur anggaran,

dari usulan kami yang sudah ada masing-masing program tentunya ketika kita lihat prioritas nasional ada 6 inilah yang menjadi acuan kami dan ditindaklanjuti dengan program prioritas dan kegiatan prioritas. Nah, dalam kaitan itu ada dua Eselon I yang pagunya memang besar, itu tidak lepas dari penjelasan kami ketika bicara pembangunan hutan yang berkelanjutan dalam kaitan dengan Ditjen KSDAE yang dalam kaitan dengan Kementerian/Lembaga. Itu juga salah satunya mendukung pariwisata termasuk juga tugas mengawal kawasan konservasi yang luasannya luas sekali kurang lebih 25-an juta hektar. Dan di sini kita tetap prioritas dalam kaitan dengan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Dan di dalamnya juga tidak lepas bagaimana menjaga keanekaragaman hayati yang ada di seluruh Taman Nasional termasuk tidak lepas menjaga lingkungannya. Jadi memang Ditjen KSDAE ini dalam 2-3 tahun terakhir berkat keterkaitan dengan prioritas nasional pagunya seluruh Indonesia yang mengawal sekian puluh UPT ini seluruhnya selain mendukung prioritas nasional juga prioritas bidang.

Dan beberapa kali rapat atau Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat kami berusaha terus untuk menjaga kawasan konservasi ini yang merupakan wewenang dari Ibu Menteri LHK. Data-datanya memang ada di Ditjen PKSDAE, sehingga memang lokasi atau alokasi anggaran yang selama ini sering Pak Darori mengatakan bahwa kawasan konservasi sangat kecil, itu sekarang hitungannya baru 70.942 per hektar per tahun. Jadi komitmen kami ketika ditanya apa yang menjadi target? kawasan konservasi seluruh Indonesia kami jaga keberadaannya dan kami juga harus tingkatkan penerimaan negara dengan pendekatan tentunya pariwisata industri dan tidak lupa juga masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan konservasi kita angkat ekonomi kerakyatan melalui kemitraan konservasi. Jadi mohon izin Pimpinan, kawasan konservasi ini menjadi basis kita terakhir, benteng terakhir kawasan hutan. Dan kalau memang Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada Dapil yang contohnya Taman Nasional Tambora dari Pak Rudi yang dialokasikan kita dorong untuk kita jaga, kita tingkatkan itu Ditjen KSDAE akan menindaklanjuti, karena itu existing di lapangan dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang sekarang sedang dievaluasi oleh Ditjen KSDAE.

Demikian juga dengan Ditjen PDASHL, perjalanan panjang Ditjen PDASHL ini ketika 3 tahun terakhir pagu anggaran Ditjen PDASHL tentu dengan arahan yang terhormat Bapak Presiden, ketika kita juga sama pemulihan lingkungan ditandai dengan bagaimana upaya rehabilitasi, upaya restorasi, upaya reklamasi dan juga dalam kaitan dengan pemulihan lingkungan, Ditjen PDASHL ini bukan hanya menanam tapi juga harus memelihara. Pemeliharaan tahun pertama, tahun kedua, itu juga harus dibiayai di tahun anggaran ini, sehingga besarnya ini bukan berarti menanam dengan luas sekian dengan angka 2 triliun, karena konsepsi menanam itu tidak lepas dari termasuk bagaimana bangunan konservasi tanah dan air, gali plak dan sebagainya. Jadi kami sudah sangat mendekatkan diri dalam kaitan dengan rehabilitasi hutan lahan ini dengan lahan kritis di seluruh Indonesia, termasuk hutan dan lahan dan menjadi parameter kami untuk kami pulihkan. Sehingga memang anggaran di

KSDAE dan PDASHL itu dalam potret Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mendukung PN memang kami bersama-sama secara spasial mengelola kawasan konservasi ini dan juga kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Sementara di luar kawasan hutan sesuai Undang-Undang 23, itu Ditjen PDASHL ini mengawal rehabilitasi hutan dan lahan dengan pendekatan di luar kawasan, itu juga konsepnya yang sekarang kita dorong adalah bagaimana pendekatan DAK khususnya yang juga harus mengacu kepada NSPK-nya Dirjen PDASHL.

Kita fasilitasi DAK untuk diluar kawasan hutan sehingga serentak di seluruh Indonesia, mohon dukungan Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar RHL di Indonesia itu satu gerak dan langkah dan kalau ada keluhan atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota terkait dengan Dapil yang menunjukkan adanya tanda-tandanya kerusakan hutan dan lahan itu pasti kami diprioritaskan Pimpinan untuk menjadi bagian penting yang harus ditangani, kalau bisa tahun itu direvisi atau tahun depan. Jadi kita sangat respon di dalam menangani khususnya masalah-masalah ketika Ditjen Penegakan Hukum masuk kawasan hutan atau masuk diluar kawasan hutan atau di APL ada kerusakan yang maaf katanya dari sisi lingkungan itu melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan hutan, maaf katanya gitu lah. Itu pasti akan menjadi bagian penting kami untuk dijadikan catatan pemulihan lingkungan. Jadi dengan harapan kami Pimpinan, FGD yang akan kita dorong secepat mungkin, ini tentunya akan kami respon semua yang diusulkan atau diberikan catatan kepada kami untuk kami mengubah cara kerja baru kita yang tentunya sangat sependapat dan kami berkomitmen kalau memang di lapangan kita lihat, kita dengar dan kita mendapat pengaduan, itu harus kita tangani pasti kami akan turun Pimpinan dan Anggota. Dan pasti kami jadikan prioritas, alhamdulillah kalau itu sudah masuk program kami, kami bisa alokasikan untuk diluruskan ke arah itu, karena dia mendapat prioritas.

Inilah yang menjadi catatan kami atas arahan Ibu Menteri dalam FGD nanti. Dalam kaitan dengan mendukung DAK ini, kita sudah harus menjadi Bapak NSPK karena sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 kewenangan seluruh Dirjen dalam kaitan dengan DAK yang akan digunakan oleh daerah mestinya satu kesatuan. Kita sudah mulai dapat di Ditjen PDASHL dan kami nanti akan masuk ke Ditjen-Ditjen lain. Untuk itu, semua yang menjadi catatan Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari Dapil masing-masing akan mewarnai dari FGD itu dan kami punya Tapak tempat kita harus melakukan perbaikan lingkungan ataupun meningkatkan melakukan penanaman kembali dan melakukan penyelesaian masalah dampak-dampak lingkungan tadi. Yang pasti di dalam kaitan dengan prioritas nasional prioritas bidang KLHK dalam paparan kami ini, kami sudah punya acuannya, tinggal existing lapangannya mari kita kuatkan bersama-sama sesuai dengan komitmen yang sudah kita sepakati bersama tentunya.

Nah, kemudian dalam kaitan dengan DAK ini juga kami juga berharap di tahun 2020 ini dengan realisasi yang masih kecil dan kita semuanya tahu ya dampak pandemi ini juga menjadikan bagian yang

penting tidak lepas dari evaluasi kita, tapi akhirnya di tahun 2021 nanti menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki dalam kaitan dengan efektivitas dari penggunaan DAK ini.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen, saya mau tanya masalah DAK tadi. Itukan serapannya rendah sekali, bagaimana anda mengawasinya?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Inilah Pak, yang menjadi catatan kita semua karena usulan dari bupati yang menjadi penentu untuk diberikannya anggaran DAK, ini akan kita evaluasi dengan pendekatan pedoman yang sekarang kami kuatkan, karena antara usulan dengan kenyataannya tidak sesuai. Dan kami di tahun 2020 ini sudah mendapat catatan bahwa dari usulan-usulan dan ini dikarenakan ya kita harus maklumi faktornya utamanya mereka mengatakan penyebabnya adalah soal adanya pandemi ini.

KETUA RAPAT:

Apa urusannya pandemi dengan tadi itu.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ini catatan dari Bupati Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau gitu distop saja DAK-nya jangan dikasih lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Inilah yang menjadi catatan untuk evaluasi berikutnya Bapak, terhadap bupati yang tidak menjalankan realisasi DAK sesuai dengan usulan ini akan diberikan sanksi untuk pengurangan.

KETUA RAPAT:

Dan saya minta dengan hormat, untuk DAK 2020-2021 tolong diberikan datanya kepada Anggota sesuai Dapilnya. Kami akan mengecek ulang, saya minta konsultan saya di Lampung untuk cek ulang. Kalau terjadi apa-apa saya akan melaporkan ke pihak berwajib. Berarti kalau LHK tidak menindak, berarti LHK turut serta membantu pelanggaran hukum. Karena selama ini kalau saya lihat DAK kita tidak ada laporannya, kita juga nggak tahu, setelah jadi apa kita juga tidak tahu, dibeliin tidak dibeliin kita tidak tahu. Pak Sekjen, saya minta nanti per provinsi diberikan kepada kami untuk fungsi pengawasan, itu saja.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terkait dengan DAK ini Pak Ketua, saya mau dalam itu. Kalau terjadi kegagalan kan mestinya sudah ada mitigasi dari awal. Ini sebenarnya sudah diperiksa sama Inspektorat apa belum, sama Irjen sebelum kemudian dilokasinya. Tapi kemudian saya....

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan kalau Inspektorat-nya itu pengawasannya nggak sampai 1% apa yang kau diawasin, ongkosnya ke mana-mana berapa?. Jangan sampai Inspektorat daerah makan dibayarin, hotel dibayarin, mobil dijemput, ya Ibu ya jangan sampai terjadi demikian.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Anggarannya kecil itu Ketua ya?

KETUA RAPAT:

Anggarannya kita rubah, kita naikkan, Inspektorat penting kok. Karena setahu saya mohon maaf ini, dulu di Kementerian Pertanian kalau Inspektorat-nya ke Lampung yang jemputnya daerah, kasih makan, Hotel dibayarin, pulang dikasih oleh-oleh. Maka saya juga bilang sama Irjen sekarang di Kementerian Pertanian, "sampeyan saya kasih naikkan anggaran, tapi tolong", Sekjen saya ini anggota DPR 10 tahun saya enggak pernah minjem mobil mitra saya. Saya kalau ke daerah lain sewa mobil itu cuma Rp600.000 satu hari, ngapain merepotkan. Jadi nanti teman-teman saya minta kesepakatan supaya anggarannya kita naikkan supaya jangan dijempt, jangan dikasih makan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDODNO):

Pimpinan, interupsi Pimpinan sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan Bos.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDODNO):

Ampun Bapak Ketua.

Sedikit saja menanggapi Bapak Sekjen terkait rehabilitasi hutan. Bapak Sekjen, kalau bisa untuk meningkatkan fungsi pengawan kami juga, kami ingin kalau ada penjelasan tolong nanti untuk tahun 2021 dan sebagainya dijelaskan, misalnya PDASHL itu anggarannya digunakan untuk penanaman, pemeliharaan atau apa. Kalau bisa juga target-targetnya juga disajikan supaya kita harapan kita, eskpektasi kita bisa sama-sama. Jangan kita semua mikir ini "oh, anggaran segitu ya ekspektasi kita yang ditanam sekian meter, padahal belum tentu anggaran itu cukup hanya untuk penanaman mungkin lebih banyak untuk pemeliharaan. Supaya kita dalam fungsi pengawasan kan juga bisa lihat, kan kita tidak bisa tahu Pak Sekjen itu laporannya misalnya tahun 2019 yang sudah tertanam misalnya 20 ribu hektar ya seperti Bapak Ketua katakan tadi, gimana kita melihatnya apakah kita mau jalan di hutan dari Sabang sampai Merauke untuk mengeceknya kan tidak juga. Bagaimana caranya kita ini nanti kedepan meningkatkan fungsi pengawasan juga agar supaya program-program itu benar jalan dan tepat sasaran.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Budi.
Lanjutkan Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

ini saya akan selesaikan karena mohon ijin, karena ini teknis atau bisa langsung dengan Dirjen atau nunggu selesai mohon arahan Pimpinan, supaya bisa.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, sudah cukup belum?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dari anggaran cukup Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup ya, silakan Eselon I yang tadi ada pertanyaan dari Anggota tolong dijawab tapi juga nanti dibuatkan tertulisnya.

Silakan Bapak Sekjen yang atur siapa saja duluan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Silakan Dirjen PDASHL dulu.

**DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG
KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota.

Ijinkan kami menyampaikan paparan sangat-sangat singkat Pak, tentang rehabilitasi mangrove. Kami mohon slidenya, karena ini penting untuk kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Anggota. Jadi tahun ini tahun 2020, kami mendapatkan padat karya rehabilitasi mangrove untuk mendapatkan padat karya rehabilitasi mangrove seluas 15.000 hektar dengan dana Rp406 miliar. Nah, kegiatan ini kami dapatkan untuk....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Pimpinan, saya boleh interupsi sedikit saja Pak.

Pak, kita mulai dari berapa jumlah area mangrove setelah itu kemudian berapa alokasinya, mohon maaf ya Pak. Yang kedua adalah dimana tumpang tindihnya Pak, karena ada dua wilayah yang menurut saya tumpang tindih ini antara dua kementerian. Satu, kawasan konservasi itu nanti di KSDAE, satu terkait dengan mangrove. KSDAE katanya sudah ada kesepakatan, nah ini kita minta tolong Pak, mohon ijin saya interupsi sebentar.

**DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG
KLHK:**

Terima kasih Pak.

Jadi Tusi kami untuk mangrove kami melaksanakan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dan kawasan perlindungan setempat Pak. Jadi untuk itu maka kami, jadi ini peta mangrove nasional jadi ada 3,3 juta hektar hutan mangrove sementara yang kritis 637 ribu hektar. Lanjut, Bapak ini manfaat mangrove saya pikir kita terus saja.

Nah, terhadap padat karya yang telah kami laksanakan, jadi penentuan lokasi kami yang pertama kami memakai *one map* mangrove. Disitu kami dapatkan mangrove dengan density tutupan vegetasi, kemudian dari situ kita dapatkan jarang dan sangat jarang yang rusak ini Pak. Pendekatan kedua, adalah keberadaan masyarakat binaan KLHK. Di sana ada kelompok hutan social, ada proklam terutama kampung iklim, ada Kulin KK, ada juga kelompok tani hutan dan komunitas lainnya. Nah, dari situ dari dua peta ini kemudian kita gabungkan, kita mendapatkan untuk lokasi padat karya mangrove.

Lanjut, ini Bapak sebarannya 15 ribu untuk 34 provinsi. Mohon maaf yang sebelah kolom nomor 2 itu nama PDASHL-nya jadi dari Aceh, Sumut, sampai dengan Papua. Sebaran ini kita dapatkan dua pendekatan tadi Pak, one map mangrove dan peta keberadaan masyarakat. Lanjut, ini sasaran kelompoknya kita utamakan yang binaan kami dulu dari KLHK. Jadi kalau KKP kami kurang tahu pendekatannya mungkin Bapak nanti bisa klarifikasi kepada Kementerian KKP.

Lanjut, Bapak jadi di padat karya mangrove kami melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaannya itu penyusunan rencana teknis sangat sederhana. Jadi dengan peta itu karena kita mengingat hanya waktu 3 bulan ini rancangan teknis ini dibuat sangat sederhana tapi di dalam padat karya nanti kami akan melaksanakan kegiatan penanaman itu yaitu penyiapan bibit, kemudian penyiapan ajir, penanaman mangrove sendiri dan pemasangan alat pelindung tanaman. Kegiatan ini bisa kami laksanakan simultan, jadi kalau kelompok masyarakat dia mempunyai mangrove bagus kita akan ambil bibitnya dalam bentuk propagul kita bayar berdasarkan hari orang kerja. Kalau disitu mangrovenya rusak, kemudian ada bibit kita bayar bibit berdasarkan HOR. Demikian seterusnya Pak.

Lanjut, ini contoh rancangan teknis sederhana. Jadi kami di rancangan teknis sederhana begitu melihat lokasi kami tentukan nama kelompok dan pelaksanaannya, letak dan luas lokasinya, jumlah bibit dan pola tanam, rencana anggaran, tata waktu dan peta lokasi. Ini yang sebelah kanan itu rencana peta tersebut, terus ini Bapak yang tadi kami sampaikan. Lanjut, ini Bapak kami dalam penanaman mangrove kita untuk yang daerah rusak berat kami melaksanakan pola tanam murni atau yang pola ketiga yaitu pola rumpun berjarak, nanti mungkin ada visualisasinya Pak, tapi untuk daerah misalnya pantai utara Jawa itu kami laksanakan dengan pola *silvofishery*, karena disana ada tambak-tambak dan di Indramayu alhamdulillah ada tambak yang di dalamnya itu di tanam mangrove ternyata penggemukan bandengnya jauh lebih berhasil dibanding di tambak yang dia tidak ada mangrove-nya. Dan di sana permintaan masyarakat sangat tinggi, dan juga misalnya di daerah Jakarta di Pantai Indah Kapuk daerah sekitar situ kita mengadakan pola pengkayaan.

Lanjut, Bapak ini pola tanam murni ini seperti ini Pak, ini yang daerah yang kecil itu 3 tahun setelah ditanam. Lanjut, ini yang hasil *silvofishery* kita laksanakan yang tadi di dalam tambak-tambak tadi bisa nanam mangrove digalengannya atau di dalam itu kita tambahkan sedikit-sedikit. Terus, ini rumpun berjarak Bapak, ini kita lakukan untuk daerah dengan ombak yang tinggi. Kita tidak mungkin nanam mangrove satu-satu, sehingga kita adakan tanaman rumpun berjarak dengan pelindung tanaman yang sebelah kiri bawah. Lanjut, ini pengayaan Pak, ini di daerah Jakarta Muara Angke, Angke Kapuk, di daerah Angke Kapuk itu dia hanya spot-spot, dia hanya kecil-kecil sehingga itu kita lakukan dengan pengayaan.

Lanjut, kami di daerah tertentu kami juga harus melaksanakan bronjong tanaman. Dan ini kita padat karya kan Pak, tadi bisa nanam, bisa mengadakan bronjong, bisa dia juga mengumpulkan bibit, ini kita lakukan untuk dalam waktu 3 bulan ini. Lanjut, ini daftar-daftar yang akan kita lakukan. Itu tentang mangrove Pak, mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang akan dilaksanakan untuk padat karya mangrove.

Mengenai overlapping-nya terus terang kami tidak bisa jawab Pak, karena kami tidak tahu pekerjaan KKP. Tapi yang jelas kami tahu KKP mendapatkan 200 hektar dengan anggaran yang sama Rp400 miliar, tapi kan kami tidak tahu di dalamnya seperti apa.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, ijin Bapak Ketua, saya pendalan sedikit.

Baik, begini Pak berarti 15 ribu hektar yang Bapak tanam untuk mangrove itu anggarannya berapa Pak, untuk padat karya.

DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG KLHK:

Rp406 miliar.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

KKP yang 200 hektar juga anggaran sama Rp400 miliar juga, artinya itu ada problem disitu. Nah, padat karya yang dilakukan oleh LHK Pak, itu dalam konteks menanam saja.

DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG KLHK:

Padat karya ya dalam anggaran terbesar adalah penanaman yang bagian terkecilnya hanya perencanaan. Kami karena harus membuat perencanaan teknis secara sederhana.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Silvofishery-nya termasuk didalamnya program padat karya.

DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG KLHK:

Jadi *silvofishery* itu bagian dari pola tanam, ada intensif ada *silvofishery*.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya dialokasikan kesitu juga silvofishery juga, padat karya menanam juga ada disitu sejumlah Rp406 miliar dengan luas lahan 15.000 hektar. Tapi artinya dari 15.000 ada sekitar baru 5% dari sekitar 630.000 hektar yang terjadi rusak itu ada alokasi Rp406 miliar. Iya, saya mengerti.

Terima kasih.

DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG KLHK:

Baik, Bapak.

Untuk pertanyaan yang terhormat Ibu Endang, rehabilitasi di Ciliwung. Kami telah melaksanakan Macadamia di sana ada 40.000 batang.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak, sorry sedikit saja.

Pak, minta petanya boleh, mohon ijin Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti gantian ngomongnya.

DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG KLHK:

Baik, Bapak Ketua.

Jadi yang untuk Ciliwung Pak, kami mengalokasi sudah menanam 40.000 batang Macadamia. Memang jadi begini, konsep rehabilitasi ke depan itu kita tidak menghindari masyarakat Bapak Ketua. Jadi memang ke depan rehabilitasi adalah untuk menumbuhkan sentra-sentra baru pengganti sayur misalnya di daerah lereng-lereng seperti Dieng, di Cianjur dan di Garut, sehingga kami menawarkan RHL karena ini tanahnya tanah mereka, kita tawarkan bibit yang mereka sukai. Harapan kami nanti disitu akan tumbuh sentra-sentra baru, misalnya pusat jengkol, pusat durian pusat dia yang lain-lain seperti itu Pak Ketua. Jadi RHL adalah untuk menyelesaikan konflik tenurial yang ada di daerah tersebut.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua, ijin.

Saya sangat setuju Pak, cuman bibit yang dibagikan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, di antaranya padahal kita punya Balai Teknologi tadi Biogen. Apakah tidak bisa bibit-bibit itu dibagikan yang kualitas nomor satu gitu loh Pak, jadi tidak sembarangan sehingga umurnya pendek, seragam, hasilnya cepat.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, saya jelaskan kalau mau rakyatnya, rakyat semua juga maunya nomor satu tetapi anggarannya cukup atau tidak, kan itu masalahnya.

Lanjutkan.

DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG KLHK:

Terima kasih Bapak Ketua.

Itu Bu jawabanya Ibu.

Kemudian yang terhormat Bapak Abdullah Tuastikal, jadi prinsipnya kebun bibit itu sebetulnya insentif kami untuk meningkatkan produktifitas lahan masyarakat. Kami sadari Pak, memang perhitungan 50 juta itu dari 20.000 kali 1 batangnya Rp2500 ini memang terlalu kecil. Kami sedang berusaha untuk komunikasi terus dengan Dirjen Anggaran terutama untuk menaikkan ini menjadi region, ada region I yaitu Jawa-Sumatera, kemudian dua Kalimantan-Sulawesi dan region 3 Maluku Selatan. Kami memang mendapat laporan dari PDASHL bahwa anggaran yang terlalu kecil karena disana menyangkut biaya transportasinya juga tinggi Pak.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, matiin dulu. Jadi gini, kalau Dirjen Anggarannya idak menaikkan suruh dia yang tanam saja, itukan gampang. Ya sekarang mohon maaf, 2.500 dari tempat kami di Kabupaten Tanggamus ke dalam itu mungkin ongkosnya Rp300,- ya kalau beliau ini satu pohon mungkin bisa Rp1.500 ujung-ujungnya apa? Ya ngebohong. Yang ditanam berapa? 20.000 padahal yang ditanam cuman 2.000.

Silakan Bapak mau ngomong apa sampaikan.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Saya kira tinggal dikurangi saja, karena kalau 20.000 tidak mungkin, dikurangi mungkin 10.000 atau 5.000 tergantung dari maunya kita. Kalau cuman tanam saja itu tidak ada masalah, tapi kan maunya juga ada manfaat. Kalau ada manfaat saya kira kalau 10.000 sudah bisa, apakah ditanam pala, cengkeh, atau mau apa saja yang penting bermanfaat tapi ini kasihan. Sekali lagi Pak Ketua, saya nggak mau terlibat untuk periode yang satu ini, karena saya ngerti bahwa ini pasti gagal dan nanti yang kena kalau pemeriksaan itu mereka-mereka ada di sana, saya tidak mau terlibat. Itu sekali lagi saya kira tidak usah naikkan 50 jadi berapa, tapi 20 jadi berapa dan tanaman itu bermanfaat buat masyarakat.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, lanjut.

**DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG
KLHK:**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Terus untuk Bapak Budi, jadi begini Pak, anggaran kami sebesar kurang lebih Rp2 triliun sekian itu memang kami akan melaksanakan penanaman 56.000 untuk tahun, kemudian juga pemeliharaan karena tanaman 2019 kami laksanakan pemeliharaan tahun ini Pak. Jadi itu seluas 203.000 ribu hektar dan kemudian 45.000 itu untuk yang pemeliharaan tahun kedua di tahun 2018. Jadi ada 3 komponen kegiatan besar yang kita lakukan untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Mungkin demikian Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tadi Bapak Ichsan mau tanya tidak jadi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya cuman minta peta lokasi Pak, jangan sampai kelihatan tumpang tindih nanti Pak, karena disitu ada 400 disini ada 15.000 jangan sampai kelihatan tumpang tindih antara kewenangan KKP sama LHK.

KETUA RAPAT:

Jadi saudara Sekjen, jangan membuat rakyat kita berbohong. Seperti tadi yang dikatakan oleh beliau 50 juta dapat 20.000 yang ditanam cuman 5.000. inikan sama juga dengan mengajarkan rakyat kita berbohong. Kenapa misalnya, okelah dengan 50 juta misalnya 10.000 pohon itu masih logika tapikan dimana pun di Indonesia ini yang namanya proyek pasti ada biaya kemahalan, contohnya Maluku, Papua, pasti ada biaya kemahalan pasti, orang bensin disana katanya satu harga cuman sementara sekarang sudah Rp20 ribu lagi.

Selanjutnya Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Baik, ijin Dirjen PKTL akan merespon beberapa tanggapan.

**DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK
(Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):**

Terima kasih Bapak Sekjen.

Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Pimpinan,
Serta para Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Yang pertama, langsung saja tadi terkait dengan TORA dari Bapak Johan, kebetulan di NTT Pak, di NTT ini sudah dilakukan, tapi yang di tanyakan tadi yang bawah tadi yang di NTT kan itu bukan ya, oh Sumbawa ya. Dari laporan temen-temen ternyata TORA disana sebagian sudah dilakukan tapi kebetulan yang di tempat Bapak ini direncanakan tahun ini kemarin ya, karena kita kalau melakukan infer itu yang kordinir kan dari Menko Perekonomian juga sama daerah. Nah, nanti akan ditindaklanjuti sampai ke daerah Bapak. Yang kedua, tadi apa di NTB itu sebenarnya kebanyakan masuk kawasan hutan. Nanti kalau dengan cara TORA yang pelepasan nggak bisa kita arahkan ke perhutanan sosial. Yang penting masyarakat tetap bisa memanfaatkan kawasan untuk selanjutnya, itu untuk Pak Johan.

Yang kedua, untuk Mbak Kiki, Ibu Kiki ya, terkait dengan food estate ini juga sebenarnya untuk lokasi *food estate* lainnya KLHK itu statusnya hanya mendukung, karena bidang pangan atau food estate itukan sebenarnya di Kementerian Pertanian yang jadi lakonnya, yang rulenya. Nah, sekarang pindah ke pertahanan. Terkait dengan yang di Sumatera Selatan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mohon maaf saya potong Bapak Dirjen.

Memang yang *food estate* itu primernya mungkin bukan di LHK, tapi saya mohon dengan sangat tolong dikasih masukan. Gambut kami beda dengan gambut yang ada di Kalimantan Pak. Jadi ini mungkin Bapak kan secara pemetaannya Bapak lebih paham bahwa Kalimantan itu sudah. Jadi maksudnya kami tolong dirasionalisasi diinformasikan, saya memohon agar kami tetap dibiarkan untuk melestarikan gambut Pak.

Terima kasih Pak.

DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK:

Siap Mbak Kiki.

Terima kasih sarannya, jadi memang untuk pertanian yang Sumatera Selatan itu kan rencananya yang perlu segera ini sekitar 235 ribuan hektar. Nah, kebetulan setelah dioverlay-kan dengan kawasan hutan itu yang masuk kawasan hutan sekitar 26 ribuan hektar. Jadi tugas kami ini di area 26 ribu hektar itu nanti. Nah, berikutnya nanti Pak Dirjen Bapak Karliansyah itu juga di situ akan info menyelidiki tanah gambut yang ditanyakan Bu Kiki tadi. Kalau nanti yang gambutnya tebal dan dalam ini mungkin nggak dimasukkan, yang tipis atau apa nanti ketebalan khusus kalau memang sangat kurang bisa di masukan dan nanti semuanya akan kita laporkan kepada Ibu Kiki atau Komisi IV DPR RI. Mungkin itu Bapak Sekjen.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Bapak Dirjen.

Ijin selanjutnya Dirjen PPKL Bapak, terkait IPAL dan lain-lain.

Silakan Bapak Karli.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KLHK (Drs. M. R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Pimpinan yang terhormat,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Ijinkan saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama tentu terima kasih Pak Ichsan, Ibu Kiki, Bapak Khalid, dan Bapak yang lain juga tadi atas dukungan untuk IPAL. Kami siap prinsipnya. Nah, kenapa tadi ditanya kenapa 5 tahun ini, karena yang siap DID-nya waktu tahun kemarin itu 5 itu, jadi kami laksanakan tahun ini. Jadi memang nanti kalau ini mungkin kami didukung dengan dana Pak, kami minta bantuan untuk lokasi pastinya tahun ini Pak, sehingga kami bisa atur sehingga paling lambat lelang itu bulan April, sehingga selesai apa namanya pembangunan itu di bulan Oktober.

Yang kedua, Bapak Khalid kami laporkan yang di Banda Aceh ini kebetulan bukan APBN kami Pak. Jadi kami waktu itu pernah waktu di media ribut itu kami cek ternyata dari bantuan PUPR Pak. Tapi kalau ba menugaskan kami untuk kelapangan kami siap juga untuk mendampingi ba kelapangan Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak mau ngomong?

F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.)

Betul Pak, makanya kan yang jadi permasalahan memang anggaran PUPR tapi ribut masalah limbah, efeknya Anggota Komisi IV DPR RI yang Dapil Aceh. Bagaimana kita selesaikan ini, maka dari tadi kita minta turun, kita lihat, tidak boleh juga sembarangan PUPR bisa bangun yang efeknya Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KLHK:

Siap Bapak, kami siap untuk mendampingi Bapak untuk verifikasi lapangan.

Kemudian yang ketiga terkait dengan gambut Ibu, jadi Dirjen PKTL kami ditugaskan untuk melihat tingkat kesesuaian. Jadi selama ini yang kami sarankan hanya yang di bawah 50 senti. Jadi artinya yang di atas itu apalagi yang itu tidak mungkin diganggu gugat. Jadi artinya kami memetakan termasuk di ada 25 KHG yang kami akan petakan, kemudian di Papua juga dipetakan, untuk memastikan tadi mana yang kira-kira sesuai dan mana yang tidak.

Demikian Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Bapak Karli.

Selanjutnya Dirjen Pengolahan Sampah Limbah B3.

Silakan Ibu Vivin.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Terima kasih Pak Sekjen.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Dan rekan-rekan Eselon I.

Pak Ketua, kami ingin menjelaskan tentang program padat karya produktif sampah yang dimasukkan dalam pemulihan ekonomi nasional, tadi juga ada pertanyaan. Jadi selain mangrove dan lain-lain memang Ibu Menteri memasukkan untuk pemulihan ekonomi nasional ini terkait dengan pengelolaan sampah. Dan pengelolaan sampah ini yang menjadi target grup itu adalah yang pertama pemulung Pak, pemulung itu sebenarnya seluruh Indonesia ada 3,9 juta dan itu ada asosiasinya. Tapi mengingat kalau memang di setuju inikan berjalan di tahun 2020, sehingga memang yang kami ajukan itu masih terbatas pada 15.000 orang Pak, yang meliputi 339 kabupaten kota. Jadi nanti sektor informal itu pasti ada di daerah pemilihan Bapak dan Ibu sekalian.

Dan yang kedua, target grupnya adalah para pemilah dan pengumpul di bank sampah. Di bank sampah ini sudah kami identifikasi Bapak, ada 11.330 unit bank sampah yang berada di 339 kabupaten kota dan jumlahnya adalah 453.200 orang. Dan yang ketiga, adalah pekerja TPS3R, TPS3R ini tempat pemilahan sampah juga Bapak, itu ada 930 unit yang berada lokasinya ini lebih luas dari sekitar 514 kabupaten kota dan ada 37.200 orang. Sehingga kalau ditotal yang akan mendapatkan padat karya produktif sampah ini adalah sekitar 505.400 orang. Dan bagaimana caranya memang nanti kami akan melakukan penyusunan rencana pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasinya juga didampingi oleh asosiasi LSM dan juga Pemerintah Daerah yang ada di daerah tersebut.

Dan pekerjaannya apa saja sebetulnya yang dilakukan yang kemudian akan dibayarkan dengan padat karya. Jadi intinya Bapak, para pekerja ini baik sektor informal dari bank sampah maupun TPS3R itu adalah mereka yang bekerja sebagai pengumpul sampah, kemudian pemilah sampah. Dan tujuan akhirnya adalah memang mengurangi

sampah yang dibuang ke TPA. Dan yang lain kami mendorong hal ini karena juga mau mendorong bahan baku industri daur ulang itu banyak dari dalam negeri. Pak Ketua kan keras sekali dengan masalah impor ini dan kemudian impor bahan baku dan banyak dicampur dengan sampah dan limbah. Sebetulnya kenapa Pak? karena bahan baku dalam negeri ini kurang dan kenapa kurang? karena pengumpul dan pemilah sampahnya tidak dilakukan dengan optimal. Jadi salah satu tujuannya targetnya adalah memang memenuhi bahan baku dalam negeri Bapak, supaya tidak kita kemudian melakukan impor.

KETUA RAPAT:

Ibu Dirjen, sebetulnya kalau kita ngomong jujur bukan kekurangan bahan baku. Pengusaha itu maunya untungnya besar, jadi tidak mau beli biji plastik, biji plastik itu mahal jadi dia gunakan limbah itu untuk campuran, kan ngomong gitu saja bukan bilang kurang. Pengusahanya rakus, pengennya untungnya besar.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Bapak, kemudian yang lain memang terkait dengan limbah medis itu kami lakukan setiap hari Pak, untuk mengecek rumah sakit-rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan penanganan limbah infeksius covid-19. Mungkin dalam pertemuan yang lalu Ibu Menteri sudah menjelaskan bahwa sudah dikeluarkan surat edaran Menteri LHK bulan Maret tahun 2020 tentang penanganan limbah infeksius covid-19. Kami memang memberikan banyak diskresi Pak, untuk hal ini kami memberikan juga keleluasaan untuk misalnya menggunakan insinerator yang belum berijin untuk memusnahkannya asalkan speck-nya sesuai, yaitu pembakaran misalnya minimal 800 derajat celcius. Dan kami juga mendorong tidak hanya Pemda tetapi juga jasa pengolah limbah B3 Bapak, untuk melakukan hal ini.

Jadi ijin Pak Ketua dan Bapak dan Ibu sekalian, memang di Direktorat Jenderal ini selain mendorong Pemda juga bisa melakukan tapi kami juga mendorong investasi Bapak dari para pengusaha atau industri untuk bisa mengolah limbah B3, karena memang jujur Pak Lebih profesional kalau jasa pihak ketiga Bapak untuk limbah medis ini, dibanding dengan ijin dengan misalnya Pemerintah Daerah yang juga bekerja untuk itu, sehingga memang di tahun depan kami mengambil daerah-daerah yang remote area Pak, yang tidak dijangkau oleh jasa pengelola limbah B3 untuk mereka bisa mendirikan hal ini. Mendirikan apa jasa pengolah limbah medis, tapi kalau yang limbah yang lain memang kami mendorong perusahaan itu sendiri atau pun juga swasta-swasta bisa mengolah jasa limbah B3. Dan kembali lagi untuk limbah medis terkait dengan covid Bapak, kami meminta laporan setiap minggu dari Pemda Provinsi dan kami bisa mendeteksi rumah sakit-rumah sakit yang kemudian mereka tidak bisa mengolah limbah B3, sehingga dicarikan jalan keluar.

Dan yang terakhir Bapak, saya

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Ketua.

Ibu, kalau tahun ini berapa direncanakan untuk pembangunan.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Kalau di tahun 2020 itu ada di Aceh, di Labuan Bajo, kemudian di NTB, di Sumatera Barat, tahun 2020.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Untuk tahun 2021?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

2021 kami belum merencanakan tapi FSDED-nya memang kami ambil di Babel, kemudian di Sumba Pak, karena jauh tidak terjangkau memang oleh jasa, kemudian Papua, Papua Barat dan Maluku.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kami minta satu untuk Sulawesi Barat.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Siap Pak, nanti Bapak ijin kalau memang minta ditambah anggarannya juga mesti disesuaikan Bapak.

Baik, yang terakhir Bapak dan Ibu, saya mau juga bicara tentang ijin. Kalau ada yang menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ijin di kami susah itu sama sekali salah Bapak dan Ibu, betul itu. Saya sampaikan ke mereka berarti kalian pakai konsultan ketika mengurus ijin, karena tidak ada yang susah Pak di kami. Kadang-kadang konsultan itu yang dipakai ada persyaratan administrasi yang tidak sesuai, kemudian dikembalikan ke misalnya rumah sakit atau perusahaan, kemudian tidak ditindaklanjuti lagi Pak. Jadi ijin kalau misalnya memang ada yang mengeluh itu lapor ke saya langsung, akan kami tindak lanjuti, karena pasti bukan dari saya.

Demikian Bapak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, saya interupsi yang ini Bapak Ketua.

Saya sudah lapor ke Ibu Dirjen langsung, sehingga pihak rumah sakit sudah diantar oleh TA saya langsung tidak pakai konsultan. Naha, kemarin ini sudah seminggu yang lalu, kemarin dia sudah laporkan survei lewat zoom, virtual juga sudah dilakukan. Jadi yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu adalah ijinnya Ibu. Jadi anjuran untuk menggunakan walaupun tanpa ijin tetap membuat rumah sakit itu ragu, karenanya saran saya Ibu, ya permudah saja dan percepat mengeluarkan ijin. Nah, itu TA saya yang antar langsung Rumah Sakit Manambai di Sumbawa. Ya mohon segera agar di keluarkan ijinnya.

Terima kasih.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Nanti saya cek Bapak, ijin Bapak kalau yang sekarang dia mau bakar sebetulnya lami memang memastikan speck-nya itu harus tepat Pak, itu dipercepat tapi kami harus cepat, banyak yang kemudian mereka membakar itu insineratornya pada terbakar, karena memang speck-nya nggak cocok. Nah, itukan juga jadi bikin pencemaran, tapi Bapak nanti akan kami cek tempat Bapak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Sudah dinyatakan layak untuk mendapat ijin.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Oke, nanti akan dikeluarkan surat oleh Direktorat kami Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi saya mau tanya Ibu Dirjen, kalau di saya mau tanya kalau di Sumsel dan di Lampung itu ada tidak?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Selama ini buang kemana?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Mereka bawa ke jasa pihak ketiga yang bisa di pabrik semen, mereka bawa ke Semen Padang, bisa juga Semen Batu Raja atau juga dibawa ke Jawa Pak, ke jasa yang ada di Banten.

KETUA RAPAT:

Kalau saya tidak yakin itu terjadi.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti tolong buat surat ke Kepolisian, ke Polda Sumsel dan Polda Lampung untuk mencermati. Karena saya dapat laporan banyak dibuang ke TPA Bakung di Bandar Lampung.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Siap, nanti kami kordinasi dengan Bapak Roy Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau perlu Bapak Roy sama saya ke Lampung kita cek saja langsung.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Iya, siap Bapak.

KETUA RAPAT:

Bukan saya minta dibangun, saya tidak minta dibangun, karena saya lihat beberapa kali banyak laporannya seperti itu. Terus tadi mengenai DAK untuk beli mobil sampah dan lain-lain bagaimana.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Kalau memang ijin Bapak, memang permintaan itu banyak karena kembali lagi anggaran mereka kurang, sehingga ketika membantu pengelolaan sampah di Pemerintah Daerah memang dibutuhkan truk. Dan berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, memang pengelolaan sampah itu untuk kapasitas terpasang atau untuk kumpul, angkut dan buang itu ada di Pemda Kabupaten Kota. Tetapi berdasarkan pemasukan dari masukan dari Pak Ketua tadi, mungkin nanti kami akan cek lagi Pak, gimana performance dari daerah itu sehingga bisa kami bantu dengan DAK-nya.

Demikian Bapak, mohon arahan.

KETUA RAPAT:

Kenapa sih kalau DAK-nya itu untuk dibelikan sepeda motor roda tiga angkut sampah. Selanjutnya yang menjadi yang di TPS untuk ke TPA itu tugasnya mereka. Inikan kadang-kadang kita sayang melihat uang dibuang-buang.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Baik, Bapak.

KETUA RAPAT:

Tolong ini diperhatikan nanti saya juga perintahkan anak buah saya di lapangan untuk memphoto-photo mobil-mobil yang jadi rongsokan.

Selanjutnya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dari catatan kami Pimpinan, semuanya sudah merespon para Dirjen. Ada tambahan sedikit dari kami Bapak Johan, untuk KPH setelah kita rapatkan untuk 2021 Bakti Himbawan masih tetap kita biayai. Sambal nanti kita evaluasi provinsi-provinsi mana yang sudah bisa berjalan dengan anggaran DBHDR-nya, sehingga dalam kesempatan ini yang belum kami respon dalam kaitannya dengan DAK, sumber anggaran DAK DBHDR kami nanti akan masukkan dalam pembahasan di FGD Pimpinan, supaya bisa menjawab tantangan-tantangan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Bapak Sekjen, terkait mumpung Bapak menjelaskan masalah DAK saya hanya tanya dari tadi cuman satu hal, apakah memungkinkan Pak, untuk karena kan kita rundown Pak, September ini sudah harus clear, visible tidak Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kalau dijadwal kami itu setelah Rapat Dengar Pendapat hari Senin Ibu Menteri Rapat Kerja, setelah itu baru FGD Pimpinan, minggu depan atau minggu depannya lagi. Masih bisa kita sangat menyesuaikan dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, tapi arahan Ibu Menteri FGD ini harus dilaksanakan dalam bulan ini untuk memfasilitasi perubahan-perubahan khususnya melihat 6 program di 2021 dan menguatkan di 2020 yang masih ada 3 bulan berjalan ini.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Ketua, ijin.

Perubahan itu apakah perubahan menu atau perubahan alokasi anggaran atau perubahan apa. Kalau ada perubahan menu lebih menarik sebenarnya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang pasti APBN 2021 sesuai dengan usulan kami hari ini dengan penekanan-penekanan yang sudah kami laporkan tadi. Kita harapkan memang masing bisa seperti itu, tapi ketika untuk DAK DR dan DBH ini kita mau formulasikan Pimpinan, dengan mengevaluasi di 2020 ini khususnya bagaimana upaya kami nanti usulan 2021 yang sudah disampaikan oleh para Bupati ini kita akan lihat kembali dengan pedoman teknis yang memang KLHK mendapatkan tugas untuk memberikan rekomendasi, itu yang mau kita bangun mekanismenya agar sambunglah untuk APBN, APBD, DAK DR dan DBH. Ini yang menjadi sumber anggaran yang harus kita fasilitasi. Kalau perubahan-perubahan menu memang nanti kami ijin akan kami berikan laporan kepada Ibu Menteri aka nada Rapat Kerja hari Senin, tentunya dengan prioritas tetap tidak mengubah dari prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas yang sudah kami harus jaga bersama Kementerian/Lembaga yang lain. Tapi prioritas bidang nanti kami dengan para Dirjen akan sama-sama lihat kembali apakah perubahan-perubahan itu masih memungkinkan. Tapi pastinya kami berharap di 2021 sampai 2024 aspirasi yang sebagian hari ini di sampaikan menjadi catatan perbaikan untuk kami Pimpinan, dalam realokasi ataupun refocusing untuk pendanaan di APBN ini. Dan kita usahakan APBD juga menjadi bagian penting.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

Pak Sekjen, inikan juga pasti kita ketahui setelah rapat hari ini adanya perubahan untuk dalam penganggaran. Tapi kita juga mengetahui dalam satu penganggaran itu apabila nomenklatur yang sudah ditetapkan terus juga harus melakukan perubahan dalam nomenklatur itu bagaimana dengan penyebaran penganggarnya. Maka dari itu, mohon dengan

sangat kami ada 54 Anggota Komisi IV DPR RI ini, saya sudah melihat penjabaran dari Setjen itu ada di beberapa provinsi saja tapi tidak focus ke beberapa daerah lain. Maksud saya agar tidak lagi terjadi kritik dan sebagainya tolong penjabaran dari program-program yang sudah disampaikan kepada Komisi IV DPR RI agar melihat juga dari lokasi dan daerah pemilihan Anggota Komisi IV DPR RI.

Misalkan saya juga pernah di daerah Pak, saya mengetahui persis untuk penganggaran DAK itu memang harus sesuai prosedur penyampaian dari Bupati setempat. Misalkan ada DAK yang sudah ditetapkan oleh KLHK ke beberapa kabupaten kota misalkan, tapi dalam tahun-tahun sebelumnya tidak dapat merealisasikan anggaran tersebut mungkin saja bisa meminta dari Komisi IV DPR RI yang juga memiliki kabupaten kota Dapil masing-masing. Sehingga programnya benar-benar tersalurkan dan tercapai dan apabila kabupaten kota yang diajukan oleh Anggota Komisi IV DPR RI tidak dapat merealisasikan anggaran yang sudah diberikan KLHK mungkin bisa diberikan sanksi dan peringatan. Atau apabila dimasukkan lagi untuk menjadi prioritas dalam penganggaran tahun-tahun berikutnya mungkin bisa diberikan peringatannya seperti itu.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, tolong Bapak Sekjen habiskan dulu sekalian, kalau tidak akan habis-habis nanti.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pak, penambahan sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sekjen sudah selesai?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kami sampaikan kembali Pimpinan, semuanya akan menjadi bahan FGD dan perubahan yang mendasar itu kita akan bawa yang namanya nomenklatur DAK aspirasi. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu menjadi bahan kita semua, karena dari awal tadi soal DAK inikan kita sudah mohon Pimpinan untuk dalam pembahasan FGD nanti akan kami paparkan mulai dari kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan sampai pada akhirnya di Tapak Dapil-Dapil yang memang harus kita dorong lewat DAK itu bagaimana bisa kita tindaklanjuti tidak seperti sekarang. Jadi kami sudah catat semua ini Pimpinan, agar menjadi bagian perbaikan kita

karena kalau terus menerus kan kita juga memang sudah siap diri untuk merubah Pimpinan. Mengendalikan bupati-bupati dalam kaitan DAK DR itu sudah menjadi tugas kami. Sekali pun uang itu langsung ditransfer kepada kabupaten dan yang berhak memeriksa itu Itwil-nya. Tapi kita di dalam regulasi itu kan punya masuk dalam kaitan dengan pedoman teknis agar sejalan antara Undang-Undang 41, Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 23 tahun 2018 soal Kewenangan, Pimpinan.

Kami yang akan rekonstruksi ulang agar apa yang dijadikan dasar dari aspirasi hari ini menjadi kekuatan kami untuk selamanya sampai 2024 bahwa kita tidak hanya kerja satu tahun, contohnya IPAL. IPAL persoalannya bagi kita tentunya tidak lepas dari kita yang mengusulkan, karena peran ada di kabupaten kota karena menyangkut lahan areal yang tidak mungkin langsung tahun itu selesai. IPAL inikan monumental, dan juga termasuk IPAL Komunal. Jadi kami mohon dukungan DApil-Dapil yang memang kerusakan lingkungan atau dampak pembangunan terhadap lingkungan yang harus kita lakukan dan termasuk upaya untuk membersihkan atau meningkatkan kualitas lingkungan dengan pendekatan sumber air kita akan siapkan itu Pimpinan. Ini yang menjadi cara kerja baru kami.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup.

Selanjutnya Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Singkat saja, saya butuh penegasan saja Bapak, biar kita juga sama-sama ini. Intinya bisa atau tidak?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bisa, asalkan koordinasi dengan daerah karena yang mengajukan itu harus bupati bukan kami yang menentukan. Dan kami akan juga menjadi pendampingan dengan Bapak dan Ibu sekalian, jadi jelas semua tidak ada keluhan lagi dan kita cover sesuai dengan anggaran yang kita bisa usulkan bisa ditambah.

KETUA RAPAT:

Jadi begini maksudnya Bapak Sekjen, dari Mbak Kiki itu maksudnya kalau Anggota Komisi IV DPR RI yang mewakili Dapilnya minta ada perubahan bisa atau tidak?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya, sepanjang mengikuti mekanisme yang kita bangun nantinya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, karena mekanismenya belum tentu nyambung, contoh di sana ada bupatinya Gerindra sedangkan Mbak Kiki PDI Perjuangan, kan tidak bakal nyambung.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya, itu menjadi perhatian kita Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya, harusnya tetap juga misalnya okelah bupati punya 60% diikuti, 40% kami punya aspirasi Anggota Komisi IV DPR RI. Karena begini Bapak Sekjen, ada tidak kriterianya kabupaten atau provinsi yang merusak lingkungan tetapi masih dapat DAK. Harusnya yang merusak lingkungan tidak perlu dapat DAK, ini yang paling penting. Tapi kalau kamu menjaga lingkungan, sungai kamu bagus, kalau perlu kasih 3 kali lipat, itu kami lebih setuju. Karena apa? Spirit kepala daerah membangun daerahnya, menjaga wilayahnya seperti itu.

Selanjutnya tadi Bapak Haerudin sudah daftar, 1 menit karena datang terlambat.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon maaf dari pagi kita di Banggar, karena ada hal yang harus di sampaikan jadi kita buru-buru kesini. Mudah-mudahan masih kebagian tapi alhamdulillah kebijaksanaan Bapak Ketua Sudin bisa memberikan waktu.

Bapak Ketua yang saya hormati,
Pimpinan yang saya hormati,
Anggota yang saya cintai,
Para Dirjen Eselon I dan perangkat yang hadir dari KLHK yang saya cintai dan hormati.

Pak Dirjen, saya masih nyambung dengan yang kemarin saya KLHK minta rilis mana pengusaha yang tidak bayar PNPB, yang nunggak PNPB, yang lahannya mengkhawatirkan dan belum ada perbaikan yang sesuai kewajibannya, karena ini menyambung persoalan omnibuslaw yang hari ini sudah dihapuskan pemidanaanya, sanksi pidana. Jadi kita butuh itu terbuka siapa-siapa saja, karena hari ini sudah ada gejala gerakan pemutihan, Bapak Sekjen lebih tahu. Dan kita ingin mem-back up KLHK bagaimana gerakan pemutihan lahan itu tertahan dan kembalikan ke negara. Itu yang pertama Bapak Sekjen.

Yang kedua, ini untuk Bapak Hudoyo, kan di Garut itu tidak masuk Citarum, tidak masuk Cisanggarung, tidak masuk Citanue, jadi kita tidak

ada program padahal kita banyak sungai Pak. Yang dari arah pegunungan Cikajang yang ke selatan itu berapa titik itu sungai-sungai besar, karena kan belah itu yang ke arah utara Citarum, Cimanuk dan yang lain yang ke selatan itu semua besar-besar juga lahanya rusak berat. Mohon tidak dikonsentrasikan ke Bogor lagi, Garut juga butuh pertolongan Pak, lahan-lahan yang longsornya itu. Dapil ke Bogor kayaknya dengan Bapak Ichsan.

Yang ketiga, kita butuh dengan Ibu Vivin tapi Ibu Vivin lagi keluar mohon dicatat Bapak Sekjen. Karena kan di sana ada limbah kulit yang hari ini belum bisa tertangani, minimal di minimize, butuh IPAL Komunal di masyarakat Sukaregang yang tempat pabrik kulit itu, yang baunya menyengat kemana-mana itu belum selesai-selesai dari dulu sampai sekarang. Kita butuh nanti konsultasi ke depan bagaimana baiknya.

Terima kasih Pimpinan, hanya itu yang kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir yang mulia Pimpinan Bapak Hasan Aminuddin.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen dan segenap pejabat Eselon I KLHK yang saya banggakan.

Yang pertama, saya bangga karena temanya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Ada 3 hal Pak Sekjen, untuk saya angkat semoga masih pendapat saya ini tidak sama dengan pendapat yang lain di akhir. Yang pertama, persoalan sampah ini akan terus terjadi persoalan. Yang pertama, saya sependapat dengan apa yang di sampaikan Bapak Ketua, pengadaan mobil itu serahkan kepada Pemerintah Daerah. Saya pikir kemampuan Pemerintah Daerah akan cukup mampu kalau urusan pengadaan truk.

Yang kedua, bagaimana melakukan sinkronisasi dengan gubernur dan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan gerakan tentang mencari solusi ini. Ajak Bupati, Walikota, dan Gubernur yang memang peduli menganggarkan tentang persoalan sampah ini. Yang saya inginkan selain pengadaannya itu, pengadaan yang lain menghapus pengadaan truk menganggarkan yang lain sebagaimana yang telah direncanakan.

Yang kedua, galian c ini memang saya tidak setuju dan sependapat manakala KLHK ini menganggarkan untuk rehabilitasi kerusakan tambang oleh pengusaha. Kalau bimbingan teknis silakan anggarkan sebanyak-banyaknya untuk melakukan bimtek kepada generasi muda agar supaya

bagaimana memulihkan galian c akibat kerusakan oleh pengusaha. Awasi dengan ketat pembangunan tol, banyak pelanggaran oleh BUMN kontraktol tol ini. Dia tidak melakukan pengambilan sampah sesuai hasil lab sehingga infrastruktur yang dibangun tatkala terjadi pelanggaran karena di sepanjang jalan tol itulah pusat pengambilan tanah untuk nguruk lahan yang akan dibangun tol sehingga infrastrukturnya hari ini sekali lagi banyak kerusakan infrastruktur tol yang memang ini bukan kewenangan Komisi IV DPR RI, namun akibat dari galian c yang liar oleh BUMN itu wajib diawasi oleh KLHL.

Yang ketiga, lahan. Lahan negara yang dikelola oleh selain BUMN atau yang dikelola oleh BUMN atau instansi lain yang hanya bermodalkan papan nama saya sebut saja TNI lah. Banyak melakukan penggarapan lahan milik negara ini agar supaya segera, kalau dulu mungkin Bapak Suharto memberi ijin untuk kesejahteraan Anggota TNI, namun hari ini pengelolaannya sudah bukan oleh institusi TNI tetapi oleh pengusaha yang tidak mensejahterakan Anggota TNI di sekitar lahan milik negara itu. Tugas siapa? Tentunya tugas LHK.

Selanjutnya persoalan lahan, saya ingin mengajak kepada LHK dengan BUMN-nya Perhutani dalam hal ini bagaimana memanfaatkan memobilisasi rakyat yang hari ini rakyat butuh makan. Saya ingin mengajak bagaimana lingkungan Perhutani itu ditanam dengan tanaman-tanaman yang mampu dipanen dengan tenggang waktu 3 bulan. Saya telah diskusi Pak, sebelumnya sebelum Rapat Kerja ini saya telah diskusi dengan Perhutani Jawa Timur dan alhamdulillah mufakat bagaimana lahan tidur ditanam oleh rakyat. Saya ingin menggerakkan PS (Perhutanan Sosial) itu 25 tahun, saya ingin melalui Kementerian ini Perhutani itu memberi PS cukup 5 tahun dengan tanaman yang cukup mampu menghidupkan rakyat di sekitar atau Lembaga Pendidikan kalau di Jawa Timur Pondok Pesantren.

Yang terakhir, saya sangat mendukung mohon maaf tatkala beda dengan teman-teman. Penanaman mangrove ini agar supaya tetap pada anggaran Rp400 miliar, cuman saya tidak sependapat menanamnya menjadikan tim pengawas ini bersangka buruk. Mohon tentukan arealnya, saya dahulu menjadi Anggota DPRD, Ketua DPRD di kampung Pak Sekjen itu sering ditipu oleh eksekutif. Eksekutif menyampaikan sebaran sekian juta bibit tersebar di kecamatan-kecamatan, sama saja jawabanya dengan Menteri yang disebut Pak Ketua tadi, kalau tidak percaya dicek agar supaya khusnuzon semua para tim pengawas ini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap coba tempatnya ditentukan khususnya di daerah pemilihan para Anggota yang terhormat Komisi IV DPR RI ini karena tanaman mangrove itu sangat berguna bagi pemanfaatan lingkungan dan penghuni laut terutama ikan dan kepiting yang penghuni di sepanjang dimana mangrove itu hidup.

Sekian, terima kasih.

Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Insya Allah Bapak waktu jadi eksekutif tidak seperti itu Pak.

Selanjutnya saya juga minta penjelasan perihal tadi, beberapa burung yang sudah dianggap tidak dilindungi lagi karena ini menjadi konsen dari Fraksi kami, karena next yang akan datang kita tidak tahu bentuk burung seperti apa namanya apa. Tolong dijelaskan.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Bapak Ketua, Bapak Sudin, Anggota yang terhormat.

Problem burung ini pertama kami sampaikan dulu yang selalu masih ada perburuan. Kami sampaikan kalau di Bakaheuni itu petugas kami hanya 5 karena Balai KSDAE Bengkulu dan Lampung jadi satu dulunya terpisah, ini juga persoalan. Kemudian kami sudah melibatkan 5 petugas tentu akan bekerja sama nanti dengan Bapak Roy untuk pengamanan masih banyak yang melewati Bakaheuni Pak.

Kemudian yang kedua, informasi awal tentang burung Pak, sudah ditangkap beberapa Cendrawasih, burung paruh bengkok, Cendrawasih Bapak, dan ini.

KETUA RAPAT:

Termasuk yang kemarin di Tanjung Priok?

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KLHK:**

Betul Bapak.

KETUA RAPAT:

Yang menangkap bukan petugas Bapak loh.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KLHK:**

Petugas kami Pak yang menangkap.

KETUA RAPAT:

Kepolisian Pak yang menangkap, karena Kapolresnya lapor ke saya Pak.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KLHK:**

Polres Soeta juga membantu kami Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan Polres Soeta Pak, ini Polres Tanjung Priok Pak, PKP-nya Pak.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KLHK:**

Ada ini laporan di kami yang 16 Juli ini di Pol Airud Balai Besar Karantina Tanjung Priok ini 12 ekor burung Cendrawasih dari KM Dobon Solo ini tentu dari daerah timur.

KETUA RAPAT:

Dari 12 yang mati berapa Pak, 8?

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KLHK:**

Dari 12 yang mati ada 4 ekor Pak.

KETUA RAPAT:

Lebih Pak, nanti Bapak cek lagi.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KLHK:**

Sisanya kan dibawa ke Tegal Alur Pak, di pusat penyelamatan satwa kami di Tegal Alur. Kemudian ada lagi kejadian 16 Maret Pak Sudin Bapak Ketua, ini juga demikian Paruh Bengkok, Kaka Tua Raja, ini banyak yang dari Papua. Jadi kami kemarin membuat edaran Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang burung-burung dari Papua KSDAE Papua yang wajib mengambil dengan biaya mereka.

KETUA RAPAT:

Bukan wajin Pak, kalau perlu dipecat Pak, berarti mereka pengawasannya tidak ada di sana. Karena mohon maaf ini, kalau saya lihat di bandara baik di Lampung atau di Jakarta yang nama Polhut itu kerjanya cuman antar jemput para pimpinan pejabat negara, tidak ada ngurus ngok bea cukai, meriksa tidak ada. Ini saya sangat mengamati sekali, sama juga dengan Karantina Pertanian jadi kalau yang disana itu kata Mbak Alien Eselon III, Eselon II, Eselon I kopernya dibawain, hanya

ngurusin itu saja sampai apapun masuk mereka tidak mau tahu yang penting saya bisa cari muka di atasan saya, itu seperti itu.

DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK:

Baik Bapak, nanti kami koreksi.

Kemudian sebetulnya selain problem berita-berita negative Bapak Sudin Bapak Ketua, di system pengamanan yang bagus di Jawa Tengah Pak, jadi para penangkar itu paling banyak di Jalak Bali itu ada 403 penangkar di Kaltan dengan pembinaan penangkar ini mereka bersedia mengembalikan sebagian satwa itu ke taman nasional. Ini salah satu contoh keberhasilan, kami sedang upayakan juga Pak, kalau yang melalui kapal-kapal Pelni kemudian ini Bapak Ketua, kalau pas ada pergantian pasukan itu 6 bulan sekali biasanya dari Jaya Pura Bapak, yang diperbatasan itu juga banyak membawa burung-burung terutama Paruh Bengkok. Ini juga perlu kami lakukan pengawasan dan menyurati mereka bahwa burung tersebut dilindungi.

KETUA RAPAT:

Tinggal bicara Pak Roy, Pak Roy langsung laporkan ke POM-nya, polisi militernya kalau terjadi demikian.

DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK:

Biasanya 6 bulan sekali Bapak yang diarea perbatasan.

Kemudian perlu kami tambahkan bahwa tadi disampaikan kami mengembat mandate mengurus 27,14 juta hektar kawasan konservasi di mana 5 juta hektarnya perairan Bapak. Dikelilingi oleh 6.747 desa, di 7.240 Kecamatan, di 514 Kabupaten, kami sudah petakan semua desa-desa ini tergantung kehidupannya dari air yang bersih untuk pertanian, untuk minum dan berbagai macam hasil hutan bukan kayu. Staff kami 6.424 orang dan PPNP-nya 3.308 orang, total pegawai 9.732 atau kalau pegawai kami diminta untuk menjaga hutan 1 orang harus menjaga 2.789 hektar. Kami mengelola 77 UPT, 26 Balai KSDA dan 48 Balai Taman Nasional. Kami sampaikan di anggaran 2021 Rp1,9 triliun anggaran tersebut kalau dibagi hektarnya tadi disampaikan Bapak Sekjen hanya Rp70.000 per hektar per tahun. Oleh karena itu, kami mempunyai strategi untuk membangun kerjasama dengan desa-desa melalui kemitraan konservasi Bapak. Jadi ini sudah kita kembangkan selain mereka ikut menjaga, mereka dapat manfaat dari restorasi ekosistem, termasuk desa-desa wisata di kembangkan bersama-sama.

Contoh menarik untuk menghindarkan perburuan burung Bapak, mereka kita berikan ijin wisata *word of chain* dan sudah lumayan berkembang di Jatimulyo di Kulon Progo mereka membuat peraturan desa

dan setelah setahun burung-burung tidak boleh, tidak ada ditembakin di situ dan desa itu menjadi desa wisata karena *word of chain*. Ini salah satu contoh barang kali. Kemudian yang gajah kami terus memantau yang di Tanggamus dengan GPS Polar sampai kira-kira 2 tahun Bapak, bisa dipakai di android.

Terima kasih Bapak Sudin.

KETUA RAPAT:

Terus saudara Dirjen saya juga menanyakan perihal kebun-kebun binatang maupun taman wisata yang meminjam atau dipinjamkan hewan-hewan yang dilindungi. Contohnya yang seperti di Lumajang harimaunya sampai kurus alasannya sudah tua, ya kalau tua kan tetap makan, kalau tidak makan ya mati. Pengusaha itu seperti Taman Safari lain-lain, waktu ramai dapat duit dia kagak ngomong, tapi giliran pengunjungnya sepi minta tolong, minta tolong cari donasi. Yang melanggar hukum tidak sesuai cabut Pak, itu saja cabut kembalikan ke hutan saja. Karena apa? orang itu pengusaha tidak bertanggungjawab, giliran untung untuk gua, giliran sepi gua minta sumbangan. Ini apaan dicabut saja Pak, dievaluasi. Iniloh saran saya.

Kemudian saudara Sekjen, saya tanya Litbang apa fungsinya. Ini Rp300 miliar lebih kalau memang tidak ada fungsinya, tidak menghasilkan pindahkan ditambahkan untuk KSDAE, karena saya tahu KSDAE itu saya sudah 10 kali ngomong, "tolong bantu saya belikan mobil untuk operasional termasuk di Taman Way Kambas", Taman Way Kambas itu dalam 10 tahun mungkin 10 ekor gajah ada yang mati, karena apa? ya karena kurangnya pengawasan, kalau pengawasannya cuman naik sepeda ya Insya Allah kalau yang ditangkapnya itu sudah sampai Surabaya dia baru sampai Bakaheuni. Itu saja saya mau tanya Litbang apa fungsinya, apa tugasnya supaya jelas.

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK (Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc.):

Mohon ijin Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Kepala Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menanggapi apa yang disampaikan Bapak Ketua, dapat kami sampaikan bahwa Badan Litbang dan Inovasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna, baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama ini hasil-hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai input untuk perumusan kebijakan oleh Pimpinan. Jadi baik itu secara *scientific* maupun *evident base* sehingga banyak dari hasil-hasil penelitian

tersebut memang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan. Selain itu, digunakan juga penerapan di masyarakat misalnya kegiatan mini hydro yang ditemukan oleh peneliti kita dan dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di daerah-daerah hutan, sehingga dengan mini hydro yang ada mereka bisa menghasilkan listrik, ini sebagai contoh. Kemudian banyak inovasi kami punya lebih dari 200 inovasi yang ada patennya juga sekitar 50 sampai 60 penelitian yang ada patennya. Dan ini juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan, baik Pemerintah, swasta, masyarakat maupun publik. Demikian Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Contohnya apa, saya belum paham contohnya apa, kalau Litbang mengadakan penelitian, pengembangan dan inovasi, misalnya bibit mangrove ini jelek, mutunya kurang bagus, diteliti oleh Litbang agar menjadi bagus, agar menjadi tahan hama, tahan hempasan, akarnya lebih banyak supaya tahan gelombang. Coba bagaimana, apa contohnya.

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK:

Untuk bibit-bibit kami juga ada penelitian yang misalnya bibit mangrove ada penelitian kami bibit mangrove yang juga digunakan oleh teman-teman di Ditjen PDASHL untuk ditanam. Kemudian juga banyak bibit-bibit lain, contohnya kita mempunyai bibit unggul untuk kayu putih, sekarang dimanfaatkan banyak karena mempunyai rendemen yang cukup tinggi, sehingga merupakan bukti bahwa hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan dan disebarluaskan.

KETUA RAPAT:

Sudah ada yang diperkaya atau diperbanyak, di mana tempatnya?

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK:

Sudah, kalau bibit-bibit kayu putih ada di Balai Besar Bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan di Jogjakarta Pak.

KETUA RAPAT:

Selain itu?

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK:

di daerah Jawa Tengah.

KETUA RAPAT:

Seberapa banyak?

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK:

Kalau untuk penelitian kami mempunyai HDTK itu sekitar 1000 hektar yang digunakan untuk penelitian itu, di Jogjakarta.

KETUA RAPAT:

1000 hektar seberapa banyak batangnya?

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK:

Batang kalau sekitar mungkin kalau satu hektar saja sekitar 20-50 mungkin 1000 hektar sekitar 50 ribuan batang.

KETUA RAPAT:

Ya kalau hanya penelitian gitu dengan dana Rp300 miliar lebih saudara Sekjen saya pikir evaluasi saja Litbang, dananya dialihkan ke lain saja. Jangan seperti di Kementerian Pertanian namanya Litbang tapi sulit berkembang ya Pak Ketua.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya mau tanya kepada Balitbang yang kita dengung-dengungkan dari dulu kan hutan kita luas sekali, biodiversity. Nah, dari penelitian Bapak-Bapak terhadap mikrobia-mikrobia apakah yang sudah kita kembangkan atau temukan atau muliakan, merugikan yang berguna bagi kehidupan manusia yang sudah ada dari Balitbang.

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI KLHK:

Sebagai contoh untuk pemuliaan tanaman hutan Pak, kami banyak jenis spesies yang kita muliakan yang tadinya hampir punah, misalnya jenis-jenis yang di Kalimantan jenis-jenis asli itu hampir punah tetapi dengan dilakukan pemuliaan tanaman hutan ini akhirnya bisa di budidayakan bahkan bisa dibudidayakan. Selain untuk kepentingan komersil ini juga tujuannya untuk mengumpulkan kembali jenis-jenis yang hampir punah sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Dan hampir banyak bukan hanya berapa jenis yang hampir punah misalnya di NTT, di Cendana itu kami budidayakan dengan metode bioteknologi dan

pemuliaan hutan, Alhamdulillah bisa diperbanyak bahkan digunakan untuk komersil.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, terkait dengan Litbang ini Ketua.

Pak Kepala, dalam pemahaman saya apa yang dijelaskan Bapak Kepala ini agak sedikit mengkhawatirkan karena dari struktur anggarannya saja saya melihat dari total Rp317 miliar itu program dukungan manajemen itu hampir 85%, sekitar Rp270 miliar. Sedangkan apa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan inovasi, iptek dan sebagainya itu, itu enggak lebih dari 10%. Jadi jomplang anggaran Litbang ini, artinya 85% itu anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen, hanya kurang dari 12% itu untuk pengembangan riset dan inovasi iptek. Artinya kalau kemudian dari struktur ini apa yang Bapak sampaikan tadi, saya khawatir itu tidak berjalan dengan baik, karena dari struktur anggarannya saja lebih banyak ke arah program dukungan manajemen. 85% strukturnya 317 total, dari total 317 miliar, 270 miliar itu untuk program dukungan manajemen. Nah, ini program manajemen apa, ini baru saya lihat di Litbang di Kementan saja tidak sampai 85% kalau dari struktur anggaran, di Litbang KKP juga enggak sampai 80%, tapi di anggaran di LHK ini 85% anggaran struktur anggarannya itu digunakan untuk dukungan manajemen Pak. Apa yang Bapak jelaskan tadi menurut saya tidak akan tercapai kalau struktur anggarannya seperti ini. Itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih.

Jadi Sekjen, saya minta pendanaan untuk Litbang dievaluasi seperti saudara Ichsan tadi mengatakan untuk dukungan manajemen 85% itu 15% untuk penelitian, apa yang diteliti. Kemudian Dirjen KSDAE saya barusan dapat laporan dari Polres Gresik disana ditangkap juga cukup banyak 8 Kakatua Jambul Kuning, Kakatua Raja, Kasturi Kepala Hitam dan lain-lain. Saya minta tolong nanti pada waktu Rapat Kerja dilaporkan, karena ini sudah gila-gilaan. Dan saya juga nanti ingatkan Pak Sekjen, waktu itu Ibu Menteri ada mengeluarkan Permen dua tahun lalu kalau enggak salah yang beberapa jenis burung yang dilindungi sudah tidak dilindungi lagi, ya Pak Sekjen ya.

Tadi yang dana Litbang kalau perlu dipindahkan, kalau perlu bantu saya Rp50 miliar untuk pembuatan museum di sebelah, misalnya Rp50 miliar tidak cukup tambahkan lagi. Jadi barang yang tertangkap atau yang telah dikembalikan, yang telah di-offside jangan dimusnahkan, dibangunlah uang itu minimal anak cucu kita nanti tahu "Oh, ini binatang ini, ini monyet, ini", kalau enggak nanti enggak tahu semuanya kasihan.

Ini satu lagi yang paling penting, LHK mengadakan pelepasan kawasan hutan tahun 2015 pada satu perusahaan seluas 19.000 hektar di

Kalimantan Tengah. Tolong Planologi dicek nanti dilaporkan PT-nya PT Sawit Mandiri Lestari. Ini juga yang perusahaan ini masih bermasalah dengan adat atau hutan adat di Kalimantan Tengah. Hari ini Pak darori, Pak Bambang sama Pak Dedi mewakili Komisi IV DPR RI kunjungan spesifik bersama Pak Wamen. Saya berharap kembalinya beliau ada temuan dan ada penindakan. Jadi Pak Roy jangan takut Pak Roy, siapa pun dia kalau memang salah sikat saja sudah. Kalau kita itu takut sama Gusti Allah saja sama yang lain-lain tidak usah takutlah. Itu saja kalau saya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, apa yang tadi disampaikan itukan hasil kunjungan spesifik kita di Komisi IV DPR RI, barusan ini memang juga kami diskusi di dalam group Komisi IV DPR RI. Menurut saya akan lebih kuat kalau kemudian apa yang disampaikan Bapak Ketua dan dilaporkan oleh Bapak Dedi Mulyadi, Pak Darori, dan Pak Bambang itu, itu kita perkuat dengan kesimpulan Pak Ketua. Saya usulin ini nanti masuk dalam kesimpulan apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi, karena bagaimanapun kita melihat ini agak rawan kondisinya dan sampai kunjungan spesifik itu dan kita harus kita sebagai kekuatan hukum yang cukup kuat kita masukkan kesimpulan dan Pak Roy dan kawan-kawan itu bisa melakukan tindakan Pak. Saya usul begitu Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya terserah floor kalau perlu setelah mereka pulang, Senin kita Rapat Kerja dimasukkan kesimpulan rapat agar supaya lebih komplit atau bagaimana.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sekarang saja Bapak Ketua, sekarang saja masukin nanti baru di Rapat Kerjanya nanti kita perkuat lagi dalam posisi itu.

KETUA RAPAT:

Jadi kita sebutnya indikasi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua, saya mohon ijin Pak. Untuk riset and development, kalau kita tidak menghargai kapan lagi Pak, jadi saya mohon jangan dihabisin semua karena bioteknologi itu penting Pak. Bagaimana kita mau menciptakan varietas-varietas baru kalau tidak ada anggaran.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, saya tanya Ibu Endang, Ibu Endang emang orang pertanian. Ada tidak Kementerian Pertanian 1,3 triliun itu membuat inovasi, saya tanya. Inovasinya cuma membuat virus anti corona, tetapi korban terbanyak ada di sana. Saya tadi tidak bilang menghabiskan, karena 85% untuk dukungan manajemen, saya minta dikurangin misalnya dikurangi Rp50 miliar untuk tadi pembangunan museum itu loh. Ini saya sudah 4 kalinya ngomong loh Sekjen. Sudah 4 kali saya ngomong mengenai museum itu, misalnya ada beruang, ada harimau banyak itu. Saya yakin di BKSDA Provinsi masih ada yang ditaruh digeletakin saja, akibatnya apa? Rusak. Kenapa sih enggak diselamatkan sudah gitu, sementara masih ada Razia-razia oleh KSDAE perihal oleh Gakkum, mohon maaf perihal para bos, para orang-orang hebat di rumahnya masih ada macan, masih ada beruang. Ini kalau diambil, dimusnahkan eman-eman sayang. Saya minta tolong sekali lagi pikirkan, pikirkan itu.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dari dialog, diskusi, saran masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara akhiri kami bacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, karena setelah ini kami akan Rapat Dengar Pendapat lagi mungkin sampai malam dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I serta Badan Restorasi Gambut, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp511.509.240.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp70.613.724.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

saya berharap waktu Rapat Kerja nanti terjadi perubahan, minimal harus Rp100 miliar.

- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp2.277.333.560.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp234.465.285.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp246.968.331.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- k. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp348.461.912.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- n. Badan Restorasi Gambut, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota?

Pemerintah?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Dicek dulu Ketua, angkanya Ketua, itu satu baru setelah itu kita setuju.

KETUA RAPAT:

Silakan dicek.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sudah disesuaikan Ketua.

KETUA RAPAT:

Sesuai.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rencana Program yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:
 - a. DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara periodik melaporkan pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tiap provinsi.

Anggota?

Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagaimana tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi anggaran dengan titik berat kepada program yang berdampak langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk di dalamnya Program Pengembangan Desa Wisata di sekitar kawasan hutan, serta program peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rasionalisasi terhadap pagu anggaran pada Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pengawasan internal di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota?

Bapak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan peta dan data

lokasi Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI sepakat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pendalaman atas dokumen audit lingkungan serta audit keuangan dalam rangka mengetahui kinerja perusahaan pemegang ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, baik perusahaan hak pengurusan hutan dan hutan tanaman industri, perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan, pelaksanaan perkebunan, perusahaan industri hasil hutan maupun perusahaan industri perkebunan.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ada penyesuaian Pimpinan, dan kaitan dengan audit lingkungan itu di ketentuan Undang-Undang 32 itu juga dilakukan oleh yang bersangkutan, swasta. Jadi prosedurnya seperti itu, atas perintah kita supaya terlihat jelas bahwa ini memang implementasi Undang-Undang. Prinsipnya kita setuju Ibu, hanya bahasanya jangan sampai.

KETUA RAPAT:

Bapak Sekjen bahasanya bagaimana, kalau kita setuju kita ketok palu kalau tidak kita pending lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Catatan Pimpinan, Ketua, untuk mendorong pelaksanaan audit lingkungan.

KETUA RAPAT:

Untuk mendorong.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Atas dokumennya tidak usah, karena pelaksanaannya, untuk mendorong pelaksanaan audit lingkungan karena ketentuannya sudah jelas, dokumennya tidak usah. Untuk audit keuangan itu ada lembaganya Ketua, yang menangani ijin bukan dari kita. Akuntan publiknya internal.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, jadi memang audit keuangan tidak, jangan dimasukkan kesitu audit keuangan. Tapi coba diingat kasus di Sumatera Selatan yang dibangga-banggakan HTI apa dulu namanya itu, tapi ternyata dia yang merusak lingkungan. Nah, kita tidak ingin kayak gitu kita mau adil berapa dikasih ijin HTI-nya, berapa produksi *play wood*-nya, berapa produksi selulusnya, darimana sumbernya. Kita ingin itu cara Komisi IV DPR RI untuk itu memanggil lingkungan dan Sekjen Kehutanan membawa mereka kesini, kita yang akan melakukan.

Terima kasih, begitu kira-kira.

KETUA RAPAT:

Bisa dibantu redaksinya Ichsan, Kiki tolong dibantu.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Intinya mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan perusahaan-perusahaan itu di mana perusahaan-perusahaan dibawa serta oleh KLHK kesini, begitu kira-kira apalah kata-katanya, kira-kira itulah maksudnya. Tapi nanti diperbaiki setelah ini boleh juga lah kalau belum ketemu sekarang, tapi maksudnya dia setuju kita ya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pelaksana audit lingkungan sudah menyeluruh Ketua, dan di didalamnya ada prosedur itu tentunya.

KETUA RAPAT:

Oke, saya ulang.

6. Komisi IV DPR RI sepakat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pelaksanaan audit lingkungan dalam rangka mengetahui kinerja perusahaan pemegang ijin bidang lingkungan hidup dan kehutanan, baik perusahaan HPH, HTI, serta

pemegang ijin pinjam kawasan hutan, perusahaan perkebunan, perusahaan industri hasil hutan maupun perusahaan industri perkebunan.

Jadi mungkin gini Bapak Mindo, nanti kita panggil perusahaan ini melalui Sekjen, tetapi tidak boleh rapat bersamaan, karena kita tidak boleh melanggar MD3. Kalau yang lalu itu antara pengusaha sama Eselon I digabung jadi satu, betul Bapak Mindo?. Tidak boleh, Rapat Dengar Pendapat Umum ya Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat ya Rapat Dengar Pendapat.

Anggota setuju nomor 6?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Kalau Rapat Dengar Pendapat Umum di pisah dengan point tersendiri bagaimana Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tidak, nanti kita panggil Rapat Dengar Pendapat Umum kita panggil namanya Rapat Dengar Pendapat Umum. Kita panggil dulu pengusahanya baru nanti kita konfirmasi dengan Eselon I, benar tidak pengusaha ini ngomongnya gini.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F.GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ijin Pimpinan, itu mengenai perusahaan industri apakah perlu digabungkan juga industri pertambangan juga Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gampang nanti kalau pertambangan kita panggil saja Bapak Budi, tenang saja. Yang penting perusahaan Bapak Budi tidak dipanggil.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan proses pelepasan kawasan hutan di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Oh beda, ini bukan begini protesnya. Jadi kalau yang 19.000 ini adalah kawasan pelepasan tahun 2015, jadi harus dipisah. Itu bukan yang kawasan bukan di Lamandau ya, yang Kinipan bukan di Lamandau setahu saya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau di group itu laporan dari Bapak Darori, Lamandau Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu yang 19.000 yang pelepasannya tahun 2015, yang Kinipan ini mana, siapa tahu, Lamandau juga? Kalau itu gini, pelepasan kawasan hutan itu hutan adat loh. Nah, ini sekarang hutan adat itu apakah hutan milik adat atau hutan adat yang di dalam hutan lindung. Saya minta penjelasan dulu ini, karena ini lagi sengketa antara masyarakat Dayak dengan pengusaha, pengusahanya backing-nya cukup kuat. Boba bagaimana?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Pimpinan, untuk menyampaikan analisis dan juga hasil temuan yang ada di lapangan. Dan pada saat ini sebetulnya hasil analisis itu dibawa juga oleh Bapak Wamen yang mendampingi Wakil Ketua ke Lamandau. Jadi betul Pak, bahwa dari 19.000 yang sudah dilepas itu Pak....

KETUA RAPAT:

2015.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

2015, ada 17.000 yang merupakan *high conservation value forest*, di mana di dalamnya ada usulan untuk hutan adat yang jumlahnya 10.701 hektar. Itu Pak, jadi yang pertama itu. Kemudian PT. Sawit Lestari ini mengusulkan untuk tambahan pada tahun 2017 dan sudah ditolak oleh Bapak Dirjen PKTL karena aturannya hutan produksi yang bisa dikonversi tetapi mempunyai tutupan lahan itu tidak bisa dipakai untuk perkebunan sawit tadi, itu sudah ditolak yang usulan kedua.

Nah, di dalam konteks resolusi konflik yang sekarang sedang dinegosiasikan di tingkat Tapak. Yang pertama, kita menuntut mengenai kewajiban-kewajiban PT. SML kaitannya dengan *high conservation value forest* tadi, itu untuk bisa dijadikan menjadi hutan adat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam konteks usulan yang sudah ditolak tadi yang menjadi hutan produksi yang bisa dikonservasi tetapi masih ada tutupan lahannya itu bisa diusulkan menjadi hutan adat namun menunggu Perda. Sambil menunggu Perda itu terbit, sementara ini bisa diatasi dengan usulan untuk menjadi perhutanan sosial, misalnya dengan hutan desa tapi yang dikelola oleh adat. Itu bentuk resolusi konflik yang ditawarkan yang pada saat ini sedang dinegosiasikan di tingkat Tapak.

Hutan hak dan hutan adat untuk menjembatani kalau belum ada Perda, sementara di daerah sudah ada subjek dan objeknya yang sudah diusulkan Pemerintah Daerah sementara dimasukkan dalam Peta Indikatif Lahan Hutan Adat (PILHA). Jadi dengan adanya PILHA tersebut, maka dia otomatis

sekuritas untuk pemanfaatan lahan untuk keperluan lain itu tidak terjadi di kemudian hari.

KETUA RAPAT:

Saya mau tanya kewajibannya apa saja yang belum dilaksanakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang pertama, bahwa dari 19.000 itu 17.000 adalah *high konservasi value forest*, dimana itu lokasinya, itu yang pertama Bapak Pimpinan. Kemudian yang kedua, bahwa dari kawasan hutan yang dilepas itu 20% dia harus membangun plasma untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini menolak bahwa yang 20% itu tidak usah dijadikan sawit akan tetapi tetap menjadi hutan. Nah, dari 2 hal ini barangkali yang perlu kita sampaikan kepada perusahaan agar itu bisa dijadikan menjadi hutan adat. Itu barangkali.

KETUA RAPAT:

Nah, sekarang kira-kira ada masukan untuk kesimpulan rapat ini. Coba apa redaksinya?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jadi untuk memastikan kewajiban-kewajiban perusahaan sebagaimana di dalam SK pelepasan kawasan antara lain, mengenai *high conservation value forest* itu 17.000 Pimpinan dan 20% areal plasma untuk masyarakat. Itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang lain bagaimana, perlu dihapus atau gimana?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dihapus, menghentikannya dihapus karena sudah terjadi, sudah terjadi pelepasan. "Potensi untuk menjadi hutan adat", kalau mau ditekankan seperti itu, "yang berpotensi sebagai hutan adat" setelah masyarakat, untuk masyarakat ya. "yang berpotensi diusulkan menjadi hutan adat".

KETUA RAPAT:

Ichsan.

F-PG (IR. ICHSAN FIRDAUS):

Mohon ijin Bapak Ketua, saya daripada agak rumit seperti ini lebih baik bahasanya adalah "melakukan evaluasi mendalam terkait dengan pelepasan kawasan hutan di Desa bla-bla dan hasil evaluasi itu disampaikan selambat-lambatnya sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan". Saya pakai bahasanya beginilah. "Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi terkait dengan SK Pelepasan Kawasan di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, bla-bla dan sebagainya yang akan digunakan sebagai perkebunan sawit PT. Sawit Mandiri Lestari mengingat tingginya potensi konflik yang terjadi. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan ke Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Jadi Ketua, di point 7 ini setelah kita mendapatkan hasil evaluasi itu kita mengambil kesimpulan di dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan apakah kemudian hasil evaluasi ini kita bisa putuskan, karena ini menyangkut dengan kewajiban hutan adat ini 20% ini. Jadi nanti biar kita di dalam Rapat Kerja itu bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sama-sama mengambil keputusan terkait dengan hasil evaluasi itu. Kalau boleh saya sarankan begitu Ketua.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Sekjen ada masukan, tidak apa-apa kita diskusi saja, sambil menunggu mereka pulang.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya ini ijin Ketua, karena ini menyangkut kinerja dari pemegang ijin. Dan di sinikan sudah ada pelepasannya dan sudah ada kebunnya, sudah ada HGU-nya, sehingga bahasa kami itu biasanya melakukan evaluasi kinerja. Dan berartikan persoalan dilapangan akan kita lihat dari semua aspek termasuk tentunya masyarakat hukum adat, termasuk HCVF dan akhirnya nanti ada solusi kita terhadap penyelesaian dan kita akan mengedepankan tentunya masyarakat dan kita akan evaluasi. Dan tadi yang usulan untuk penambahan kan sudah ditolak karena moratorium Impres Nomor 8 yang difasilitasi Ditjen.

KETUA RAPAT:

Tapi yang saya tanyakan penambahan itukan yang menjadi sumber konflik sekarang ini loh, betul tidak?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Pak Sigit, betul tidak yang menjadi konflik adalah yang penambahan bukan yang lama?

DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK:

Tahun 2017 itu PT. SML itu mengajukan penambahan di luar 19.000 terus pihak kami tidak bisa melanjutkan.

KETUA RAPAT:

Bapak hebat, Bapak berani.

DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK:

Karena benturan sama PP 104 apalagi dengan moratorium kelapa sawit.

KETUA RAPAT:

Moratorium kelapa sawit.

DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK:

Akhirnya kami tidak bisa melanjutkan proses itu, artinya menolak. Sampai disitu Pak, artinya setelah itukan berarti arealnya masih diluar itu. Artinya tinggal hasil Bapak Darori dan teman-teman dilapangan nanti solusinya bagaimana dengan daerah.

KETUA RAPAT:

Ini diluar areal 19.000 kan yang menjadi keributan antara yang bersangkutan dengan Ketua Suku Dayak.

DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK:

Ya mungkin, karena saya tidak mengecek lapangan, nanti mungkin kalau anu nyerempet-nyerempet bisa terjadi.

KETUA RAPAT:

Nanti saya minta tolong Gakkum turun nanti.

Ada yang mau disampaikan lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Pimpinan, sebetulnya hutan adatnya itu berada yang 19.000 sebagian, sebagian berada di dalam, dan sebagian lagi di areal yang dimohon untuk perluasan. Jadi ada dua kasus yang berbeda.

KETUA RAPAT:

Jadi dua kasus yang berbeda, satu di dalam kawasan yang sudah dilepaskan dan satu yang akan dimohon. Tapi yang akan dimohon berarti sudah digarap juga, berarti tugasnya Bapak Roy cuman kita lihat Bapak Roy berani tidak menghantam kesana. Coba Ichsan dibaca dulu sudah sesuai?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya Ketua, saya setuju tadi bahwa sesungguhnya yang menjadi konflik itu yang 20% kewajiban untuk hutan adat itukan.

KETUA RAPAT:

Bukan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya tapi bahasanya point 7 menurut saya agak okelah Ketua, karena evaluasi sambil menunggu, bukan sambil menunggu tetapi menurut saya yang akan digunakan sebagai dan mengingat tingginya potensi konflik yang terjadi. Laporan evaluasi disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Batas waktunya gitu laporan evaluasinya Bapak Ketua, sehingga teman-teman yang ada dilapangan kan besok ada, Rapat Kerja kan minggu depan jadi masih ada waktu sekitar 3-4 hari ini untuk mendapatkan hasil evaluasinya, baik yang dari Komisi IV DPR RI maupun yang dari Kementerian LHK, Itu kira-kira Bapak Ketua. Jadi laporan evaluasi agar di sampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya sebelum dilaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen sudah baca?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Ada perubahan?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang jelas kan sekarang masih berlangsung Ketua, pelaksanaan evaluasi dilapangan. Yang paling pas memang nantinya hasil lapangan itu dilaporkan pada Rapat Kerja itu malah lebih pas, karena semuanya akan terlihat disana, sehingga tidak perlu lagi menambahkan substansi-substansi

yang sebelumnya seperti HCVF, angka 20%, masyarakat, itu otomatis akan ada dalam laporan itu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya sudah, 20% dihilangin.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

HCVF juga dihilangkan.

KETUA RAPAT:

HCVF juga dihilangin, sambil menunggu hasil laporan baik dari LHK maupun dari Komisi IV DPR RI.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang akan dilaporkan pada saat Rapat Kerja, kami siap.

KETUA RAPAT:

Anggota sudah baca belum, setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang penting tidak menghilangkan niat kita semua hasil evaluasi lapangan itu dijadikan dasar kebijakan mengambil keputusan. Ijin Ketua, ketika kami diskusikan lagi dalam kaitan dengan butir 7 ini dengan butir 6, karena kami juga tidak ingin prosedur dari Undang-Undang 32 itu penerapannya nanti akan menghadapi tantangan. Kami ijin bisa melihat ke butir 6 Ketua, ada kata-kata yang harus kami sesuaikan Bapak Mindo ijin. Karena ketika melihat nomor 7 membahas perusahaan ini kita juga harus betul-betul cermat karena ini Rapat Dengar Pendapat dan dijadikan kesimpulan. Tidak mengurangi niat kami yang nomor 6 tadi, ini sudah betul yang barusan nomor 6 Pimpinan. Kami sudah diskusi lagi implementasinya untuk memudahkan, jadi tahapannya memang untuk audit lingkungan itu nantinya akan ketika ada kasus-kasus seperti yang tadi Bapak Mindo sampaikan contoh di Sumsel itu menjadikan bahan dari kami tugas kita semua, sehingga kami ijin audit lingkungan itu sebenarnya akhir sekali.

Kita membahasakan kajian kinerja lingkungan hidup perusahaan, karena mereka kan juga punya dokumen-dokumen yang kita harus lihat audit itu terakhir ketika kita tahu bahwa dari daftar perusahaan-perusahaan baik itu yang melakukan pelanggaran ataupun pengaduan itu memang nantinya ada audit, tapi yang dimaksud Bapak Mindo tadi karena saya ingat sekali kasus yang di Sumatera Selatan, supaya jadi baik kedepan. Kami mengusulkan audit lingkungan diganti menjadi mendorong pelaksanaan kajian kinerja lingkungan hidup perusahaan dalam rangka, terhadap perusahaan kalau kami usulkan karena yang menjadi kewenangan Menteri LHK adalah yang terkait

dengan HPH, HTI, pinjam pakai termasuk memang ada restorasi ekosistem misalnya itu juga menjadi bagian kami. Sementara perusahaan perkebunan itu bukan di kita Pak Ketua, karena sekali pun itu ada Tusi kita tapi kaitan dengan ini siapa yang.

KETUA RAPAT:

Tapi kalau perusahaannya perkebunannya illegal?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Itu Dirjen dalam kaitan memang penegakan hukum.

KETUA RAPAT:

Dirjen Perkebunan itu sekarang tidak mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi itu adanya di provinsi. Jadi kalau jaman dulu mau buka kebun harus minta rekomendasi dari Dirjen Perkebunan, sekarang Dirjen Perkebunan itu kerjanya melongok doang lihat.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jadi kalau kita bisa langsung lebih pasnya mungkin terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sebenarnya gitu ya.

KETUA RAPAT:

Tapi saya tetap yang perkebunan akan saya masukan, karena ini ada kaitannya apabila dia misalnya seperti Bapak Sigit kemarin melaporkan 800 ribu sekian di Kalimantan Tengah terjadi illegal. Termasuk tadi PT ini, PT. Sawit Mandiri Lestari ada juga yang illegal.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, masih terkait itu dengan pelepasan kawasan hutan memang kami akan melihatnya dari sisi pelepasannya, masih terkait.

F-PDIP (RIEZLY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, Interupsi.

Ingin mempertanyakan antara tadi kajian dengan audit. Secara tafsir output-nya antara audit dengan kajian ini berbeda Pak, makanya saya ingin mempertanyakan karena kalau memang kita mau serius berarti kenapa, ini permasalahan kata-kata saja.

Terima kasih Pimpinan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ini ada tahapan Pimpinan, dalam kaitan dengan pengendalian itukan kita mengenal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dan juga pada akhirnya sekian banyak ini Ibu Kiki, kita akan melihat yang akan masuk pada audit lingkungan yang mana Bapak. Karena kalau seperti ini seolah-olah seluruhnya harus di audit lingkungan. Arahnya nanti dari kajian kinerja ini itu akan ada lanjutan dari proses itu setelah mendengarkan pemaparan ataupun pandangan ataupun evaluasi dari kami, karena ini ada prosedurnya Bapak Ketua, agar tidak salah tanpa mengurangi harapan kami untuk melakukan evaluasi. Jadi kinerja perusahaan ini juga dilihat dari aspek lingkungan hidup tidak hanya Undang-Undang 41 tapi Undang-Undang Lingkungan Hidup juga kami gunakan. Pasti akan merespon dan menjawab yang diminta oleh Bapak Mindo dan Bapak Ketua, karena ini dalam bahasa harus pas sehingga kami mengusulkan kajian kinerja lingkungan hidup. Kajian itu lebih mengarah pada akhirnya akan ada usulan untuk dilakukan audit Ibu Kiki, karena ini prosedur Pimpinan yang menyangkut banyak pihak supaya tanpa mengurangi tujuan kita memasukkan ini dalam usulan. Dan juga pernah ini disampaikan waktu Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat yang lalu. Ibu Menteri selalu mengingatkan bahwa ada hal yang harus dilihat dari sisi kebijakannya sehingga kata-kata audit lingkungan merupakan hasil dari proses-proses termasuk mulai dari pencegahan dan seterusnya Pimpinan. Ijin Pimpinan untuk meralat dari putusan yang nomor 6.

KETUA RAPAT:

Anggota, sudah cukup nomor 6?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F.GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pimpinan, mungkin perlu dipertegas saja tujuan dari point 6 itu sendiri sebenarnya ujungnya apa Pimpinan. Karena sekarang ini cuman Rapat Dengar Pendapat untuk mendorong pelaksanaan kajian kinerja lingkungan hidup perusahaan, itu saja sekarang.

KETUA RAPAT:

Ujungnya adalah memeriksa perusahaan-perusahaan yang tidak benar, baik HPH maupun HTI.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F.GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bapak Sekjen, bagaimana itu untuk bisa dimasukkan Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sebenarnya jelas tadi yang disampaikan Bapak Mindo inikan kaitan dengan kewajiban atau ketaatan terhadap kewajiban pemegang ijin terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya kinerja itu arahnya kesana Pak Ketua, jadi tujuannya pasti akan ada sanksi.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau yang setahu saya perusahaan yang Sumsel itu joint venture antara Jepang apa namanya sama Inhutani iya toh, yang katanya rugi terus kalau sama Inhhutani. Sebetulnya disitukan ada wewenang Inspektorat dan BPK untuk memeriksa keuangan.

Anggota setuju?

Sekjen setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Hanya yang bergerak di bidang perkebunan Ketua, kami tidak masuk ke dalam ijin perkebunan.

KETUA RAPAT:

Saya masu masukkan, karena kalau illegal bagaimana?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bahasanya Ketua, kalau perusahaannya ini kami bukan Tusinya, tapi ketika memang dia melakukan illegal di kawasan hutan memang kami masuk Gakkumnya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sekarang yang illegal anda masuk tidak, masuk juga tidak ada tindaklanjutnya, kita harus jujur ngomong atau ditambahkan, maupun perusahaan industrl perkebunan yang belum mendapatkan pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, kalau perusahaan perkebunan yang jadi HGU itu memang sebagian ada yang pelepasan.

KETUA RAPAT:

Yang belum, yang saya katakan tadi maupun perusahaan industri perkebunan yang belum mendapatkan pelepasan kawasan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya, itu bisa.

KETUA RAPAT:

Yakan, tambahkan itu.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kami bisa masuk Pak, Bapak Dirjen Gakkum pasti masuk.

KETUA RAPAT:

Industrinya dihilangin, industrinya tidak ada, perkebunannya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Perusahaan perkebunan Pak, karena bisa dari APL, bisa dari pelepasan kawasan itu kita bisa masih masuk Pak. Yang nyambung dengan nomor 7 itu tadi ketika pelepasan sudah ada dan mengajukan kembali di tempat yang lain itu kan menjadi bagian kita juga bisa masuk.

KETUA RAPAT:

Anggota tolong ditengok lagi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tambahan saja yang belum mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan saja, bukan pelepasan hutannya tapi ijinnya Pak Ketua, tambahin saja. Tapi prinsipnya di point 6 kita samalah satu pikiran dengan LHK.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan ulang

6. Komisi IV DPR RI sepakat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pelaksanaan kajian kinerja lingkungan hidup perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, baik perusahaan Hak Pengusahaan Hutan atau HPH, perusahaan tanaman industri atau HTI, perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan.

Nah, ini pengertian termasuk tadi tambang apabila ada tambang sudah termasuk disitu.

Perusahaan industri hasil hutan maupun perusahaan perkebunan yang belum mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan.

Setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Nomor 7 sudah selesai kan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Itu jangan ditambahin itu sambil menunggu hasil kunjungan kerja itu tidak usah, itu hilangkan itu.

KETUA RAPAT:

Sampai kehutanan saja titik.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri atau menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini, kami persilakan saudara Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan kata penutup.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Akhir dari Rapat Dengar Pendapat ini terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI atas arahan, bimbingan atas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat hari ini. Dan kami akan segera menindaklanjuti hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabil'amin Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
196508171988031002